



Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH JAWA TENGAH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH JAWA TENGAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH JAWA TENGAH

- Penulis : Moehadi, AM. Djuliat Surojo,
J. Jamin, Titi Pratitis K, Djohar Noer
Yohannes Ngga, Teonika Dj. Bahon (anggota)
- Penyunting : Sutrisno Kutoyo
- Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
- Diterbitkan oleh : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan
Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta 1981
Edisi I 1981
- Diterbitkan ulang oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Edisi II 1997
- Dicetak oleh : CV. EKA DHARMA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan. dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dari pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta. November 1997

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Sedyawati', written over a horizontal line.

Prof Dr. Edi Sedyawati

KATA SAMBUTAN

Kita mengucapkan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, dengan telah berhasilnya disusun dan diterbitkan beberapa buku naskah dari beberapa aspek kebudayaan Daerah Jawa Tengah hasil penelitian tahun 1980/1981 dan tahun 1979/1980.

Diantaranya naskah itu adalah :

1. Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah,
2. Permainan Rakyat Daerah Jawa Tengah,
3. Ceritera Rakyat Daerah Jawa Tengah,
4. Sisten Gotong Royong dalam masyarakat Daerah Jawa Tengah.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa keadaan geografi negeri kita menyebabkan bermacam-macam bentuk kebudayaan yang tersebar di daerah-daerah, demikian juga Jawa Tengah.

Di Jawa Tengah, sungguh demikian banyak aspek kebudayaan yang perlu diteliti, dicatat dan dibukukan. Oleh sebab itu penerbitan naskah-naskah tersebut merupakan suatu usaha permulaan dan mungkin masih merupakan tahap pencatatan yang dapat disempurnakan di waktu-waktu yang akan datang.

Kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang diterbitkan dalam naskah tersebut bagi Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah baru untuk yang pertama kalinya, sehingga buku-buku terbitan ini kami pandang sangat

bermanfaat, terutama sekali bagi generasi muda kita yang wajib mengetahui untuk kemudian menghargai serta berbangga atas hasil kebudayaan yang banyak dan tinggi mutunya pada nenek moyang kita. Oleh karena itu kami mengharapkan bahwa dengan terbitnya naskah-naskah tersebut akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit nilainya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya penerbitan naskah-naskah tersebut.

Semarang, 28 Januari 1982.

Kepala
Kantor Wilayah Dept. P dan K
Propinsi Jawa Tengah

Drs. KOESTIDJO
Nip. 130 430 069.

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah* adalah satu diantara hasil-hasil pelaksanaan kegiatan penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985 Proyek Tersebut menerbitkannya pada tahun 1986 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian tentang pertumbuhan pendidikan di Jawa Tengah, mulai dari pendidikan tradisional, pendidikan Barat abad ke-19, pendidikan formal abad ke-20 sampai pendidikan zaman Jepang dan Indonesia pada masa kemerdekaan.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "biasa baca" dan "butuh baca" sangat menaruh minat untuk memperolehnya. Sementara itu, persediaan buku hasil cetakan pertama telah habis disebar luaskan secara instansional.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional mempercayai Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat untuk melakukan penyempurnaan, perbanyakan, dan penyebarluasan buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kebudayaan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, November 1997

**Pemimpin Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top left, followed by a horizontal line, and ending with a small flourish on the right.

Soejanto, B.Sc.

NIP. 130 604 670

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Sambutan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah	vii
Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Tujuan	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Metodologi	2
1.4 Hambatan	3
1.5 Garis Besar Perkembangan Pendidikan	3
1.6 Hasil Akhir	7
Bab II Pendidikan Tradisional	
2.1 Pengaruh Agama Hindu dan Budha	9
2.2 Pendidikan yang bercorak Hindu/Budha	13
2.3 Kedatangan Agama Islam	17
2.4 Pendidikan dan Pengajaran Islam	19
2.4.1 Pendidikan Langgar	19

2.4.2	Pendidikan Pesantren	20
2.4.3	Sistem Pengajaran Pesantren	21
2.4.4	Pendidikan Madrasah	23
2.5	Perkembangan Pendidikan dan Pengajaran Islam di Jawa Tengah	23
Bab III Pendidikan Barat Sampai Dengan Abad Ke-19		
3.1	Latar Belakang Keadaan Masyarakat Jawa Tengah sampai dengan Abad ke 19	27
3.2	Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda sampai dengan Abad ke 19	34
3.2.1	Sekolah-sekolah Sistem Barat yang Pertama (1808--1830)	34
3.2.2	Sekolah-sekolah Gubernemen pada jaman Cultuur Stelsel	36
3.2.3	Sekolah-sekolah Gubernemen Jaman Pemerintahan Liberal (1870--1900)	37
3.3	Pendidikan Swasta yang diselenggarakan orang Barat sampai dengan Abad ke 19	39
3.3.1	Pendidikan Swasta Kristen	39
3.3.2	Pendidikan Swasta Katolik	40
Bab IV Pendidikan Pada Abad Ke-20 (1900--1945)		
4.1	Politik Etika dan Perkembangan Pendidikan	45
4.1.1	Perubahan Pada Awal Abad ke-20: Politik Etika	45
4.1.2	Pergerakan Nasional dan Pendidikan	47
4.1.3	Politik Pemerintah Kolonial terhadap Pendidikan Negeri, Pendidikan Nasional dan Pendidikan Swasta Lainnya	48
4.1.4	Sikap Rakyat Indonesia terhadap Pendidikan Barat, Khususnya di Jawa Tengah	49
4.2	Pendidikan Jaman Hindia Belanda di Jawa Tengah (1900--1942)	50
4.2.1	Sekolah Gubernemen (Negeri)	52
4.2.2	Sekolah Swasta	58
4.3	Pendidikan Masa Jepang (1942 - 1945)	103

Bab V Pendidikan Masa Republik Indonesia (1945--1949)	
5.1 Politik Pemerintah Indonesia Terhadap Pendidikan ..	107
5.2 Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ...	114
5.2.1 Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan	114
5.2.2 Perguruan Tinggi dan Akademi	115
5.2.3 Sekolah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa ...	135
5.3 Pendidikan Yang Diselenggarakanqñ pihak Swasta	141
5.3.1 Sekolah Swasta Berasaskan Islam	141
5.3.2 Sekolah Swasta Berasaskan Kristen	142
5.3.3 Sekolah Swasta Berasaskan Katolik	142
5.3.4 Sekolah Swasta Berasaskan Non Agama	143
5.3.5 Sekolah Kejuruan Swasta	143
5.3.6 Sekolah Tinggi Swasta	144
5.3.7 Pendidikan Swasta Non Formal	158
Bab VI Penutup	
6.1 Proyeksi Pendidikan Masa Depan	161
6.2 Saran-saran	164
6.3 Kata Akhir	165
Kepustakaan	167
Lampiran	172

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Jumlah Sekolah-sekolah Negeri dan Swasta tahun 1897 seluruh Jawa dan Madura	39
2. Perbandingan Jumlah Sekolah dan Murid (Negeri dan Swasta) di Hindia Belanda pada tahun 1900 dan 1928	51
3. Daftar Sekolah-Sekolah Katolik yang menerima Subsidi tahun 1938	66
4. Sekolah-Sekolah Negeri di Jawa Tengah 1978 per kabupaten	175
5. a. Sekolah-Sekolah Islam di Jawa Tengah 1978 per Kabupaten/Kotamadya	177
b. Sekolah Islam (Madrasah) di Jawa Tengah tahun 1979--1980	179
c.. Keadaan Pondok Pesantren di Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 1978	181
6. Sekolah-Sekolah Kristen di Jawa Tengah 1978	182
7. Sekolah-Sekolah Katolik di Jawa Tengah 1978	184
8. Sekolah-sekolah Swasta non Agama di Jawa Tengah Tahun 1978 per Kabupaten	186

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
I. Statistik Pendidikan Propinsi Jawa Tengah tahun 1978	172
II. Jenis Sekolah dan Jumlah Murid/Jumlah Lulus.....	174
III. Nama dan Alamat Perguruan Tinggi Swasta yang termasuk dalam Wilayah KOPERTIS Wilayah V di Jawa Tengah.....	188
IV. Pedoman Wawancara Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah.....	190
V. Daftar Isian	194

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebudayaan yang memegang peranan penting dalam rangka Pembangunan Nasional, sehingga pengungkapan Sejarah Pendidikan di Daerah Jawa Tengah sangat diperlukan. Pengetahuan tentang pendidikan masa lampau sampai dewasa ini belum disusun secara lengkap, sehingga untuk suatu penelitian lebih lanjut perlu diadakan inventarisasi dan dokumentasi.

Dalam laporan ini Tim Aspek Sejarah Daerah mencoba mengadakan inventarisasi Sejarah Pendidikan yang berkembang di daerah Jawa Tengah. Sejarah Pendidikan di daerah tersebut meliputi tentang pendidikan tradisional, pendidikan yang mendapat pengaruh kebudayaan Barat, pendidikan masa abad ke-20, pendidikan dalam masa pendudukan Jepang serta pendidikan. masa Republik Indonesia.

Untuk menguraikan sejarah perkembangan pendidikan di daerah Jawa Tengah secara terperinci menurut perkembangan budaya yang menjadi latar belakang memang sulit, karena pada babakan jaman pengaruh budaya terhadap pendidikan di daerah tentu tidak sama kuat dengan di daerah yang lain. Dalam laporan ini hanya disajikan

pertumbuhan pendidikan di daerah Jawa Tengah secara garis besar dengan mengambil “daerah sampel” ibukota tiap daerah bekas karesidenan.

1.2. Ruang Lingkup

Kegiatan pencatatan dan pengumpulan data pendidikan daerah beruang lingkup Jawa Tengah. Karena terbatasnya waktu serta tenaga tim peneliti, maka pencatatan dan pengumpulan data ini membatasi pada wilayah “sampel” yang dipandang, oleh Tim peneliti “menyimpan” banyak data yang memadai. Dengan demikian bukan berarti bahwa daerah yang tidak termasuk “sampel” dan tidak terjangkau oleh tim peneliti/kurang memiliki atau menyimpan data tentang sejarah pendidikan yang lengkap.

Secara garis besar yang akan disusun dalam laporan ini mengenai sejarah pendidikan di Jawa Tengah meliputi :

1. Pendidikan Tradisional yang mendapat pengaruh kebudayaan Budha dan Islam.
2. Pendidikan pengaruh kebudayaan Barat :
 - a. Pengaruh Portugis
 - b. Pengaruh VOC.
 - c. Pengaruh Politik Kolonial Belanda.
3. Pendidikan Abad ke-20 :
 - a. Pendidikan jaman Politik Etis dan Pergerakan Nasional.
 - b. Pendidikan Jaman Jepang.
4. Pendidikan masa Republik Indonesi

1.3 Metodologi

Secara garis besar Penelitian mengenai sejarah pendidikan daerah Jawa Tengah ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu inventarisasi dan tahap penyusunan. Tahap pertama terdiri atas pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari kantor Departemen P dan K tingkat Ppropinsi/ Kabupaten/Kecamatan serta kantor Departemen Agama tingkat Propinsi/Kabupaten, yayasan yang menyelenggarakan sekolah umum maupun sekolah kejuruan, pondok pesantren dan perorangan.

Tim penelitian dibagi dalam kelompok yang disesuaikan dengan jumlah bekas daerah keresidenan di Jawa Tengah. Dalam pengumpulan data serta informasi para anggota tim dilengkapi dengan studi kepustakaan, rencana kerja, pedoman wawancara, kuesioner dan alat perekam.

Tahap kedua adalah penyusunan data. Hasil penyusunan masing-masing anggota tim dibahas bersama anggota tim, hasil laporan aspek Sejarah Daerah melalui proses penyuntingan (*editing*)

1.4 Hambatan

Hambatan yang dihadapi oleh para anggota tim waktu terjun di daerah yang langsung dirasakan antara lain kurangnya sumber yang tersedia, bekas peninggalan tempat pendidikan. sukar ditemukan atau sudah berubah fungsinya dan sebagian lagi telah mengalami perubahan atau perkembangan. Terutama untuk bidang pendidikan tradisional di daerah Jawa Tengah sulit menemukan bekasnya untuk memperoleh gambaran mengenai pendidikan tradisional yang bercorak Hindu/Budha serta Islam dipergunakan sumber literatur sebagai penunjang. Di samping sumber yang terbatas kadang-kadang beberapa orang petugas yang dihubungi kurang menguasai pengetahuan tentang sejarah pendidikan dan fasilitas untuk memperolehnya mengalami kesulitan.

Tim peneliti aspek sejarah pendidikan merasa belum puas terhadap hasil kerjanya sendiri, karena masih terdapat kekurangan dan masalah dalam laporan ini. Meskipun hasil penelitian ini kurang bermutu, namun pelaksanaan penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga bagi tim peneliti sendiri. Akhirnya naskah laporan ini seyogyanya dianggap sebagai usaha merintis ke arah penelitian lain yang lebih sempurna.

1.5 Garis Besar Perkembangan Pendidikan

Dari sejarah pendidikan tradisional yang masih dapat diikuti perkembangannya sampai dewasa ini adalah sistem pendidikan dan pengajaran Islam, yaitu berupa pesantren. Sistem pendidikan pesantren

ini sejalan dengan penyebaran agama Islam, khususnya di daerah Jawa Tengah.

Pasang surutnya pendidikan pesantren sejalan pula dengan pasang surutnya perkembangan pengaruh politik dan budaya asing di Indonesia. Beberapa pesantren yang tumbuh dan berkembang di daerah Jawa Tengah kebanyakan terdapat di daerah pesisir utara seperti di Kaliwungu (Kendal), Kudus, Lasem (Remban), Pati dan sebagainya. Di antaranya yang tergolong maju ialah pondok pesantren. Pabelan di Kabupaten Magelang.

Pengaruh kebudayaan Barat dalam perkembangan pendidikan di Indonesia yang sangat mendalam adalah pengaruh kebudayaan serta politik kolonial Belanda. Pengaruh Portugis dalam pendidikan terutama terdapat di daerah Maluku, sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah pengaruh Portugis dalam pendidikan hampir tidak ada.

Perkembangan pendidikan masa kegiatan VOC di Indonesia terbatas dalam hubungannya dengan kepentingan VOC. Karena, VOC merupakan suatu perusahaan dagang, maka organisasi tersebut bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam menjalankan kegiatan perdagangan VOC memerlukan tenaga pembantu dari kalangan pribumi, maka mereka perlu mendapat pendidikan sekedarnya supaya dapat menjalankan tugasnya, Dasar pendidikan VOC adalah agama Protestan.

Menjelang abad ke-19 VOC mengalami kemunduran yang akhirnya runtuh, sehingga kekuasaannya diambil-alih oleh pemerintah Belanda. Di Indonesia mulai berlaku politik kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mulai memperhatikan bidang pendidikan dan pengajaran.

Pemindahan kekuasaan dari VOC kepada pemerintah Belanda berlangsung ketika di Eropa sedang terjadi peperangan yang melibatkan negeri Belanda. Yang diangkat menjadi-raja Belanda waktu itu adalah Louis (Lodewijk) Napoleon, saudara Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis.

Dalam tahun 1807 H.W. Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia, Belanda, yang juga memperhatikan pendidikan

dan pengajaran. Dalam masa kekuasaan Inggris di Hindia Belanda di bawah Letnan Gubernur Jenderal Raffles pendidikan tidak mendapat perhatian, tetapi Raffles lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Raffles menaruh perhatian dalam bidang sejarah, budaya dan penelitian ilmu tumbuh-tumbuhan. Tulisan Raffles tentang sejarah Jawa (*History of Java*) merupakan suatu karya yang berisi tentang kehidupan kebudayaan Jawa.

Waktu Belanda berkuasa kembali di Indonesia pada tahun 1816 tidak ada satu pun sekolah negeri. Sekolah pertama dibuka untuk anak Eropa (Belanda) di Betawi pada tanggal 24 Februari 1817.

Paham *Aufklarung* yang berkembang pada abad ke-18 telah mulai mempengaruhi kehidupan politik di negeri Belanda dalam bentuk partai Liberal. Partai Liberal memegang peranan dalam kehidupan ketatanegaraan dan politik pemerintahan di negeri Belanda menjelang pertengahan abad ke-19.

Situasi dan kondisi kehidupan politik di negeri Belanda selalu berpengaruh terhadap politik kolonial di Hindia Belanda. Paham tersebut, Gubernur Jenderal diwajibkan supaya memberikan kesempatan belajar kepada anak pribumi.

Tahun-tahun permulaan abad ke-20 di Hindia Belanda terjadi perkembangan dan perubahan khususnya dalam bidang politik, ekonomi dan idiiil. Timbullah perluasan jabatan pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia.

Bersamaan dengan masa perkembangan ekonomi sedang berlangsung dilancarkanlah suatu ide bahwa kemakmuran penduduk pribumi telah merosot. Pemerintah Hindia Belanda mulai memperhatikan kemakmuran dan kemajuan penduduk pribumi. Belanda mulai menganggap dirinya sebagai pelindung yang berkewajiban memberi bimbingan kepada penduduk daerah jajahan. Sistem eksploitasi diganti dengan politik pengajaran yang maju. Orientasi baru ini terkenal dengan bermacam-macam nama seperti politik etis, politik kemakmuran atau politik asosiasi.

Salah seorang, dari golongan etis yang terkemuka ialah Van Deventer penulis artikel yang berjudul "Hutang Budi"

(*Een Eere Schuld*) dalam tahun 1899. Politik Etis menggunakan tiga sila sebagai semboyannya yaitu Irigasi, Edukasi dan Emigrasi. Perkebunan tebu menghendaki irigasi yang intensip. Pabrik-pabrik, kantor dagang dan perusahaan yang lain menyebabkan timbulnya kebutuhan akan banyak- pegawai yang berpendidikan Barat. Sekolah mulai diperluas dan diperbanyak.

Melalui pendidikan masa kolonial Belanda bangsa Indonesia menyadari akan posisi mereka yang terbelakang sebagai akibat dari kolonialisme dan tradisionalisme. Kemudian timbullah hasrat untuk maju dan kebutuhan akan pendidikan makin dirasakan.

Sesungguhnya ada hubungan timbal balik antara perkembangan gerakan nasional dan ekspansi pendidikan modern. Pengaruh pendidikan dapat mengancam politik kolonial itu sendiri sehingga pendidikan dapat dipandang sebagai bom waktu bagi sistem kolonial. Dengan demikian dapat dipahani mengapa pendirian sekolah modern dan pendidikan yang lebih tinggi dilaksanakan oleh Belanda dengan secara lamban.

Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia dengan kemenangan perang telah melepaskan belunggu kolonial, tetapi mengetrapkan sistem penjajahan dengan corak yang lain. Kekuasaan Angkatan Bersenjata Jepang di Indonesia hanya sedikit sekali perhatiannya terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan Penggolongan jenis sekolah menurut kebangsaan maupun status sosial dihapus. Perkembangan baru pada masa pendudukan Jepang ialah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi baik di sekolah maupun di kantor dan surat menyurat resmi. Pemakaian bahasa Belanda dilarang dan bahasa Jepang mulai menduduki tempat sebagai bahasa kedua.- Dengan disederhanakannya sistem pendidikan dan persekolahan pada masa pendudukan Jepang, maka terbukalah kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah perubahan bentuk ketatanegaraan serta bidang pemerintahan yang meliputi pula perubahan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan

meliputi penyesuaian bidang pendidikan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Pendidikan tersebut mengalami perubahan dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Seperti tercermin dalam pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

1. Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian naskah Undang-undang Pokok Pendidikan dan pengajaran dalam tahun 1950, yaitu Undang-undang no., 4 tahun 1950. Kurikulum pertama yang digunakan ialah kurikulum tahun '1950, kemudian diubah menjadi kurikulum tahun 1958 yang digunakan sampai tahun 1964. Kurikulum terus mengalami perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia sehingga lahirlah berturut-turut kurikulum tahun 1965,) tahun 1968. Namun dalam rangka peningkatan serta penyempurnaan pendidikan kemudian disusun kurikulum baru, yaitu kurikulum tahun 1975.

1.6 Hasil Akhir

Naskah ini aslinya disusun oleh tim di daerah, berdasarkan kerangka yang disusun oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah dr Pusat. Kemudian diadakan penilaian yang dilakukan secara bersama. Langkah berikutnya adalah penyuntingan dengan menitik-beratkan pada segi: materi, pendekatan dan kebahasaan.

Pada pokoknya naskah ini sudah sesuai dengan kerangka yang dikehendaki dan dengan segala kekuatan dan kelemahannya hendaknya dilihat sebagai usaha perintisan untuk lebih disempurnakan pada masa kemudian.

BAB II

PENDIDIKAN TRADISIONAL

2.1 Pengaruh Agama Hindu Dan Budha

Peninggalan tertua adanya pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia terdapat di daerah Kutai dekat muara sungai Mahakam (Kalimantan Timur), yang diketemukan dalam tahun 1940. Peninggalan itu berupa tujuh buah yupa atau tugu batu yang memuat tulisan dengan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Menilik bentuk dan jenisnya huruf Pallawa itu berasal dari sekitar tahun 400 Masehi.

Dari salah satu yupa dapat diketahui nama rajanya ialah *Mulawarman*, *putera raja Aqwawarman*, cucu raja *Kudungga*. Nama *Mulawarman* dan *Aqwawarman* menunjukkan berasal dari bahasa Sanskerta, sedangkan nama *Kudungga* jelas bukan nama Sanskerta. Maka dapatlah dikatakan bahwa raja Kutai adalah keturunan Indonesia asli dan setelah mendapat pengaruh Hindu, membiasakan dirinya memakai nama Hindu dan corak kehinduan itu mulai sejak pemerintahan *Aqwawarman*.

Sedangkan kebiasaan mendirikan tugu batu untuk peringatan merupakan kebiasaan yang berasal dari jaman kebudayaan Batu-Besar atau Megalitikum, yaitu berupa menhir. Adapun kedatangan pengaruh kebudayaan Hindu ke Indonesia dimungkinkan melalui hubungan perdagangan antara India dan negeri-negeri Timur yang telah terjalin sejak abad-abad permulaan Masehi. Untuk keperluan perdagangan

para pedagang dari India banyak yang bermukim di kota bandar Indonesia. Bahkan di antara mereka ada yang menikah dengan wanita Indonesia asli penduduk setempat, sehingga terbentuklah keturunan campuran Indonesia Hindu.

J.C. van Leur telah mengadakan analisa historis tentang hubungan perdagangan di wilayah Asia kuno, yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu di beberapa wilayah Indonesia. Proses yang serupa terjadi seribu tahun kemudian, ketika para saudagar Islam bersamaan dengan hubungan perdagangan membawa agama mereka.

N.J. Krom juga lebih condong untuk menempatkan peranan para saudagar dalam penyebaran pengaruh kebudayaan Hindu. Tetapi dengan pengertian, bahwa tidak selamanya terbatas para saudagar-saudagar saja, karena setelah berdiri masyarakat Indonesia. Hindu juga para pendukung kebudayaan yang lain dan yang lebih baik memainkan peranan mereka.

Pengaruh kebudayaan Hindu prosesnya berjalan secara perlahan-lahan dan pada tiap daerah tidak sama kuatnya. Di daerah Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya pengaruh kebudayaan Hindu sangat kurang. Sebaliknya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali pengaruh kebudayaan Hindu sangat kuat. Hal itu dapat kita buktikan dengan sisa peninggalan yang berupa batu piagam, bangunan candi, serta hasil kebudayaan yang lain.

Tanda adanya pengaruh kebudayaan Hindu di Jawa Tengah terjadi sekitar abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dalam masa dinasti Tang di negeri Cina (618--906) menyebutkan nama sebuah kerajaan Ho-ling, yang pernah mengirimkan utusan ke negeri Cina Utara tahun 647--666 Masehi.

Nama *Ho-ling* diperkirakan berasal dari nama kerajaan *Kalingga* atau *Kaling*. Tentang letak kerajaan ini masih belum ada persamaan pendapat di kalangan ahli sejarah. Prof. N.J. Krom berpendapat bahwa Kaling berada di Jawa Tengah. Prof. Dr. R. Ng. Purbatjaraka berpendapat bahwa adanya kerajaan Kalingga di Jawa Tengah mungkin karena adanya maharaja Harsa (606--648) di Hindustan Utara yang selalu menyerang dan merusak kerajaan Kalingga, sehingga memaksa kerajaan itu pindah ke Jawa.

Berita lain mengenai Kalingga dari seorang pendeta Budha bangsa Cina yang bernama *I Tsing* menyatakan bahwa dalam tahun 664 seorang pendeta bernama *Hwi-ning* datang di Holing dan tinggal di sana selama kira-kira tiga tahun (664--667). Dengan bantuan seorang pendeta Ho-ling yang bernama Jnanabadhra ia menterjemahkan kitab suci agama Budha Hinayana. Jnanabadhra berasal dari Jawa yang dikatakan pandai bahasa Sanskerta.

Dalam abad ke-7 Masehi di Kalingga sudah dipergunakan bahasa Jawa Kuna yang oleh I-Tsing disebut bahasa *Kw'unlun*. Mengenai kerajaan Kalingga yang diketahui hanya masa *Ratu Sima* yang memerintah sekitar tahun 674. Pemerintahannya sangat keras dan bijaksana, rakyatnya hidup aman dan tentram. Wilayah kekuasaan Kalingga meliputi 28 daerah.

Mengingat bahwa ibukota kerajaan Kalingga sering mendapat kunjungan bangsa asing, maka ada kemungkinan letak ibukota itu di daerah dekat pantai. Sehubungan dengan hal itu, maka timbul suatu anggapan bahwa ibukota kerajaan Kalingga mungkin terletak di dekat kota Jepara sekarang. Di Jepara ada sebuah kecamatan yang bernama Keling yang berada di daerah dekat Pantai. Makin memperkuat pendapat tersebut setelah beberapa tahun yang lalu di daerah Keling pernah ditemukan benda purbakala berupa di antaranya sebuah cincin cap yang terbuat dari pada Emas 8 karat beratnya 36,9 gram. Pada cincin tersebut tertulis-gambar kepala banteng dan ada tulisan nama Sima dengan huruf Pallawa.

Berdasarkan piagam peninggalan yang pernah diketemukan sekitar abad ke-8 di Jawa Tengah terdapat dua dinasti yang berkuasa yaitu wangsa *Sanjaya* dan wangsa *Syailendra*. Berita mengenai wangsa Sanjaya hanya kita ketahui dari prasasti yang diketemukan di desa *Canggal*, sebelah barat daya kota Magelang. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Angka tahun dalam prasasti Canggal sesuai dengan tahun Masehi 732. Nama raja yang disebutkan ialah Sanjaya. Kerajaannya kemudian dikenal dengan nama kerajaan Mataram - Hindu.

Prof. Purbatjaraka beranggapan bahwa berdasarkan tanda-tanda agama, yaitu yang tertulis dalam prasasti Canggal dan prasasti Muara

Kaman (Kalimantan), mungkin telah terjadi hubungan antara Jawa Tengah dengan daerah Kutai.

Nama Syailendra pertama kali dapat diketahui dari sebuah prasasti yang terdapat di desa Kalaoa (Kalasan) yang diperkirakan berasal dari tahun 778 Masehi. Prasasti tersebut ditulis dalam huruf Pranagari berbahasa Sanskerta yang menceritakan pembuatan Candi Kalasan dan berisi pujian terhadap Dewi Tara (Dewi dalam kepercayaan agama -Budhal Sedangkan berdasarkan prasasti raja Balitung dari tahun 907 Panangkaran adalah pengganti yang menganut agama Hindu, pemuja Syiwa; sedangwangsa Syailendra menganut agama Budha aliran Mahayana, yang condong kepada Tantrayana.

Menilik candi-candi yang berasal dari peninggalan abad ke-8 dan ke-9 di Jawa Tengah bersifat Hindu, sedang di Jawa Tengah bagian selatan bersifat Budha, maka ada kemungkinan bahwa wangsa Sanjaya dan wangsa Syailendra memerintah dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa daerah kekuasaan wangsa Sanjaya di Jawa Tengah Utara dan wangsa Syailendra daerah kekuasaannya di Jawa Tengah Selatan.

Candi-candi bercorak Hindu yang terpenting di Jawa Tengah bagian utara :

1. Candi Gedong Songo di lereng gunung Ungaran.
2. Kelompok percandian di dataran tinggi Dieng yang oleh penduduk diberi nama tokoh-tokoh wayang.
3. Candi gunung Wukir dekat Magelang.

Candi-candi bercorak Budha yang terpenting di Jawa Tengah bagian selatan :

1. Candi Borobudur.
2. Candi Mendut sebelah timur Borobudur.
3. Candi Kalasan.
4. Candi Sari.
5. Kelompok candi Sewu.
6. Candi Plaosan.

Candi-candi yang bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian Selatan ialah kelompok candi Loro Jonggrang di Prambanan dan candi Sambisari.

2.2 Pendidikan Yang Bercorak Hindu/Budha

Tentang pendidikan sebelum kedatangan pengaruh agama Hindu/Budha sulit untuk diketahui, karena masa itu belum terdapat peninggalan yang berupa tulisan. Yang dapat dikemukakan mengenai pendidikan dalam masa sebelum kedatangan pengaruh Hindu/Budha yaitu tentang sistem berburu dan menangkap ikan, sistem membuat alat, upacara keagamaan serta mantra, kesenian dan sebagainya.

Pada masa pengaruh Hindu dikenal dua macam guru, yaitu guru kraton dan guru pertapa. Guru kraton diundang oleh raja atau raja dan kerabat kraton. Sedangkan guru pertapa murid-muridnya berdatangan dari kalangan rakyat biasa maupun kalangan bangsawan.

Sistem pendidikan pada masa Hindu dipengaruhi oleh sistem pendidikan di India yaitu *guru kula*. Sistem pendidikan guru kula, yaitu sistem pendidikan asrama, para murid tinggal bersama keluarga guru. Guru dianggap orang sakti yang harus dihormati dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap. Guru mendapat imbalan dari para muridnya berupa tenaga kerja atau berupa benda (nature). Pola semacam ini kelak akan berkembang dalam masa pengaruh Islam, yaitu berupa pondok.

Menurut cerita Cina tentang kerajaan Kalingga dikatakan dikelilingi oleh pagar kayu, istana raja merupakan rumah bertingkat dengan atap rumbia. Tempat duduk sang Ratu peterana gading. Rakyatnya sudah pandai menulis dan mengenal ilmu perbintangan. Mereka membuat minuman keras dari air yang disadap dari pohon kelapa.

Berita tentang kejujuran rakyat kerajaan Kalingga terdengar oleh raja Ta-che. (menurut N.J.Krom sebutan bagi orang Arab), yang menyuruh seorang utusan meletakkan pundi-pundi yang berisi emas di tengah jalan kerajaan Kalingga tiga tahun pundi-pundi itu tetap di tempatnya tanpa seorang pun yang berani menyentuhnya. Suatu

ketika pundi-pundi tersebut tidak sengaja tersentuh oleh kaki putra Ratu Sima sendiri. Oleh Ratu Sima diperintahkan hukuman mati atas anak kandungnya itu. Tetapi dengan pertimbangan para pembesar kerajaan hukuman mati dapat dicegah dan diganti dengan memotong jari kakinya. Hal tersebut mengandung unsur pendidikan kejujuran bagi rakyat kerajaan Kalingga serta mentaati hukum yang berlaku di kerajaan tersebut.

Dari berita I-tsing yang menyatakan bahwa seorang pendeta Budha bangsa Cina yang bernama Hwi-ning yang berkunjung ke Kalingga dan tinggal selama tiga tahun, telah menterjemahkan sebuah naskah terkenal tentang agama Budha-Hi'nayana ke dalam bahasa Cina dengan bantuan Janabadra. Janabadra adalah seorang Jawa asli yang beragama Budha.

Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa Kalingga telah merupakan pusat pengetahuan agama Budha, sehingga orang dari negeri Cina datang untuk belajar ke sana. Sehubungan dengan itu, maka jelas bahwa pengajaran tentang bahasa Sanskerta telah berkembang di Kalingga.

Jika kita perhatikan cara pengelompokan candi di Jawa Tengah erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Demikianlah pengelompokan candi di Jawa Tengah bagian selatan ialah candi induk berdiri di tengah-tengah dan dikelilingi oleh beberapa candi perwara, sedangkan di Jawa Tengah bagian utara kelompok percandiannya tidak tersusun semacam itu, tetapi masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Hal yang semacam itu mencerminkan wangsa Syailendra yang bersifat feodal dengan bentuk perserikatan kerajaan-kerajaan raja menjadi pusatnya, sedang wangsa Sanjaya bersifat demokratis. .

Dalam prasasti Kalasan yang diperkirakan dari jaman tahun 778 Masehi isinya menyebutkan, bahwa para guru sang Raja Panangkarana untuk mendirikan bangunan suci bagi Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta.

Pendidikan dalam masa pengaruh agama Budha di Jawa Tengah terutama dalam bentuk asrama atau biara pendeta yang biasanya berada di dekat bangunan suci atau candi Budha. Sebuah prasasti di

Klurak (782 Masehi) di daerah Prambanan yang ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta menyebutkan : nama raja Indra dari wangsa Syailendra dan bahwa guru dari tanah Gaudi (Benggala) yang bernama Kumaragosha mendirikan patung Bodhisatwa Manyuori yang dalam dirinya mengandung Budha - Dharma Sanggaha, yang sama dengan Brahma - Wisnu dan Syiwa. Nampak sifat Tantrayana di sini.

Penyelidikan tulisan prasasti yang berhuruf Pranagari di Jawa sesuai - dengan yang berasal dari Benggala dan Nepal. Benggala merupakan pusat kehidupan Budhisme yang besar dan di Nalanda (Nalanda) ada perguruan tinggi agama Budha, dalam arti jaman itu., yang pertama kali

Di dataran tinggi Dieng terdapat kompleks candi Syiwa dan dahulu merupakan "kota para padri". Sekeliling candi terdapat rumah kediaman atau asrama untuk para pendeta serta pelayan mereka. Demikianlah pula didirikan tempat menumpang bagi para musyafir dan pesanggrahan. bagi raja, para pembesar serta pengiringnya. Raja sering berkunjung ke kota pendeta di Dieng.

Seni bangunan.candi dan arca di daerah Dieng meskipun berasal dari pengaruh Hindu, namun yang mengerjakan adalah orang Indonesia (Jawa) sendiri, yang telah diolah sehingga merupakan hasil seni bangunan Jawa - Hindu. Dalam hal ini telah berkembang pendidikan seni bangunan candi dan patung yang guru-gurunya berasal dari India.

Dalam pertengahan abad ke-9 wangsa Sanjaya bersatu dengan wangsa Syailendra setelah terjadi perkawinan antara Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya dengan Pramodhawardani putri raja Samarattungga dari wangsa Syailendra. Agaknya candi Borobudur didirikan oleh Samarattungga dalam tahun 824 Masehi dan istana Samarattungga diduga terletak di sebelah selatan Prambanan, yaitu istana Prabu Baka.

Candi Borobudur bentuk dasarnya sesungguhnya merupakan punden berundak yang disesuaikan dengan agama Budha Mahayana. Borobudur merupakan bangunan stupa yang menggambarkan urutan tingkatan kehidupan dari **kamadhatu - rupadhatu - arupadhatu - stupa**. Borobudur merupakan bangunan besar bagi para pendeta

Budha. Di kaki bukit tempat candi itu, didirikan sebuah biara tempat para pendeta tinggal dan mempelajari ajaran agama -Budha. Makna yang sedalam-dalamnya dari candi Borobudur hanya dapat dipahami dengan mendalam oleh para pendeta Budha yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk bertapa dan bersamadi. Buah pikiran serta ajaran sang Budha yang dipahatkan pada dinding candi Borobudur hanya dapat dipelajari setelah memperoleh pendidikan atau mempelajarinya bertahun-tahun dalam biara. Maka untuk rakyat jelata perlu ada semacam “Buku petunjuk” yang lain.

Pengaruh kebudayaan dari India di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya menimbulkan sifat meniru di kalangan masyarakat. Raja-raja keluarga Syailendra memilih tempat untuk mendirikan berbagai bangunansuci, yaitu Borobudur, Mendut dan Pawon di lembah sungai Progo yang dipandang menyerupai lembah sungai Gangga di India. Borobudur juga dianggap sama dengan gunung Mahameru, tempat bersemayam, nenek moyang Syailendra. Candi Borobudur melukiskan riwayat nenek moyang raja-raja yang menjadi sempurna, yakni menjadi Budha.

Di samping candi Borobudur di Jawa Tengah yang terkenal ialah Candi Prambanan yang bersifat Hindu. Candi sebagai makam hanya terdapat dalam agama Hindu sedang candi agama Budha dimaksudkan sebagai tempat pemujaan. Kata candi berasal dari salah satu nama untuk Durga sebagai dewi Maut, yaitu Candika. Jadi pembangunan candi sesungguhnya berhubungan dengan Dewi Maut.

Candi Prambanan diperkirakan didirikan dalam masa pemerintahan raja Daksha dalam abad ke-10. Unsur pendidikan yang berhubungan dengan candi Prambanan yaitu dipahatkannya wiracarita Ramayana pada pager langkan candi Syiwa dan diteruskan pada ragam langkan candi Brahma, unsur pendidikan kepahlawanan, kecintaan terhadap tanah air, pelajaran kegtong-royongan, sikap angkara murka harus diberantas.

Dalam masa kekuasaan wangsa Sanjaya dan wangsa Syailendra kedua aliran agama, yaitu Hindu dan Budha, dapat berkembang secara berdampingan, yang berarti bahwa pendidikan kerukunan beragama pada waktu itu telah terpelihara baik. Kumpulan candi Lorjongrang

menunjukkan betapa tinggi tingkat pendidikan kesenian, khususnya seni pahat dan seni sastra pada masa itu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa candi Lorojongrang merupakan hasil seni pahat Hindu-Jawa yang tertinggi di Jawa Tengah. Ketika itu Jawa Tengah menjadi pusat kebudayaan di seluruh pulau Jawa.

Fungsi candi sebagai makam dalam kebudayaan Hindu terutama untuk makam abu jenazah raja atau bangsawan terkemuka.

Meskipun seni bangunan candi mendapat pengaruh dari India, namun tujuan pokok pembangunan candi untuk makam adalah kebiasaan Indonesia asli, yaitu pemujaan arwah nenek moyang. Jelas bahwa sifat-sifat kehinduan hanya lahirnya saja. Dalam candi makam biasanya ditempatkan sebuah arca perwujudan dari almarhum sang raja yang telah dianggap sebagai dewa.

2.3 *Kedatangan Agama Islam*

Sejarah pendidikan dan pengajaran yang bercorak Islam di daerah Jawa Tengah berhubungan erat dengan sejarah penyebaran agama Islam di daerah Jawa Tengah khususnya dan di wilayah Indonesia umumnya. Pendapat para ahli mengenai kedatangan Islam di Indonesia masih berbeda-beda. Sebagian mengatakan bahwa kedatangan Islam di Indonesia yang pertama-tama sudah sejak abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Yang lain mengatakan bahwa kedatangan Islam di Indonesia baru dalam abad ke-13 Masehi, terutama di Samudra-Pasai.

Sebenarnya perlu dipisahkan pengertian antara kedatangan, proses penyebaran dan perkembangan Islam, karena itu abad ke-7 Masehi mungkin dapat dipandang sebagai abad permulaan kedatangan dan hubungan antara pedagang muslim dengan sebagian kecil daerah dan bangsa Indonesia. Kedatangan para pedagang muslim pada waktu itu belum dapat dipastikan apakah di samping itu untuk keperluan berdagang mereka juga melakukan Islamisasi melalui da'wah.

Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa JC. van Leur telah mengemukakan suatu analisa historis tentang rute perdagangan kuna antara India dan Asia Tenggara yang

berkesimpulan, bahwa agama Islam tersebar ke daerah-daerah di Asia Tenggara melalui rute perdagangan. Apabila pembawa agama Islam ke Indonesia pada masa yang permulaan itu adalah golongan pedagang, maka jelas bahwa yang menjadi pendorong utama ialah faktor ekonomi perdagangan, kecuali itu para pedagang yang menjadi pembawa dan penyebar Islam mungkin disertai pula oleh beberapa orang, muballigh yang memang pekerjaannya lebih khusus untuk mengajar agama. Turut sertanya para muballigh atau para guru agama tertentu akan lebih memudahkan proses Islamisasi dan akan lebih memperdalam pengertian yang tercakup oleh agama. Para muballigh atau guru agama dengan mendirikan pesantren yang akan dapat membentuk kader yang kelak menjadi ulama, guru agama pula. Proses Islamisasi melalui saluran perdagangan ini dipercepat oleh situasi politik beberapa pusat kerajaan yang mengalami kekacauan dan perpecahan, sehingga para adipati pesisir yang mengakui kekuasaannya mulai berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan.

Di samping melalui perdagangan proses Islamisasi ini di permudah pula melalui perkawinan. Para saudagar muslim dari negeri asing yang bermukim di daerah pesisir ada yang menjalin perkawinan dengan wanita penduduk pribumi. Perkawinan merupakan salah satu saluran Islamisasi yang paling memudahkan. Saluran perkawinan ini akan lebih mudah lagi apabila terjadi antara seseorang saudagar muslimin atau ulama dengan anak seorang bangsawan atau seorang bupati.

Kecuali melalui perdagangan dan perkawinan, Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, yaitu berupa pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh para guru agama, kyai atau para ulama. Pesantren atau pondok merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam.

Bukti tertua tentang peninggalan Islam di Indonesia berupa batu bersurat pada sebuah makam di Leran (dekat Gresik - Jawa Timur) dalam bahasa dan huruf Arab. Tulisan pada batu nisan itu memuat keterangan tentang meninggalnya seorang wanita yang bernama Fatimah binti Maimun pada 7 Rajab tahun 475 Hijrah (bersesuaian dengan tahun 1082 Masehi).

Dengan diketemukannya peninggalan yang bercorak Islam di Leran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam abad ke-11 Masehi para pedagang Muslim telah berlayar sampai ke Jawa Timur. Namun demikian belum dapat dikatakan bahwa dalam abad ke-11 telah ada pemukiman para saudagar muslim di pantai utara Jawa Timur. Menurut berita Ma-huan, seorang Cina muslim yang mengunjungi Majapahit dalam tahun 1413, permukiman saudagar muslim di Jawa Timur baru dalam abad ke-14. Peninggalan yang bercorak Islam yang lain ditemukan di Gresik ialah makam Syeikh Maulana Malik Ibrahim yang pada batu nisannya tertulis meninggal pada tanggal 12 Rabiul'lawal tahun Hijrah 822 (bersesuaian dengan tanggal 8 April 1419 Masehi).

Penyebaran agama Islam di daerah pantai utara Jawa Tengah terjadi kemudian setelah Jawa Timur, yaitu sekitar pertengahan abad ke-15. Pembentukan kerajaan Islam pertama di Jawa ialah Demak, terjadi setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Keruntuhan Majapahit dalam sumber tradisi ditandai dengan suatu Candrasangkala yang berbunyi: "*Sirna Hilang Kertaning Bumi*", yang diartikan tahun Syaka 1400 atau tahun 1478 Masehi. Berdasarkan sumber tradisi pendiri kerajaan Demak ialah *Raden Patah* yang juga disebut dengan nama *Panembahan Jimbun* atau *Senopati Jimbun* Waktu itu masih usia muda Raden Patah pergi berguru kepada *Sunan Ngampel* di pesantren Ngampel Denta (Jawa Timur). Setelah cukup ilmunya ia diperintahkan oleh Sunan Ngampel supaya membuka tanah baru di hutan Bintoro yang disebut *Glagaliwangi* wilayah kadipaten Jepara.

2.4 Pendidikan dan Pengajaran Islam

Sistem pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu :

2.41 Pendidikan Langgar

Hampir di tiap desa di Jawa terdapat langgar yang dikelola oleh seorang petugas yang disebut *amil*, *modin* atau *lebai* (Sumatra). Petugas tersebut berfungsi ganda, di samping memberikan doa pada waktu ada upacara keluarga atau desa, dapat pula berfungsi sebagai

guru agama. Sistem pelajaran di langgar dimulai dengan mempelajari abjad huruf Arab atau kadang-kadang murid menirukan apa yang dibacakan oleh guru dari kitab Alqur'an.

Pelajaran membaca Alquran ini biasanya diberikan pada pagi hari setelah sembahyang subuh, atau waktu petang setelah sembahyang Magrib. Waktunya sekitar satu sampai dua jam. Biasanya pelajaran membaca Alquran ini dapat diselesaikan dalam waktu kira-kira satu tahun. Uang sekolah tidak dipungut dan bergantung pada kerelaan para orang tua murid.

Kadang-kadang mereka memberikan uang atau bahan makanan. Sesudah murid menyelesaikan pelajaran membaca Alquran biasanya diadakan selamatan dengan mengundang makan teman-temannya atau kerabat dekat di rumah guru atau di langgar. Ada pula suatu kebiasaan bagi anak laki-laki sebelum mereka dikhitan harus telah menyelesaikan pelajaran membaca Alquran atau disebut telah khatam Alquran.

2.4.2 Pendidikan Pesantren.

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia, bercorak kebudayaan Indonesia asli. Pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan pola kyai, santri dan asrama serta mesjid.

Pesantren berasal dari kata santri yang berarti murid atau mungkin berasal dari kata Shastri yang berarti huruf sebab di dalam pesantren inilah mula-mula para santri belajar mengenal dan membaca huruf (Arab). Guru dan terutama pimpinan pesantren mendapat sebutan kyai suatu predikat kehormatan bagi tokoh yang dipandang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama, kepemimpinan dan sifat shalehnya. Dahulu tidak jarang tokoh kyai juga menjadi perintis cikal-bakal pembentukan masyarakat desa baru, sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat lingkungannya. Apalagi jika kemudian terbukti bahwa tokoh kyai itu dipandang sebagai orang keramat (karomah), maka tokoh kyai itu pun menjadi tokoh pemimpin kharismatis.

Sering dibedakan pengertian antara pondok dan pesantren. Pondok ialah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang murid-muridnya bertempat tinggal dalam asrama. Biasanya disebut pula pondok pesantren. Sedang yang disebut pesantren ialah suatu lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok, tetapi para santrinya tidak disediakan pondok/asrama di kompleks pesantren atau sekitar pesantren tersebut dan mereka disebut santri kalong. Sistem pengajarannya diberikan dengan cara *weton* yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu tertentu, misalnya tiap hari Selasa, Jum'at, Minggu dan sebagainya.

Para santri umumnya sudah berusia dewasa atau remaja rata-rata berumur 15--25 tahun, dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri baik karena bantuan orang tua atau telah mempunyai penghasilan sendiri. Adakalanya untuk memenuhi kebutuhan materi bagi pesantren, para santri mencari dana kepada dermawan muslim. Dewasa ini ada beberapa pesantren yang juga menerima bantuan dari pemerintah Republik Indonesia baik berupa uang atau pun benda keperluan pesantren.

Dalam perkembangan selanjutnya para santri yang datang untuk menuntut ilmu tidak terbatas pada lingkungan yang dekat saja. Banyak di antara mereka yang datang dari luar daerah tempat pesantren dengan membawa perbekalan sendiri berupa bahan makanan dan keperluan hidup sehari-hari. Apabila kehadiran para santri dari luar daerah itu tidak tertampung di rumah-rumah penduduk sekitarnya, maka didirikanlah pondok untuk menampungnya. Mungkin kata pondok dari bahasa Arab **funduk** yang artinya rumah penginapan. Pondok dalam pesantren ini lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak menjadi beberapa kamar yang merupakan asrama para santri.

2.4.3 Sistem Pengajaran Pesantren

Berdasarkan keputusan musyawarah Intensifikasi Pengembangan Pondok Pesantren yang diselenggarakan Pada tanggal 2--6 Mei 1978 di Jakarta. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang minimal terdiri atas tiga unsur, yaitu :

- a. Kyai/Syeh/Ustadz yang mendidik dan mengajar.
- b. Santri dengan asramanya.
- c. Mesjid.

Kegiatannya mencakup “Tri Dharma Pondok Pesantren” yaitu :

- a. Keimanan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pengembangan ilmu yang bermanfaat.
- c. Pengabdian terhadap agama, masyarakat dan negara.

Dalam sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki sistem pendidikan dan pengajaran yang non klasika, yang disebut *wetonan*, *bandungan/Sorogan*.

Yang dimaksud dengan *wetonan* yaitu kyai membaca suatu kitab dan para santri membawa kitab yang sama seperti yang dibaca oleh kyai, mereka mendengar dan menyimak. Sistem ini bersifat bebas, para santri boleh datang atau tidak, karena tidak ada daftar hadir (absensi) dan tidak ada kenaikan kelas. Santri yang dapat cepat menamatkan suatu kitab boleh menyambung kitab yang lain. Seolah-olah sistem *wetonan* ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para Santri supaya kreatif dan dinamis. Lama belajar tidak ada ketentuan yang tetap karena siapa yang cepat dan tekun akan lebih cepat pula menamatkan kitab pelajaran yang telah ditetapkan.

Adapun sistem *bandungan/sorogan*, yaitu seorang santri menunjukkan sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca di hadapannya. Jika ada kesalahan waktu membaca langsung dibetulkan oleh kyai. Sistem *bandungan/sorogan* ini hanya dapat dilakukan untuk dua atau tiga orang santri saja, yang biasanya terdiri dari keluarga kyai atau santri yang dianggap pandai.

Di dalam komplek pesantren terdapat tempat tinggal para kyai/guru beserta keluarganya dan mesjid yang dikelolanya. Biasanya sesudah sembahyang subuh para santri melakukan pekerjaan kerumah-tanggaaan untuk kepentingan guru, seperti membersihkan halaman, mengerjakan sawah/ladang, mengisi bak kamar mandi dan sebagainya. Perlu diingat bahwa dahulu guru di pesantren tidak memperoleh imbalan dari para murid secara teratur.

2.4.4 Pendidikan Madrasah

Dapat dianggap sebagai pelopor lembaga pendidikan “Madrasah” adalah Nizam-el-Muluk seorang tokoh pendidikan di Bagdad dalam abad ke-II. Tokoh ini memperkenalkan sistem pendidikan yang semula bersifat teologia Murni (ilmu Ketuhanan) ditambah dengan berbagai ilmu pengetahuan umum. Perkembangan ini mempunyai pengaruh, yang luas dalam sejarah pendidikan di kalangan umat Islam.

Kalau dibandingkan perbedaan antara pendidikan dan pengajaran pada pesantren dan madrasah, pada pesantren hubungan antara guru dan murid masih tampak ciri-ciri khas sistem pendidikan masa Hindu. Pada pesantren guru tidak mendapat imbalan langsung, sedang pada madrasah guru diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk uang tunai secara tetap. Pencaharian untuk dana atau keperluan pesantren adalah mirip dengan cara kaum biarawan Hindu atau Budha, untuk mencari dana bagi keperluan biaranya.

Dalam pesantren pendidikan dan pengajaran agama masih tetap dominan dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sedang pada madrasah dalam perkembangannya kemudian ada yang sejajar dengan pendidikan umum di sekolah dasar atau sekolah menengah. Meskipun ketiga sistem pendidikan Islam tersebut telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan, tetapi ciri-ciri khasnya masih dapat diidentifikasi secara jelas.

2.5 Perkembangan Pendidikan dan Pengajaran Islam Di Jawa Tengah

Peralihan dari agama dan kebudayaan Hindu/Budha kepada agama dan kebudayaan Islam berlangsung secara damai dan tenang. Bahkan dalam beberapa hal telah terjadi perpaduan antara unsur-unsur agama tersebut.

Ketika proses Islamisasi sedang berlangsung di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah, pengaruh ajaran dan cara berfikir Hindu masih kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedalaman. Pada waktu itu telah berkembang sistem pendidikan dengan dua macam jenis guru; yang pertama adalah guru kraton, yaitu mereka hidup di lingkungan kraton atau diundang oleh

kraton untuk mengajar para putra raja dan bangsawan. Guru yang kedua adalah guru pertapa yang sering disebut dengan gelar Bagawan yang mempunyai pertapaan atau padepokan jauh dari tempat keramaian. Guru pertapa terdiri atas kaum Brahmana. Murid-muridnya atau para cantriknya berdatangan kepada para pertapa ini untuk berguru, yang umumnya dari keturunan raja, bangsawan termasuk kasta ksatria.

Pendidikan tipe kedua inilah yang dalam masa penyebaran agama Islam akan tambah dan berkembang dan menjadi sistem pendidikan pesantren dengan tokoh kyai sebagai gurunya karena ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta seperti dalam ajaran Hindu, maka para murid atau santrinya juga terdiri dari rakyat biasa

Para ulama serta guru yang menyebarkan agama Islam di Jawa dan khususnya di daerah Jawa Tengah disebut Wali, terkenal dengan sebutan Wali Sanga yang berarti Wali Sembilan. Mungkin sebutan Wali Sanga merupakan julukan yang mengandung perlambang suatu dewan Wali dengan mengambil angka sembilan yang sebelum pengaruh Islam sudah dipandang angka keramat (lihat Sartono Kartodirdjo dkk; Sejarah Nasional Indonesia III, halaman 118).

Para wali bukan hanya menjalankan dakwah Islam, tetapi juga sebagai dewan penasehat, pendukung raja yang memerintah. Adapun para wali yang bermukim di daerah Jawa Tengah adalah Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Tembayat. Di samping tokoh wali juga ada tokoh ulama terkemuka seperti Kyai Telingsing (Kudus), Kyai Ageng Sela (Purwodadi), Kyai Ageng Pengging (Boyolali) dan sebagainya.

Para Wali, serta guru agama Islam di samping tempat tinggalnya yang merupakan pusat kegiatannya mengajarkan ajaran Islam juga di antara mereka seolah-olah mempunyai "daerah penyebaran" Islam. Cara mengerjakan agama Islam mula-mula mereka mengutamakan akidah/kepercayaan Isami kepada rakyat biasa di pesisir utara Jawa Tengah. Dengan cara yang lambat tetapi sistematis mereka mulai menyebarkan agama atau ajaran Islam dari lingkungan yang sempit yaitu, lingkungan petani, pedagang dan nelayan sekitar tempat tinggalnya.

Cara menyampaikan ajaran Islam yang sangat bijaksana yang mudah menarik orang Islam yang dilakukan oleh para wali, yaitu melalui saluran tradisi dari masa pra-Islam seperti seni bangunan, seni ukir, seni tari, seni musik/gamelan seni sastra dan sebagainya. Pertunjukan rakyat yang berupa pertunjukan wayang telah dipergunakan oleh Sunan Kalijaga untuk sarana menyebarkan ajaran Islam. Menurut ceritera Sunan Kalijaga paling mahir dalam mempertunjukkan permainan wayang kulit di antara para wali. Ceritera wayang yang bersumber dari kitab Mahabarata dan Ramayana sedikit demi sedikit tokoh-tokohnya diganti dengan nama tokoh-tokoh pahlawan Islam.

Beberapa lakon wayang yang konon juga ciptaan Sunan Kalijaga antara lain *Dewa Ruci*, *Petruk Jadi raja*, *Semar Ambarang Jantur*, *Mustokoweni* dan lain-lain. Lakon-lakon tersebut erat hubungannya dengan Jim'at Kalimasada, yang ditafsirkan menjadi Kalimah Syahadat dalam ajaran Islam. Lakon Dewa Ruci merupakan karya sastra yang berisi tentang pelajaran filsafat, yaitu menceritakan Sang Bima yang menemukan hakekat kehidupan dan asal mula kehidupan. Dalam ceritera ini juga digambarkan tentang ketaatan seorang murid terhadap gurunya.

Dalam kegiatannya mengajarkan ajaran Islam para wali juga mengembangkan sistem pendidikan pesantren yang sudah dirintis sejak permulaan penyebaran Islam di Indonesia. Pasang surut perkembangan pesantren sejalan dengan pasang surut perkembangan politik di Indonesia. Kedatangan pengaruh bangsa Portugis, Inggris dan Belanda di Indonesia juga mempengaruhi kelancaran perkembangan perkembangan pesantren.

Dalam masa (kedatangan pedagang Portugis di Jawa Tengah, karena mereka tidak berhasil menanamkan monopoli perdagangannya di daerah Jawa Tengah, maka kegiatan pesantren dapat dikatakan tidak mengalami gangguan. Meskipun demikian tidak kita ketahui perkembangan pesantren waktu itu secara pasti.

VOC telah berhasil menanamkan monopolinya di daerah Jawa Tengah ketika kerajaan Mataram makin lemah setelah Sultan Agung wafat. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Agung menarik perhatian pula dalam bidang kebudayaan. Sultan Agung berusaha

mempertemukan unsur kebudayaan Indonesia asli, unsur Hindu dan unsur Islam. Tahun Hijrah dipersatukan dengan tahun Syaka dan merupakan perhitungan Tahun Jawa. Perhitungan tahun Jawa dimulai tahun 1633. Dalam bidang hukum Sultan Agung juga memadukan hukum adat di Indonesia dengan hukum Islam yang dituangkan dalam kitab Undang-undang berbahasa Jawa yang disebut Surya Alam.

Pengganti Sultan Agung Sultan Amangkurat I, merupakan masa kemunduran Mataram dan masa permulaan perluasan pengaruh VOC di Jawa Tengah. Amangkurat I yang lebih terkenal juga dengan sebutan Sunan Tegal Arum bersikap keras terhadap bangsawan dan ulama, sehingga berselisih dengan putranya sendiri yang bernama Adipati Anom yang tersebut kemudian mencari perlindungan kepada seorang ulama ialah Pangeran Kajoran. Amangkurat I mencari perlindungan kepada VOC dan VOC mendapat ijin berdagang di Mataram sejak tahun 1646. Dalam tahun 1677, VOC telah mendapat ijin dari Mataram untuk mendirikan kantor dagangnya dan galangan kapal di Juana dan Rembang. Berdasarkan atas perjanjian 31 Oktober 1707 VOC memindahkan pusat kekuasaannya dari benteng Jepara ke benteng Semarang (1708).

Meskipun perkembangan pendidikan Islam masa pengaruh VOC di Jawa Tengah tidak dapat diketahui dengan pasti, namun beberapa tokoh ulama yang juga berfungsi sebagai guru ikut aktif membantu perlawanan terhadap VOC.

Sebagian besar pondok pesantren berlokasi di daerah pedesaan antara lain karena sikap non-koperasi mereka terhadap penjajah. Hal itu memaksa mereka menyelenggarakan kegiatannya di desa yang jauh dari kota pusat kegiatan kaum penjajah. Dalam masa kegiatan VOC dan masa kolonial Belanda pondok pesantren kurang mendapat perhatian.

Baru sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia peranan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian. Berdasarkan catatan tahun 1978 pondok pesantren di seluruh Indonesia berjumlah 39.499 buah dengan jumlah murid/santri sebanyak kurang lebih satu juta orang. Di daerah Jawa Tengah jumlah pondok pesantren tahun 1978 ada 594 buah dan jumlah murid/santri sebanyak 72.067 orang.

BAB III

PENDIDIKAN BARAT SAMPAI DENGAN ABAD KE-19

3.1 Latar Belakang Keadaan Masyarakat Jawa Tengah Sampai dengan Abad ke-19

Salah satu akibat politik ekspansi Sultan Agung ke daerah pantai utara Jawa mengalami akibat fatal. Kota-kota dagang, di pesisir utara dihancurkan oleh tentara Sultan Agung, karena kota-kota dagang tersebut dinilai sebagai sumber kekuatan perlawanan rakyat pesisir terhadap kerajaan Mataram. Jiwa pelaut Jawa boleh dikatakan mati. Hal ini disusul dengan hancurnya klas menengah atau klas pedagang Jawa sehingga masyarakat Jawa mengarah ke masyarakat agraris dan masyarakat feodal. Susunan masyarakat terdiri dari golongan petani, golongan bangsawan, golongan petani ini merupakan golongan yang paling banyak di Jawa Tengah. Selain itu petani merupakan golongan yang terus-menerus melanda daerah Jawa Tengah. Sejak jaman kerajaan Demak, Pajang, Mataram hingga Perang Diponegoro, disusul jaman tanam-paksa van den Bosch diteruskan politik eksploitasi penjajahan Belanda.

Karena matinya klas pedagang maka mekanisme perekonomian menjadi sebagai berikut: Rakyat sebagai petani wajib menyerahkan hasil-bumi mereka kepada kepala desa yang telah bertindak sebagai raja kecil di pedesaan. Selanjutnya raja kecil itu menyerahkan hasil

bumi kepada bupati atau petugas yang bertindak atas nama raja. Adapun dasar hukumnya, rakyat tidak memiliki tanah sebab tanah adalah milik raja. Setelah raja takluk kepada Belanda, Belanda merasa bahwa tanah itu milik Belanda. Rakyat hanya mempunyai hak nggaduh (mengolah, meminjam).

VOC dalam melaksanakan pemerintahannya di Jawa Tengah menggunakan sistem pemerintahan tidak langsung. Raja dan bangsawan menjadi perpanjangan pemerintah Belanda untuk mengurus kekayaan rakyat. Jadi rakyat jelata menjadi obyek penindasan dari kepala desa, bupati, raja dan akhirnya pemerintah Belanda. Penderitaan rakyat diperhebat lagi dengan sering terjadinya banjir, wabah penyakit, seperti penyakit pes, kolera dan sebagainya.

Pemerintah bersifat otokratis, feodalistis dan tidak mengenal perwakilan rakyat yang demokratis. Keadaan juga tidak banyak berubah ketika VOC jatuh dan Indonesia diperintah oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad ke-19. Bahkan Tanam Paksa makin menambah kesengsaraan rakyat

Timbulnya penanaman modal asing sebagai akibat Undang-undang Agraris tahun 1870, tidak membebaskan rakyat dari penderitaan. Namun demikian Undang-undang Agraria itu menyebabkan adanya jalan kereta api di Jawa Tengah, irigasi, pabrik tebu, perkebunan dan sebagainya. Ada perubahan sosial di kalangan orang Jawa, yaitu beberapa petani menjadi buruh pabrik atau buruh perkebunan, walaupun dengan upah sedikit. Kaum pemilik perkebunan atau pabrik kecuali membutuhkan buruh kasar, juga membutuhkan buruh yang terdidik, yang dapat membaca, menulis, berhitung dan sebagainya. Ini hanya dapat diperoleh melalui sekolah. Oleh karena itu sekolah pada waktu itu yang penting mencetak calon buruh halus atau pegawai.

Pada abad ke-19, masyarakat Jawa Tengah sebagai rakyat jajahan Belanda baru sedikit yang mendapat pengajaran di sekolah. Dari penduduk Jawa yang jumlahnya 28,5 juta hanya 24 ribu orang yang mendapat pengajaran di sekolah.

Revolusi Prancis berpengaruh juga di Indonesia umumnya dan di Jawa khususnya. Daendels yang diangkat sebagai gubernur jenderal

membawa semangat revolusi itu ke pulau Jawa. Ia menaruh perhatian pada pengajaran bagi rakyat. Ini dapat dibuktikan dengan berbagai peristiwa sebagai berikut :

1. Pada tahun 1808 ia memerintahkan kepada para bupati di Jawa agar pengajaran tersebar di kalangan rakyat dan tiap distrik mempunyai sekolah.
2. Tahun 1809 untuk pertama kali diselenggarakan pendidikan bidan, sebagai usaha pemeliharaan kesehatan rakyat. Apa yang dilakukan oleh Daendels dalam bidang pendidikan itu sesuai dengan cita-cita Revolusi Perancis, yaitu rakyat jelata supaya diberi hak-hak sama dalam lapangan pendidikan dan pengajaran.

Namun pada jaman Pemerintahan Raffles, sekolah yang didirikan pada jaman pemerintahan Daendels itu mati karena Raffles sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap pendidikan. Kalau Daendels hanya memperhatikan penyebaran sekolah kurang minat terhadap ilmu pengetahuan, sebaliknya Raffles membiarkan pengajaran rakyat, dan ilmu pengetahuan mendapat perhatian penuh. Bangunan-bangunan Hindu mendapat perhatian, seperti ternyata dalam bukunya "*History of Java*"

Waktu Belanda memerintah kembali, Komisaris Jendral mengeluarkan peraturan umum tentang sekolah, tetapi hanya sekolah untuk anak Belanda. Pada jaman Tanam Paksa, Van den Bosch memberi kesempatan sedikit untuk anak Jawa menikmati pendidikan di sekolah, karena Tanam Paksa yang baru dijalankan membutuhkan pegawai yang terdidik. Tetapi rencana untuk membuka sekolah yang lebih banyak mengalami kegagalan karena kekurangan uang. Akhirnya ditempuh sistem magang walaupun yang diterima dibatasi pada anak bangsawan. Ditentukan anak bangsawan karena dalam sistem pemerintahan tidak langsung, bangsawan merupakan partner Belanda untuk mengurus kekayaan tanah air kita. Para magang itu bertempat tinggal di rumah orang Belanda, sambil menjadi pesuruh Belanda, mereka belajar bahasa Belanda, menulis, membaca, berhitung, sesudah itu mereka dipekerjakan di bagian administrasi. Van den Bosch terpaksa menempuh cara demikian karena ia menyadari bahwa untuk memperbaiki sistem pembangunan ekonomi (bagi Belanda) dibutuhkan tenaga ahli yang banyak.

Keadaan ini pada tahun 1848 mengamami perubahan. Ini disebabkan karena Gubernur Jendral oleh pemerintah pusat di Negeri Belanda, diberi kuasa menggunakan uang dan anggaran belanja negara setiap tahun sebanyak f 25.000 untuk mendirikan sekolah di Jawa. Karenanya antara tahun 1849--1852 di tiap ibukota karesidenan didirikan 20 buah sekolah. Ketika itu sudah ada 30 buah sekolah untuk anak Belanda. Ditinjau dari angka-angka itu jelaslah bahwa pemerintah Belanda lebih mengutamakan atau mendahulukan pendirian sekolah untuk anak orang Belanda.

Dua puluh buah sekolah untuk anak pribumi itu didirikan di tempat kediaman residen. Sekolah yang mula-mula didirikan hanya di pulau Jawa, karena Tanam Paksa berkembang di daerah ini.

Pelajaran diberikan dalam bahasa daerah. Perlu juga dikemukakan di sini bahwa yang memasuki sekolah itu masih tetap terbatas pada anak bangsawan saja. Bagi anak petani atau rakyat jelata, belum diberi kesempatan menikmati belajar di sekolah.

Dari uraian di muka jelaslah bahwa :

1. Penyebaran pengajaran bagi rakyat jelata selalu ditunda-tunda. Utaha perluasan sekolah bagi anak bumiputra selalu mendapat tantangan. Rupa-rupanya pemerintah kolonial Belanda khawatir kalau-kalau perluasan sekolah yang terlalu cepat bagi rakyat bumiputra, merupakan bahaya besar bagi kedudukan kaum penjajah. Jelas ini bertentangan dengan cita-cita Revolusi Perancis, yang menghendaki persamaan hak bagi setiap orang untuk menerima pendidikan di sekolah.
2. Tujuan pendirian sekolah bukan untuk mendidik rakyat, bukan untuk mempertinggi derajat hidup rakyat, tetapi untuk memenuhi kepentingan kaum penjahannya itu mengisi kekurangan pegawai yang murah.

Sudah barang tentu untuk menyelenggarakan sekolah itu tak lepas dari berbagai kesulitan, misalnya kesulitan tentang bahasa pengantar di sekolah bumiputra, kekurangan tenaga guru dan sebagainya. Untuk mengatasi kesulitan itu dipergunakan bahasa pengantar bahasa daerah sedang bahasa Melayu diberikan sebagai

mata pelajaran. Untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, maka pada tahun 1852 untuk pertama kali di Jawa Tengah didirikan Kweekschool (Sekolah guru) di Surakarta. Di sekolah ini pun muridnya terbatas pada anak golongan bangsawan. Kelak menyusul didirikan Kweekschool di kota-kota lain.

Sekitar tahun 1863 dan 1864 pemerintah kolonial Belanda mulai menjalankan politik pengajaran liberal, sebagai akibat kemenangan kaum liberal di negeri Belanda. Sekolah bukan ditujukan untuk mendidik calon pegawai saja, tetapi juga untuk mendidik rakyat dalam arti yang umum. Akibatnya pengajaran bagi bumiputra tidak terikat lagi oleh anggaran belanja f 25.000, seperti ditetapkan oleh putusan pemerintah pada tahun 1848. Anak pribumi ada kesempatan memasuki sekolah Belanda. Tetapi kenyataannya, untuk dapat masuk ke sekolah Belanda harus memenuhi persyaratan tertentu yang berdasarkan asal keturunan dan penghasilan yang cukup. Praktis anak petani atau rakyat jelata sulit untuk dapat diterima di sekolah Belanda.

Antara politik pengajaran dengan perkembangan masyarakat ada hubungan erat. Sesudah tahun 1870, yaitu sesudah ada Undang-undang Agraria dari De Waal, para pengusaha partikutir diberi kebebasan untuk menanamkan modalnya di Jawa. Timbul banyak pabrik dan perkebunan, misalnya pabrik gula, perkebunan tebu dan sebagainya. Usaha perekonomian makin maju. Kebutuhan pegawai yang terdidik meningkat. Karenanya usaha mencetak calon pegawai meningkat pula. Hal ini akan terpenuhi jika kegiatan mendirikan sekolah diperhebat. Pelaksanaannya ialah memperbesar jumlah dan jenis sekolah yang sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu.

Pada tahun 1893 di kalangan pemerintah timbul perhatian pada pendidikan di sekolah untuk rakyat jelata. Jadi mereka menyadari bahwa yang harus mendapat pengajaran itu bukan lapisan atas saja. Namun demikian dalam prakteknya pemerintah dalam hal melaksanakan politik pengajaran masih bersifat diskriminasi. Terbukti ada perbedaan perlakuan yang menyolok antara golongan lapisan atas dengan bawah mengenai pengajaran. Untuk lapisan atas membutuhkan pengajaran yang dapat membawanya ke arah kemajuan dan dapat

memenuhi persyaratan kepegawaian. Sedangkan untuk lapisan bawah yaitu masyarakat petani, buruh, rakyat jelata sudah cukup disediakan sekolah rendah yang sederhana yang hanya memberi pengetahuan pokok seperti : berhitung, membaca, menulis. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pemerintah Belanda menganggap bahwa rakyat jelata tidak perlu mendapat bimbingan untuk mencapai kemajuan

Sementara itu kebudayaan Barat makin meresap peengaruhnya ke masyarakat pedesaan, karena ada kontak langsung antara orang Barat dengan masyarakat desa. Hal ini terasa sekali sejak adanya Tanam Paksa dan pelaksanaan Undang-undang Agraris 1870. Beberapa akibatnya ialah ikatan tradisional dan ikatan desa makin meretak. Timbullah kesadaran di kalangan masyarakat bumiputra pada sistem - feodal dan ikatan tradisi menghambat kemajuan dan membatasi ruang geraknya. Semangat baru untuk mengejar keterbelakangan di kalangan pemuda Jawa mendorong mereka untuk lebih giat menuntut ilmu. Mereka mempelajari beberapa ilmu pengetahuan, bahkan mereka memakai pakaian model Barat.

Tibalah saatnya masa emansipasi, seperti yang dipelopori oleh R.A. Kartini. Ia dan beberapa bupati yang berpikiran maju menyarankan dan memperjuangkan agar kaum muda Jawa mengejar kemajuan, kalau perlu membuang adat-istiadat yang menghambat kemajuan. Seperti telah kita ketahui dari sejarah, R.A. Kartini bersikap anti adat pingitan bagi gadis remaja.

Kaum bangsawan yang sudah berpikiran maju memasukkan anaknya ke sekolah Belanda, tetapi ada juga yang sengaja mendatangkan guru Belanda untuk mengajar putra-putrinya. Ini dilaksanakan antara lain oleh Bupati Demak R.A. Condronegoro (1864). Beberapa sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda antara lain Kweekschool di Surakarta (1875), Hogere Burger School atau HBS di Semarang (1877).

Penyelenggaraan sekolah tidak dilaksanakan oleh pemerintah saja, tetapi juga dilaksanakan oleh swasta misalnya oleh golongan Protestan, Katolik, Islam dan golongan rakyat jelata. Hanya ada perbedaan tentang sistem yang digunakan oleh masing-masing golongan itu dalam hal menyelenggarakan pendidikan. Pada umumnya

golongan Protestan dan Katolik menggunakan sistem pendidikan Barat, yang bedanya dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah, murid-murid yang diterima tidak berdasarkan asal keturunan. Pendidikan yang dilaksanakan oleh golongan Islam masih banyak yang menggunakan sistem yang tradisional sistem pendidikan yaitu di langgar (surau) dan di pondok pesantren. Kelak dalam perkembangannya, golongan Islam menggunakan sistem yang mirip dengan sistem sekolah Barat, yaitu sistem pendidikan madrasah. Golongan rakyat jelata yang ingin menimba ilmu, dan yang tidak tertampung di sekolah pemerintah swasta maupun pesantren, datang ke tempat guru di peguron untuk menimba ilmu.

Kenyataannya sekolah yang didirikan oleh swasta maupun oleh pemerintah tersebut belum cukup menampung hasrat rakyat yang ingin menuntut itu di sekolah tersebut. Hanya golongan bangsawan yang jumlahnya sedikit (2% dari seluruh penduduk Jawa) yang sebagian besar menikmatinya. Mereka terdiri dari keluarga raja, golongan priyayi, pegawai pangreh praja pribumi yang pada abad ke-19 kekuasaannya dikurangi oleh pemerintah Belanda.

Pengaruh Belanda yang sudah mulai meresap di pedesaan mempengaruhi pula cara berpikir rakyat, terutama golongan mudanya. Mereka menyadari bahwa salah satu kunci kemajuan ialah dengan belajar di sekolah. Kecuali itu sekolah dapat digunakan sebagai alat untuk menerobos penghalang masuk ke tingkat status sosial yang lebih tinggi. Dengan demikian sekolah dapat meningkatkan derajat hidupnya. Namun ruang gerak untuk memasuki sekolah masih sangat sempit. Jelaslah bahwa penyelenggaraan sekolah pada waktu itu, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta, belum dapat menampung peningkatan hasrat rakyat yang ingin maju.

Untuk dapat memberi gambaran yang jelas, hingga pada akhir abad ke-19 tahun 1898) penduduk Jawa yang berjumlah 30 juta, hanya 60.000 anak mendapat pengajaran. Jadi hanya 2% dari jumlah penduduk. Di antara 60.000 anak itu sebagian besar anak kaum bangsawan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah pertengahan abad ke-19 pendidikan Barat telah ditanamkan dan dikembangkan di

Jawa Tengah, meskipun masih terbatas pada golongan bangsawan. Rakyat jelata masih terbelakang, akibat sulitnya untuk bersekolah.

3.2 Pendidikan Yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda Sampai Dengan Abad ke-19

Pendidikan Barat di Jawa Tengah sangat lambat datangnya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia seperti daerah *Zending* di Tapanuli Utara, Minahasa, Maluku Selatan atau daerah Misi Katolik di Flores serta daerah-daerah Belanda di Jakarta

Kedatangan Portugis di Indonesia tidak mempengaruhi bidang apa pun di Jawa Tengah, sebab pedagang Portugis hanya mendirikan benteng di Jepara pada abad ke-16, untuk mengurus perdagangan saja dan untuk waktu yang begitu lama. Juga pemerintah VOC sejak pertengahan abad ke-17 tidak mempengaruhi bidang ekonomi sosial dan budaya. Orang-orang Belanda masih menganggap Jawa Tengah sebagai tempat tinggal sementara, hingga belum merupakan permukiman tetap sampai akhir abad ke-18. Oleh sebab itu tidak ada sekolah mereka didirikan. Barulah pada awal abad ke-19, ketika Belanda banyak dipengaruhi aliran *Aufklarung* dan revolusi Perancis perhatian kepada masyarakat banyak, juga di bidang pendidikan mulai diperhatikan. Sementara itu penduduk Belanda lebih banyak yang menetap.

3.2.1 Sekolah-sekolah Sistem Barat yang Pertama (1808--1830)

3.2.1.1 Europeesche Lagere School (ELS)

Untuk kepentingan pegawai belanda di Indonesia dibuka beberapa sekolah dasar sistem Barat, yaitu ELS (*Europees School*), yang mempunyai tujuh kelas dengan pengantar Bahasa Belanda. Sekolah tersebut telah dibuka pada tahun 1820, di Semarang. Kemudian menyusul di beberapa tempat konsentrasi penduduk Eropa, misalnya Jakarta dan Surabaya. Juga kota-kota sekitar pabrik tebu: Cirebon, Tegal, Pekalongan, Pasuruan, sekitar perkebunan besar : Bandung dan sebagainya.

Pemerintah sangat memperhatikan ELS untuk menarik orang-orang di Negeri Belanda agar mau bekerja di Indonesia, dengan menjamin anak-anak mereka dapat bersekolah. Sistem dan mutu ELS diusahakan sama dengan Negeri, Belanda, agar anak-anak yang kembali ke negerinya dapat melanjutkan sekolah. Guru-guru didatangkan dari negeri Belanda. ELS hanya diperuntukkan anak-anak Belanda dan Indo. Anak asli Indonesia hanya putra-putra raja. Namun sampai perempat ke tiga abad ke-19 anak Jawa yang masuk ELS masih sangat langka.

3.2.1.2 Sekolah Pelayaran

Tahun 1808 didirikan sebuah Pelayaran (Marine School) di Semarang. Tujuannya ialah memberikan pelajaran pelayaran dan keangkatan-lautan kepada anak Belanda yang tinggal di Jawa. Juga dalam rangka pertahanan laut. Para pengajar adalah para perwira angkatan laut. Tetapi sekolah ini kemudian ditutup tahun 1812, mungkin karena pembiayaannya yang terlalu besar.

3.2.1.3 Lembaga Studi Kebudayaan Jawa

Atas prakarsa Gubernur Jendral Jansens pada tahun 1813 didirikan Lembaga Study Kebudayaan Jawa di Kraton Surakarta. Lembaga ini bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai bahasa, adat istiadat Jawa kepada para calon pegawai Belanda yang akan bekerja di daerah Vorstenlanden. Hal ini sangat penting agar dalam melaksanakan pemerintahan kelak mereka memahami watak dan masyarakat Jawa, agar dapat memerintah dengan berhasil. Lembaga ini kemudian dikembangkan pada tahun 1832 oleh Gubernur Jendral van den Bosch. Untuk mendidik pegawai Belanda yang akan memimpin proyek Tanam Paksa. Tetapi pada tahun 1843 ditutup karena sebab yang tidak jelas.

3.2.2 *Sekolah-sekolah Gubernemen pada Jaman Cultuur Stelsel (1830--1870).*

3.2.2.1 Kweekschool

Pada jaman Cultuurstelsel mulai dirasakan perlunya pendidikan untuk rakyat banyak. Pelaksanaan Cultuurstelsel melibatkan banyak sekali daerah pedesaan dan penduduk di seluruh Jawa. Diperlukan sistem administrasi keuangan dan hasil bumi. Pencatatan yang rumit dan akurat, pengelolaan dan pengawasan yang teratur dan berkesinambungan. Perangkat pegawai pangreh praja dari residen dan sampai lurah harus faham segala peraturan dan menyiapkan laporan berkala. Sedang banyak pegawai dan penduduk tidak faham membaca menulis dan berhitung Latin. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan akan perlunya dibuka sekolah rendah untuk penduduk asli pada tahun 1836.

Pelaksanaannya baru dimulai tahun 1852 dengan pertamanya mendirikan sekolah guru, yaitu Kweekschool di Surakarta (1852). Kemudian menyusul di tempat-tempat lain seperti Bukit Tinggi (1856), Tanah Batu Tapanuli (1894), Banjarmasin (1875), Makasar (1876), Bandung (1866), Tondano (1873), Padang Sidempuan (1879), dan Probolinggo (1875). Guru-guru lulusan sekolah inilah yang akan mengasuh sekolah-sekolah dasar sistem untuk anak Indonesia.

3.2.2.2 Sekolah Dasar Kelas I dan Sekolah Dasar Kelas II

Dengan lulusnya guru-guru tamatan Kweekschool, maka dapatlah dibuka beberapa sekolah dasar untuk anak Indonesia. Sering juga digunakan istilah sekolah sistem Timur. Karena bahasa pengantar yang digunakan bahasa daerah. Kurikulum tidak seluruhnya sama dengan sekolah dasar sistem Barat (ELS).

Masyarakat kolonial yang dualistis diterapkan pula dalam pendidikan sekolah dasar untuk anak Indonesia digolongkan menjadi dua jenis yaitu sekolah dasar kelas I (*Lagere School der Eerste Klasse*), yang diperuntukkan anak bangsawan dan

priyayi tinggi dan Sekolah Dasar klas II (Lagere School der Tweede Klasse), untuk anak pegawai rendah. SD klas I mempunyai lima tingkat, sedang SD klas II hanya sampai tiga tingkat. Sekolah-sekolah tersebut didirikan pada pertengahan abad ke-19 dalam jumlah yang sangat terbatas. Tamatan sekolah ini tidak dapat melanjutkan ke mana-mana, karena memang belum diciptakan sekolah lanjutan bagi mereka.

3.2.2.3 Sekolah Raja (Hoofden School)

Selain membutuhkan pendidikan dasar umum untuk melayani kebutuhan administrasi pemerintah kolonial, Pemerintah merasa perlu pula membuka sekolah elite untuk mendidik penguasa pribumi tertinggi yang akan diangkat di daerah-daerah. Mereka perlu dididik khusus agar sesuai dengan pihak pemerintah kolonial. Mereka juga harus mulai melaksanakan pemerintahan modern yang bersifat legal rasional untuk menggantikan pemerintahan tradisional yang feodalistis untuk itu, kembali dipilih Jawa Tengah sebagai tempat pendidikan anak-anak Raja (Hoofden School) yaitu di Magelang tahun 1878. Sekolah ini kemudian menjadi OSVIA (Opleiding School Voor Indische Ambtenaren), yaitu sekolah Pangreh Praja. Kemudian diganti lagi namanya menjadi MOSVIA (Midaelbaar Opleidingschool Voor Indische Ambtenaren). Sekolah semacam ini kemudian juga didirikan di tempat-tempat lain seperti di Bukittinggi dan di Bandung. Murid diperluas dengan anak-anak pejabat tinggi pribumi yang akan menduduki jabatan dalam pemerintahan.

3.2.3 *Sekolah-sekolah Gubernemen Jaman Pemerintahan Liberal (1870--1900)*

3.2.3.1 Sekolah BBS

Pada masa ini tidak ada suatu perubahan politik yang penting mengenai sekolah Gubernemen. Meskipun kaum Liberal menginginkan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah untuk meningkatkan pendidikan anak Indonesia, namun

karena alasan keuangan tidak banyak sekolah yang ditambah, yaitu HBS (Hogere Burger School) didirikan di tiga kota besar di Jawa, dapat melanjutkan sekolah di negerinya bila ia kembali dari Indonesia. Sekolah HBS mempunyai program lima tahun dan merupakan sekolah yang paling tinggi mutunya. Orang Indonesia dan Cina hampir tidak diberi kesempatan masuk. Dalam tahun-tahun terakhir hanya seorang dua saja anak Jawa atau Cina duduk di setiap kelas yang berjumlah sekitar 20 orang setiap tahunnya. Mereka adalah putra-putra bupati, pejabat tinggi atau bangsawan tinggi dari Kraton. Dengan pembatasan yang ketat ini ingin dijaga keunggulan golongan Eropa terhadap golongan pribumi.

3.2.3.2 Sekolah-sekolah Kejuruan

Selain sekolah umum pemerintah kolonial mendirikan beberapa sekolah kejuruan, yang jumlahnya sangat sedikit, Misalnya di Semarang didirikan sekolah menengah untuk wanita pada tahun 1883, yaitu Koningin Wihelmina School (KWS). Sebenarnya ini merupakan ide lanjutan dari sekolah untuk wanita yang didirikan di Jakarta tahun 1824 sampai 1832. Maksud sekolah tersebut adalah untuk menarik orang Belanda agar mau bekerja di Indonesia dengan membawa keluarganya, dengan menyediakan pendidikan khusus bagi anak perempuan yang telah tamat ELS. Akhirnya sekolah terpaksa ditutup, mungkin karena biaya mahal serta peninat kurang. Setelah tahun 1880 masyarakat Belanda di Semarang makin berkembang, dirasakan kebutuhan sekolah ketrampilan wanita tingkat menengah hingga KWS dapat didirikan. Tahun 1892 di Semarang dibuka sekolah Pertukangan Kayu, dan sebelumnya Sekolah Pertukangan juga terdapat di Gombong.

Tabel 1. Jumlah sekolah-sekolah negeri dan Swasta tahun 1897 di seluruh Jawa dan Madura.

Daerah.		Sekolah Negeri	Sekolah Swasta				Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Sekolah Seluruh Sekolah
			Berasas Agama		Tidak berasas Agama			
			Dengan Subsidi	Tanpa Subsidi	Dengan Subsidi	Tanpa Subsidi		
1.	Jakarta	8	1	4	-	13	18	26
2.	Jawa Barat	48	2	3	1	-	6	54
3.	Jawa Tengah	78	2	7	44	28	81	159
4.	Yogyakarta	1	-	-	-	10	10	11
5.	Jawa Timur	70	19	6	51	23	99	169
Jumlah seluruh Jawa dan Madura		205	23	20	95	74	214	419

Sumber : *Alg. Verslag. V. h. Inlandsch Onderwijs in Ned. Indie 1893--1897* (disederhanakan)

3.3 Pendidikan Swasta Yang Diselenggarakan Orang Barat Sampai Dengan Abad ke-19

3.3.1 Pendidikan Swasta Kristen

Pendidikan Kristen di Indonesia sampai dengan abad ke-19 diselenggarakan oleh berbagai kelompok Pekabaran Injil (*Zending*) dari negeri Belanda dan negeri-negeri Eropa lainnya. Bangsa Belanda yang umumnya beragama Protestan lebih cenderung untuk membantu *Zending* dalam mengembangkan agama Kristen dan pendidikan Kristen dari pada membantu misionaris Katolik. Sampai abad ke-19 prioritas mendirikan sekolah Swasta diberikan kepada *Zending*. Tetapi kira-kira sampai tahun 1850 Pemerintah masih membatasi gerakan *Zending* di daerah-daerah untuk menghindari keresahan penduduk yang niungkin timbul dengan masuknya *Zending* tersebut.

Setelah tahun 1850 bersamaan dengan perkembangan liberalisme di Eropa, maka semangat misioner untuk “membudayakan” negeri-negeri terbelakang berkembang pula di kalangan Zending, yang mengirimkan utusan penginjil ke Indonesia. Di pihak lain pemerintah kolonial dalam mengembangkan pendidikan untuk rakyat Indonesia yang demikian banyaknya, dapat bekerja sama dengan para Zending. Dengan demikian pembiayaan dapat lebih ringan. Namun realisasi pendirian sekolah-sekolah Kristen di Jawa Tengah baru awal abad ke-20. Kelompok Zending yang bekerja di Jawa Tengah bagian selatan ialah Gereformeerde Zending Vereeniging yang didirikan tahun 1859. Menurut tabel 1 yang memuat Jumlah sekolah di Jawa Tengah pada akhir abad ke-19 maka sekolah swasta yang berdasarkan agama hanya sembilan buah, delapan di antaranya adalah sekolah Katolik. Jadi sekolah Kristen hanya satu buah (Sekolah Islam yaitu Madrasah dan pesantren tidak dimasukkan oleh pemerintah Belanda).

3.3.2 Pendidikan Swasta Katolik

Seperti telah kita ketahui dari sejarah, bahwa pada abad ke-16 tanah air kita kedatangan orang Portugis yang berasal dari semenanjung Iberia (Eropa). Adapun motifnya bermacam-macam. Ada di antara mereka rela meninggalkan tanah airnya karena terdorong untuk mencari kekayaan duniawi, petualangan, demi kejayaan negaranya. Untuk mencapai tujuannya, kadang-kadang mereka berbuat kejam dan tamak terhadap penduduk pribumi. Ini terbukti adanya perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka, karena mereka hendak melakukan monopoli dagang serta hendak menjajah daerah produsen rempah-rempah di Maluku. Namun demikian tidak semua orang Portugis berbuat demikian. Ada di antara mereka, yaitu golongan pendeta Katolik datang ke tanah air kita untuk menyebarkan agama Katolik dengan dasar cinta kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia.

Sebagai pelopor penyebar agama Katolik di tanah air kita yaitu pendeta Katolik (Pastor) Fransiscues Xaverius. Untuk mewujudkan kecintaannya terhadap Tuhan dan sesama manusia, ia dengan teman-temannya giat mengajar agama dan melaksanakan karya sosial serta memajukan pendidikan sistem Barat kepada penduduk pribumi.

Sekolah Katolik didirikan. Namun demikian, usaha mendirikan sekolah ini baru terbatas di Maluku. Di Jawa Tengah baru abad ke-19 ada sekolah Katolik. Jadi dapat dikatakan bahwa golongan pendeta Katoliklah yang pertama kali memperkenalkan sistem pendidikan Barat di Indonesia. Sebelumnya di tanah air kita sudah ada lembaga pendidikan dengan sistem padepokan dan sistem pondok pesantren.

Pada jaman VOC pendidikan Katolik di Indonesia mengalami kemunduran, karena sikap VOC tidak toleran terhadap agama Katolik di Indonesia. Penduduk pulau-pulau yang telah beragama Katolik, atas perintah VOC (Kompeni) dimasukkan ke dalam golongan Protestan.

Pada tahun 1799 VOC gulung tikar. Pemerintah Belanda menerima warisan VOC baik hutangnya maupun daerah kepulauan Indonesia yang dahulu dikuasainya. Dengan kata lain kepulauan Indonesia dijajah oleh negeri Belanda.

Oleh karena pemerintah Belanda beraliran liberal, maka pada permulaan abad ke-19 misi Katolik diperbolehkan melakukan kegiatan di Indonesia dengan syarat asal akan berkarya. Pasturnya berkebangsaan Belanda.

Itulah sebabnya pembawa utama agama Katolik di pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah adalah golongan pendeta Katolik berkebangsaan Belanda.

Pada abad ke-19 misi Katolik di Jawa Tengah dalam rangka menyebarkan agama serta memajukan derajat rakyat pribumi, mendirikan sekolah Katolik dengan menggunakan sistem pendidikan Barat.

Kecuali itu sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan sebagai tempat penggemblengan putra-putra pribumi yang disiapkan untuk menjadi elite Jawa, misalnya guru, imam, dokter, pamongpraja dan sebagainya. Menurut memorandum pastur Van Lith, elite Jawa itu kelak diharapkan menjadi pelopor penyebar agama Katolik di Pulau Jawa, karena pada waktu itu jumlah pastur di Jawa sangat sedikit sehingga tidak mencukupi untuk bekerja di seluruh Jawa. Karenanya murid-murid sekolah Katolik tersebut tidak hanya memperoleh pelajaran-agama tetapi juga pengetahuan umum dan pengetahuan ketrampilan.

Mula-mula sekolah Katolik di Jawa berbahasa pengantar bahasa Belanda. Tetapi atas usaha pastur W. Hellings, didirikanlah sekolah berbahasa pengantar bahasa Jawa. Misalnya sekitar tahun 1892 dan 1893 ia mendirikan sekolah di Muntilan, Mungkid, Tempuran, dan di desa Salam. Prakarsa Pastur W.Hellings tersebut digaris bawahi oleh pastur Van Lith, yang pada tahun 1897 menetap di Muntilan. Kemudian didirikanlah sekolah dasar di Muntilan, Mranggen, Borobudur. Sedangkan Suster-suster Fransiskan, pada tahun 1899 mendirikan Kweekschool dan sekolah dasar di Mendut (dekat Borobudur).

Pada tahun 1894--1895, orang Jawa yang memeluk agama Katolik ada 340 orang. Tempat-tempat penyebaran agama Katolik pada waktu itu di Bedono (Ambarawa) dan di Semarang. Pada tahun 1896 di tempat terakhir itu didirikan taman kanak-kanak di Mlaten dan Lamper. Selain itu juga didirikan kursus guru katekhis (penyiar agama Katolik). Pada tahun 1897 kursus ini mempunyai murid 14 orang, empat orang berasal dari Minahasa dan mempunyai murid 10 orang dari Jawa. Sementara itu jumlah Katolik makin bertambah. Pada bulan Desember 1895, di Magelang ada 12 orang Jawa masuk agama Katolik, di Muntilan ada 18 orang. Pada tahun 1896 jumlah orang Jawa di Ambarawa yang beragama Katolik ada 53 orang, di Bedono ada 130 orang di daerah Magelang dan Muntilan ada 131 orang.

Karena jumlah orang Katolik terus bertambah, sedangkan tempat tinggal mereka terpencar-pencar, maka perlu ada pembagian daerah kerja misi Katolik. Pastor Hebrans SY di Semarang daerah kerjanya meliputi Semarang, Demak, Kudus dan Jepara. Jumlah umat Katolik di daerah tersebut, sekitar 171 orang. Pastor Van Lith menetap di Muntilan. Daerah kerjanya meliputi wilayah Muntilan, Bedono, Magelang. Orang Jawa di daerah tersebut yang beragama Katolik ada 313 orang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan agama Katolik perlu didirikan sekolah sebab sekolah itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk tempat penanaman jiwa keagamaan dan tempat pendirian kader Katolik. Oleh karena itu kita tidak heran jika usaha misi di Jawa dipusatkan kepada pendidikan,

dengan jalan menyelenggarakan sekolah. Kegiatan inilah yang makin hari makin menuntut perhatian pastor van Lith.

Untuk sekolah swasta lain yang tidak berdasarkan agama menurut statistik tahun 1897 (Tabel 1) untuk seluruh Jawa Tengah berjumlah 72 buah, namun tidak jelas jenis dan nama-nama sekolah tersebut. Sedang untuk swasta Islam, yaitu pesantren telah diuraikan dalam Bab II.

BAB IV

PENDIDIKAN PADA ABAD KE- 20 (1900 --1945)

4.1 Politik Etika dan Perkembangan Pendidikan

4.4.1 Perubahan Pada Awal Abad ke-20 : Politik Etika

Pada awal abad ke-20 Indonesia mengalami perubahan menuju modernisasi yang mengambil pola Barat. Dasar-dasar perubahan tersebut sebenarnya telah mulai ditanam Belanda sejak pertengahan abad ke-19, yaitu perubahan sistem pemerintahan feodalistis pada bekas kerajaan-kerajaan asli menjadi sistem birokrasi kolonial, penanaman modal swasta asing di Indonesia dalam bentuk perusahaan, perkebunan, dan lain-lain, pemilikan tanah perseorangan, kerja upah, penggunaan lembaga pengadilan modern, perintisan dan pengembangan pendidikan formal dan lain-lain.

Bila perubahan structural pada abad ke-19 tersebut berjalan lambat dan berorientasi kepada keuntungan negara Belanda, maka pada abad ke-20 tuntutan situasi menyebabkan perubahan lebih cepat ke arah modernisasi lebih luas ruang lingkungannya dan lebih tinggi intensitasnya. Beberapa faktor yang turut mendorong hal tersebut adalah :

- a. Tercapainya *Pax Neerlandica* di hampir seluruh wilayah Indonesia sejak berakhirnya perlawanan bersenjata (yang berskala

besar) maka biaya perang yang besar dapat dialihkan untuk pembangunan.

- b. Kebutuhan yang makin meningkat akan pekerja dan pegawai yang trampil dan terdidik, dan kebutuhan prasarana modern baik untuk kepentingan birokrasi kolonial, maupun perusahaan swasta asing.

Timbulnya perasaan bersalah di kalangan segolongan bangsa Belanda akan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa Indonesia, sementara Indonesia terus menerus dikuras kekayaan demi keuntungan Belanda. Golongan inilah yang melahirkan politik Etika, yang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk membayar "hutang kehormatan" kepada bangsa Indonesia.

Politik Etika dilancarkan oleh golongan Liberal dan Humaniter sebagai reaksi dari politik drainage (pengurasan) terhadap kekayaan dan tenaga kerja Indonesia oleh perusahaan swasta pada jaman politik Liberal (1870--1900). Akibat politik pemerintah yang tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi, perusahaan-perusahaan tidak menaruh perhatian akan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, seperti yang dicita-citakan Liberalisme, bahwa kebebasan setiap manusia membawa kebahagiaan, kenyataannya kebebasan mengakibatkan penindasan pada yang lemah.

Dari hasil penelitian. Panitia Kemunduran Kesejahteraan (1904-- 1905) menunjukkan keadaan rakyat tetap miskin, terbelakang, tidak meningkat pendapatannya. Masa politik etika yang dipelopori Ch. van Deventer, van Kol dan B. Brooschooft merencanakan usaha perbaikan untuk rakyat banyak. Pada pokoknya perbaikan tersebut meliputi :

- a. perbaikan irigasi untuk meningkatkan pertanian.
- b. Imigrasi untuk menyebarkan penduduk Jawa yang padat ke daerah lain,
- c. pendidikan, meningkatkan pendidikan umum untuk rakyat,
- d. desentralisasi pemerintahan.

Akibat politik etika sangat terasa di bidang pengajaran sekolah meningkat, demikian pula jumlah guru dan murid. Jumlah lulusan sekolah bertambah, tetapi pemerintah kolonial sangat membatasi

mereka. Diskriminasi dilakukan sejak memasuki jenis sekolah sampai memasuki pekerjaan. Dari kaum terpelajar inilah timbul kesadaran diri sebagai bangsa yang dianggap rendah oleh bangsa lain. Dari mereka timbul pergerakan nasional yang memperjuangkan nasib bangsanya.

4.1.2 Pergerakan Nasional dan Pendidikan

Timbulnya pergerakan nasional adalah salah satu akibat langsung dari pendidikan. Pendidikan formal menghasilkan golongan terpelajar, suatu kelompok elite baru yang sebelumnya belum ada. Sebagai orang muda yang terpelajar, mereka memiliki cakrawala yang luas mengenai kemajuan bangsa-bangsa di dunia, mengenai kepincangan politik kolonial, mengenai nasib bangsanya yang terjajah. Mereka tergerak untuk mendirikan organisasi modern sebagai alat perjuangan untuk membela nasib bangsanya.

Selain faktor dalam negeri, faktor luar negeri berpengaruh pada kebangkitan nasional. Perang Kemerdekaan Filipina akhir abad ke-19, kemenangan Jepang atas Rusia di Port Arthur pada tahun 1905, Revolusi Cina tahun 1911, modernisasi Republik Turki di bawah Attaturk sejak tahun 1911, Revivalisme agama Islam di Mesir dan agama Budha di Bitma, semuanya turut menggetarkan semangat pemuda Indonesia bahwa bangsa Asia mampu menjadi bangsa yang besar, maju, tidak lebih rendah dari bangsa Barat seperti demokrasi, sosialisme, Nasionalisme, komunisme mempengaruhi pemuda/pelajar, yang membawa corak dan warna kepada berbagai organisasi yang mereka bentuk. Sebagian dari pemuda/pelajar tidak mau menjadi pegawai pemerintah kolonial, bahkan tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah. Banyak di antara partai-partai/organisasi mendirikan sekolah sebagai kaderisasi generasi muda dalam menanamkan cita-citanya. Timbullah sekolah-sekolah Serikat Islam, Budi Utomo, Ksatrian Instituut dari Indiche Partij, Perguruan rakyat dari PNI dan lain-lain. Yang paling penting adalah didirikannya sekolah swasta sebagai pengabdian di bidang pendidikan, sebagai alat perjuangan bangsa, tanpa secara khusus menjadi onderbow dari partai tertentu, misalnya Taman Siswa dan Muhammadiyah. Tumbuhnya berbagai sekolah pergerakan telah menanamkan kesadaran nasional di kalangan

para murid dan generasi muda, yang kelak akan meneruskan perjuangan merebut kemerdekaan.

4.1.3 *Politik Pemerintah Kolonial terhadap Pendidikan Negeri, Pendidikan Pergerakan Nasional dan Pendidikan Swasta Lainnya*

Sesuai dengan politik etika yang telah digariskannya, pemerintah kolonial meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah negeri. Jumlah murid meningkat dengan pesat sejak awal abad ke-20 sampai dasa warsa ketiga. Hal ini menunjukkan makin besarnya perhatian rakyat akan pendidikan. Terutama karena pendidikan merupakan sarana yang penting untuk dapat pekerjaan sebagai pegawai negeri, atau pegawai di perusahaan swasta. Namun pemerintah kolonial tetap mengadakan pembatasan syarat masuk sekolah. Pemerintah, mempertahankan “kelas-kelas” sekolah yang sederajat yang diperuntukkan anak-anak golongan tertentu, misalnya :

- a. ELS berbahasa Belanda hanya untuk anak Belanda, Indo dan anak Indonesia golongan bangsawan tinggi atau orang tua yang berbahasa Belanda,
- b. HIS berbahasa Belanda untuk anak pegawai, priyayi,
- c. Sekolah rendah Kelas I untuk anak pegawai rendah dan orang mampu,
- d. Sekolah Rendah Kelas II untuk anak rakyat biasa,
- e. Sekolah Desa untuk semua anak desa dan siapa saja.

Adanya “kelas-kelas” ini hanyalah untuk membatasi anak Indonesia asli memasuki sekolah bermutu tempat anak Belanda. Animo masuk sekolah ternyata besar, karena setiap tahun banyak jumlah calon murid yang tidak dapat diterima. Oleh sebab itu banyak didirikan sekolah swasta, di mana tidak didirikan diskriminasi warna kulit, atau keturunan atau pendapatan orang tua. Bagi kaum pergerakan sekolah juga merupakan sarana untuk penerusan cita-cita mereka.

Sikap Pemerintah Kolonial terhadap sekolah swasta pergerakan nasional adalah hati-hati. Mereka tidak diberi subsidi, diawasi dengan ketat, dan bila kedapatan anti pemerintah harus ditutup. Berlainan dengan sekolah yang didirikan oleh Zending Protestan dan Misi

Katolik, pemerintah memberikan subsidi. Karena Politik Etika dan politik Asosiasi (kerja sama Indonesia Belanda) sejalan pula dengan cita-cita golongan Kristen Katolik yang bertujuan turut meningkatkan kesejahteraan rohani dan jasmani dari rakyat Indonesia. Sejumlah kecil Sekolah Muhammadiyah juga mendapat subsidi, karena tidak bercorak politik.

4.1.4 Sikap Rakyat Indonesia terhadap Pendidikan Barat, Khususnya di Jawa Tengah

Jawa Tengah mempunyai keistimewaan dalam semangat memajukan pendidikan, seperti tercermin dalam pribadi Kartini dan cita-citanya untuk memajukan kesejahteraan dan martabat bangsanya, khusus kaum wanitanya. Kartini yang hidup di ambang pintu abad ke-20 dan sempat melangkah masuk beberapa tahun benar-benar menjwai abad ke-20 di Indonesia yang penuh perubahan menuju jaman modern. Ia seolah melihat jauh ke depan suatu jaman baru bagi Indonesia, dan merasakan keprihatinan yang mendalam atas keadaan bangsanya yang masih jauh tertinggal dari bangsa Barat. Dengan kemampuan yang tinggi untuk menangkap pertanda jaman, dibantu oleh banyak sahabat dan saudara serta ayahnya yang berpandangan progressif, Kartini menemukan kunci pertama untuk kemajuan bangsa, yaitu pendidikan. Tidak secara kebetulan bahwa Kartini mempunyai cita-cita demikian. Ia mewakili satu kelompok elite tradisional di Jawa Tengah, satu keluarga Bupati yang berpikiran maju. Ayah Kartini Sosroningrat, Bupati Jepara, adalah hanya satu dari beberapa orang di Jawa yang dapat berbahasa Belanda perempat ketiga abad ke-19. Dan itu adalah berkat asuhan kakak Kartini: Condronegoro IV, Bupati Demak. Atas prakarsa sendiri, beliau mencari guru bahasa Belanda untuk mengajar putra-putrinya (pada pertengahan abad ke-19 belum ada sekolah umum bahasa Belanda) Dengan makin merosotnya kedudukan Bupati di bawah kekuasaan pemerintah Belanda, Bupati Condronegoro yang arif ini melihat, bahwa jalan untuk menegakkan kembali harga diri penguasa Indonesia (Bupati) adalah dengan cara mengambil alih ilmu dan ketrampilan orang Belanda yang menguasainya. Maka ia sangat setuju diberikannya pendidikan Barat kepada bangsa Indonesia. Bupati adalah jabatan penguasa asli tertinggi dari birokrasi kolonial di Jawa, di bawah pejabat-pejabat Belanda.

Mereka merupakan golongan yang memerintah (ruling elite) dari masyarakat pribumi. Jabatan Bupati diisi oleh para keluarga Bupati sendiri. Maka seringkali terjalin suatu jaringan kekeluargaan yang kait mengkait antara para bupati tersebut. Misalnya Condronggoro IV yang mempunyai beberapa orang putra yang menjadi Bupati. Juga ayah Kartini mempunyai beberapa orang putra dan beberapa orang menantu yang menjadi Bupati (di Tegal dan Rembang). Maka pengaruh pandangan mereka yang maju tentang pendidikan tersebar luas pula di kabupaten-kabupaten lain dan menjadi suri tauladan (panutan) orang banyak.

4.2 Pendidikan Zaman Hidia Belanda di Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai salah satu dari 3 propinsi di Jawa merupakan pula satu daerah yang paling maju di bidang pengajaran pada abad ke-20, khususnya dilihat dari jumlah sekolah-sekolah formal. Menurut suatu laporan pendidikan sampai tahun 1897 (Tabel 1) diketahui bahwa jumlah seluruh sekolah di Jawa Tengah (9 Karesidenan) adalah nomor 2 setelah Jawa Timur, tetapi jumlah sekolah Negeri adalah yang terbanyak. Hanya ada 2 daerah yang melebihi pulau Jawa dalam hal kemajuan pendidikan, yaitu daerah Tapanuli Utara (200 Sekolah) dan daerah Minahasa (237 Sekolah), karena keduanya adalah daerah mayoritas Kristen, di mana bekerja Zending-zending yang banyak membuka sekolah-sekolah.

Majunya pendidikan (dalam hal ini pengajaran) di Jawa (termasuk Jawa Tengah) disebabkan karena pulau Jawa paling lama dan paling intensif dijajah Belanda (kira-kira sejak tahun 1700).

Hal ini mengakibatkan :

1. Kegiatan perdagangan, ekonomi dan pemerintahan yang memerlukan lebih banyak pengelolaan administrasi.
2. Diperlukan lebih banyak pegawai untuk mengisi birokrasi pemerintahan maupun karyawan perusahaan-perusahaan.
3. Jumlah orang Belanda yang sangat kecil untuk memerintah penduduk Jawa yang begitu banyak, sehingga diperlukan banyak pegawai pemerintah tingkat menengah sampai ke bawah yang dapat menulis, membaca dan berhitung dengan huruf Latin.

4. Untuk menerima perintah dan melaksanakannya, juga untuk meningkatkan kegiatan ekonomi (terutama ekonomi uang) akan lebih memudahkan bila orang tahu membaca dan menulis. Masyarakat Jawa sebelum kedatangan bangsa Barat telah memiliki kebudayaan yang berkembang, termasuk tradisi menulis (Jawa dan Arab), hingga lebih terbuka menerima kebudayaan baru (tulisan Latin dan Ilmu dari Barat).
5. Menurut jumlah penduduk pulau Jawa memang yang terpadat, hingga diperlukan sekolah lebih banyak. Sejak tahun 1900 dengan dimulainya politik etika maka sekolah-sekolah nampak bertambah dengan sangat pesatnya. Sekolah-sekolah ini terdiri dari sekolah yang didirikan Pemerintah (Gubememen) maupun sekolah swasta, baik yang diselenggarakan oleh golongan agama yang mengandung misi keagamaan (Islam, Protestan, Katolik), maupun, oleh golongan pergerakan nasional dan non agama yang lain.

Tabel 2. Perbandingan jumlah sekolah dan murid (Negeri dan Swasta) di HindiaBelanda pada tahun 1900 dan 1928.

	Jenis Sekolah	1900		1928	
		Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1.	Sekolah Dasar Berbahasi Daerah	1375	98.460	17.611	1.513.000
2.	Sekolah Dasar Berbahasa Belanda	-	1.540	-	75317
3.	Sekolah Lanjutan	-	13	-	6.462
4.	Sekolah Kejuruan	-	200	-	16.177

Sumber: Wyndham, Native, Education, 1933, hal. 88.

4.2.1 Sekolah Gubernemen (Negeri)

4.2.1.1 Volksschool

Sesuai dengan program politik etika, pemerintah kolonial sejak awal abad ke-20 meningkatkan jumlah dan mutu sekolah negeri untuk orang Indonesia, sesuatu yang dilalaikannya sampai abad ke-19. Terutama setelah pemerintah kolonial memerintahkan didirikannya sekolah desa (Vorshool) pada tahun 1906, jumlah sekolah meningkat terus setiap tahunnya. Untuk melaksanakan program politik etikanya sangat banyak dibutuhkan biaya, khususnya bagi pendidikan rakyat yang berjumlah 28 juta itu. Untuk meringankan pembiayaan tersebut, pemerintah kolonial membebankan Sekolah Dasar di desa kepada anggaran belanja di desa. Ini dimungkinkan dengan berlakunya ordonansi Desa tahun 1906 di mana desa mengatur sendiri pemerintahan desa dan pembiayaan keperluan desa. Dalam pengelolaan Sekolah Desa, tanah dan gedung serta peralatan disediakan oleh Desa dengan subsidi Pemerintah, di samping pemerintah menyediakan tenaga guru serta bahan pelajaran. Ide pertama mendirikan suatu sekolah desa datang dari bekas Residen Kedu de Bruyn Prince. Kemudian ide ini didukung Gubernur Jenderal van Heutz dengan mengadakan pilot proyek di 4 Karesidenan: Priangan, Cirebon, Kedu dan Kediri pada tahun 1906. Sekolah Dasar yang hanya tiga tahun dengan Pendidikan yang paling elementer yaitu Membaca dan menulis (Latin dan Jawa) serta berhitung ini ternyata mendapat tanggapan positif. Sekolah berkembang pesat dan dilaksanakan diseluruh kepulauan Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia haus akan pendidikan. Sejak sekolah desa Pertama didirikan di Kedu tahun 1906, 15 tahun kemudian (Tabel 2.) di Jawa Tengah terdapat 2318 buah Sekolah Desa (tidak termasuk Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta). Setelah berkembang pesat timbul masalah baru ke mana anak-anak lulusan desa ini akan melanjutkan pendidikannya. Pengetahuan dasar yang mereka peroleh tidak dapat untuk

bekal bekerja di Pemerintah atau diperusahaan swasta, juga tidak dapat untuk melanjutkan ke sekolah yang ada.

Seperti diketahui sejak semula pemerintah kolonial menciptakan diskriminasi dengan mendirikan sekolah yang berbeda-beda mutunya untuk anak-anak yang berbeda status sosialnya. Pada dasarnya sekolah-sekolah dibagi dalam dua golongan besar, sekolah untuk golongan atas dan sekolah untuk golongan rakyat kebanyakan. Sekolah golongan atas terdiri dari sekolah untuk anak Belanda (ELS, HBS) dengan mutu pelajaran dan sistem yang sama dengan sekolah di negeri Belanda. Kemudian sekolah golongan atas untuk anak Indonesia (misalnya Sekolah Dasar Kelas I, Sekolah Kepala/Raja atau *Hoofden School*). Sedang sekolah untuk rakyat kebanyakan Sekolah Dasar Kelas II.

Dalam prakteknya sekolah jenis yang satu “tertutup” untuk jenis yang lain. Karena Sekolah untuk golongan atas menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda (ELS) atau diberi pelajaran bahasa Belanda (SD Kelas I), sedang pada sekolah untuk sekolah golongan rakyat biasa (SD Kelas II) tidak diberikan maka sulit bagi sekolah golongan kebanyakan untuk masuk ke sekolah golongan atas.

4.2.1.2 *Vervolgschool*, *Schakelschool*

Demikian pula dengan sekolah desa. Maka tahun 1915 diciptakan sebuah “sekolah sambungan” bagi sekolah desa untuk dapat sekolah yang lebih tinggi, yaitu *Vervolgschool*, yang mempunyai masa pendidikan 2 tahun: kelas 4 dan kelas 5. Atau lulusan Sekolah Desa dapat melanjutkan ke SD kelas II. Tahun 1925 diciptakan sekolah baru *Schakelschool*, yaitu sekolah 5 tahun yang menerima anak-anak SD kelas II setelah tamat kelas 3. Setelah menamatkan *Schakelschool* 5 tahun, murid dapat masuk ke SLP, misalnya Sekolah Guru atau Mulo.

4.2.1.3 HIS, HCS

Untuk mengatasi keruwetan sistem sekolah yang diskiriminatif ini, tahun 1914 diciptakan Sekolah Dasar yang

lebih umum bagi anak Indonesia agar dapat meneruskan ke SLP dan SLA secara langsung yaitu HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) yang menggunakan bahasa pengantar Belanda sejak kelas 3, dan mempunyai 7 kelas. Dengan demikian SD kelas I dihapuskan, tetapi SD yang lain tetap ada. Selain HIS untuk anak Indonesia asli, juga didirikan HCS (*Hollandsch Chinesche School*) untuk anak ,China.

4.2.1.4 MULO dan AMS

Sekolah HIS hanya ada di ibukota Kabupaten. Pada tahun 1914 juga didirikan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), SLP untuk melanjutkan lulusan SD. MULO hanya didirikan di ibukota Karesidenan pada umumnya. MULO yang pertama di Jawa Tengah didirikan AMS (*Aleemene Middelbare School*) tingkat SLA tahun 1919. Di Jawa Tengah AMS hanya terdapat di kota Semarang, kini menjadi SMA III di Jalan Pemuda. Selain itu AMS terdapat di Surakarta dan di Yogyakarta (bukan Jawa Tengah).

4.2.1.5 ELS, HBS

Sekolah yang diperuntukkan orang Belanda yaitu ELS (*Euaxqieesche Lagere School*) untuk tingkat SD dan HBS (*Hogere Burger School*) untuk tingkat SLP dan SLA telah ada jauh sebelum sekolah “pribumi” didirikan. Pada tahun 1900 sudah terdapat 169 buah ELS di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota yang merupakan konsentrasi pemukiman penduduk Belanda, seperti ibukota Karesidenan, di sekitar pabrik gula, di kota pusat kesatuan militer. HBS sebagai Sekolah Lanjutan Belanda yang pertama untuk mereka yang lulus ELS agar dapat masuk Universitas di negeri Belanda hanya ada sebuah di Jawa Tengah, yaitu di Semarang. Seperti telah disebutkan pada bab yang lalu sekolah tersebut didirikan pada tahun 1877 yang menempati Gedung SMA III, jalan Pemuda. Tahun 1939 sekolah tersebut menempati gedung baru yang megah, di tempat yang kini menjadi SMA Negeri I dan II, jalan Menteri Supeno, Semarang.

Masyarakat jaman kolonial adalah masyarakat dualitas yang terdiri dari masyarakat bangsa Belanda/Kulit Putih dan masyarakat pribumi atau bangsa asli Indonesia. Di antaranya masih ada masyarakat pinggiran yaitu masyarakat golongan Cina dan bangsa Asia lainnya yang merupakan minoritas. Perbedaan dalam golongan besar masyarakat ini terletak pada perbedaan hak-haknya. Golongan kulit putih sebagai bangsa yang menjajah memiliki segala hak yang istimewa baik di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan masyarakat Indonesia asli dianggap lebih rendah jauh lebih kurang hak-haknya dan memikul kewajiban yang lebih banyak.

Percampuran kedua golongan ini sangat dibatasi. Keadaan ini sengaja dipertahankan oleh Pemerintah Kolonial untuk menjaga kedudukan “unggul” dari bangsa Belanda. Demikian pula di bidang pendidikan.

Syarat-syarat masuk sekolah bagi anak Indonesia diperberat, lebih-lebih untuk masuk sekolah elite Belanda (ELS, HBS) atau sekolah lanjutan yang lain. Selain seleksi kecerdasan, untuk masuk ELS misalnya, hanya anak bangsawan tinggi, atau anak kelas penguasa yang boleh masuk atau keluarga yang sudah menggunakan bahasa Belanda di rumah jadi sudah dianggap sejajar orang Belanda dan pegawai negeri yang bergaji tinggi, dapat diterima. Dengan demikian presentase murid Indonesia dalam sekolah elite tersebut sangat kecil. Sedangkan bagi golongan pinggiran yaitu Cina dan Asia yang lain sedikit lebih baik keadaannya dari Indonesia asli.

Misalnya HBS Semarang yang telah berumur 64 tahun baru menerima anak Indonesia asli sebanyak 20% dari seluruh murid yang berjumlah 719 orang menjelang Perang Dunia II (1941). Selain sekolah umum, sekolah kejuruan juga bertambah pesat.

4.2.1.6 Pendidikan Guru

Salah satu sekolah Kejuruan yang sangat penting adalah sekolah Pendidikan Guru, karena sekolah ini menyediakan calon guru guna kelangsungan dan perkembangan bermacam-

macam sekolah yang ada. Pendidikan guru ada bermacam-macam, sesuai dengan jenis sekolah di mana mereka memperkenankan mengajar kelak.

- 1). **Normaalschool** Untuk menjadi guru SD kelas II. Syarat : murid tamat SD kelas II, mengikuti pendidikan selama 4 tahun. Sekolah ini terdapat di beberapa tempat di Jawa Tengah, misalnya di Salatiga.
- 2). **Normaalleergangen voor Inlandasche Hulp Onderwijzers** : Untuk menjadi Guru Bantu di SD Kelas II. Terdapat di banyak tempat. Syarat : murid lulus SD kelas 11 dengan baik ditambah kursus 2 tahun.
- 3). **Leergangen Tot Opleiding van Volksonderwijzers** : Untuk menjadi guru sekolah Desa. Syarat: murid lulus SD kelas II ditambah kursus 1 tahun. Banyak terdapat di Jawa Tengah.
- 4). **Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers** : Untuk menjadi guru di HIS. murid lulus HIS ditambah pendidikan 4 tahun. Sekolah ini termasuk yang paling tua, paling dahulu dibuka, untuk persiapan Sekolah Dasar Umum. Di Jawa Tengah terdapat Kweekschool misalnya di Ungaran (untuk laki-laki). Kweekschool di Salatiga (untuk wanita).
- 5). **Hogere Kweekschool (lanjutan Kweekschool)**. Pendidikan selama 3 tahun setelah lulus Kweekschool. Setelah lulus, ditambah kursus Hoofd akte 2 tahun

menjadi guru kepala HIS. Tahun 1919 disetujui pula pendirian Hogere Kweekschool di Purworejo, sebelumnya terdapat di Magelang.

4.2.1.7 Sekolah pertukangan

- 1). Sekolah pertukangan yang pertama di Jawa Tengah didirikan di Semarang tahun 1892, yaitu Semarangische Ambachtschool, khusus untuk pertukangan kayu.

- 2). Sekolah Pertukangan Ukir Jepara

Jepara sangat terkenal dengan ukiran kayu untuk alat rumah tangga, seperti mebel, kotak-kotak kecil dan sebagainya. Bakat mengukir ini banyak dimiliki oleh penduduk kota Jepara dan sekitarnya. Maka untuk menjaga kontinuitas seni ukir ini yang sangat khas di Jawa Tengah, maka pemerintah kolonial membuka Openbare Ambacht school. Khusus ukir kayu, tanggal 1 Juli 1929, yang kini menjadi Sekolah Tehnik Pertama, Jepara. Hasil pendidikan dalam Sekolah Pertukangan ini ternyata banyak ditiru para tukang pembuat mebel yang tidak bersekolah, sehingga terjadi peningkatan ketrampilan secara masal dari hasil pelajaran di sekolah.

Pendidikan sekolah hanya dua tahun. Setelah lulus mereka dapat berusaha sendiri atau menjadi tukang pada perusahaan mebel. Tahun 1931 atas prakarsa sekolah tersebut, dengan dukungan Bupati Jepara dan Asisten Residen Jepara, lulusan sekolah ditampung dalam satu perusahaan mebel milik Daerah. Gedung dan peralatan disediakan oleh pemerintah dan perusahaan ini dinamakan 'Jepara Hondsnijden en Meubelmaken atau J.H.M dan diresmikan pada tahun 1932. Mula-mula perusahaan ini maju pesat karena umum sangat menggemarnya. Namun persaingan dari perusahaan mebel lainnya sangat besar, sehingga akhirnya jatuh dan ditutup. Kini tinggal Sekolah Pertukangan Kayu yang tetap hidup dengan nama S. T. P. Jepara.

4.1.2 Sekolah Swasta

4.1.2.1 Sekolah Swasta Yang Berasaskan Kristen

Pendidikan oleh golongan Kristen pada abad ke-20 melanjutkan usaha di bidang pendidikan yang telah banyak dilaksanakan pada abad sebelumnya. Seperti juga sekolah Gubernemen, sekolah-sekolah Kristen juga mengalami kemajuan pesat. Karena gerakan Zending di negeri Belanda mendukung politik etika, yang memberikan perhatian utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, khususnya di bidang pendidikan, pertanian dan transmigrasi. Dalam pelaksanaannya, politik etika berkembang menjadi politik asosiasi, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri jajahan Hindia Belanda, dengan memasukkan kebudayaan dan teknologi Barat, ikatan kolonial antara Belanda dan Indonesia yang kini, akan terus berlangsung secara langgeng. Maka praktek dari politik etis adalah juga westernisasi Golongan Kristen turut mengembangkan pendidikan modern yang bersifat Barat. Sesuai dengan orientasi pemerintah kolonial yang lebih banyak mengalami program untuk rakyat banyak, maka orientasi pendidikan Kristen juga banyak diarahkan kepada perluasan sekolah untuk rakyat banyak. Sejak awal abad ke-20, di samping mengembangkan sekolah golongan atas, pendidikan Kristen juga merasa terpanggil untuk mengisi kekurangan pada sifat pendidikan pemerintah yang sekularistis, dengan memberikan pendidikan kerohanian Kristen, pada lembaga pendidikannya.

1). Azas dan Tujuan

Tujuan pendidikan Kristen adalah pembentukan pribadi ke arah kedewasaan berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam Hukum Tuhan menurut ajaran Kristen.

2). Struktur Sekolah Kristen

Sekolah Kristen sejak awal abad ke-20 didirikan oleh masyarakat Kristen di Jawa Tengah yang terdiri dari beberapa kelompok, yaitu :

- a). Kelompok perkumpulan Zending dari negeri Belanda. Mereka pada umumnya telah bekerja di Jawa Tengah pada pertengahan abad ke-19. Misalnya Doopgeziende Zending bekerja di daerah (Karesidenan) Jepara - Rembang; Salatiga Zending bekerja di daerah Salatiga. Nederlandsche Gereformeerde Zendingenvereniging yang mengambil wilayah kerjanya di Jawa Tengah bagian selatan. Salah satu karya mereka yang terpenting adalah mendirikan sekolah dan melaksanakan pengelolaannya.
- b). Kelompok masyarakat Kristen yang mendirikan perkumpulan tertentu untuk menyelenggarakan sekolah Kristen. Anggota-anggotanya biasanya orang Belanda.
- c). Kelompok perkumpulan sekolah yang didirikan oleh masyarakat Kristen pribumi. Mereka juga menyelenggarakan sekolah Kristen.

Antara kelompok satu dan kelompok lainnya tidak terdapat hubungan organisasi, masing-masing berdiri sendiri.

- 3). Jenis Sekolah, Lokalisasi dan Perkembangannya
Pekabaran Injil (Zending) yang paling banyak menyelenggarakan sekolah dan meliputi daerah paling luas di Jawa Tengah adalah Salatiga Zending. Tahun 1907 ia mendirikan Normaal School di Tingkir, Salatiga untuk menyediakan tenaga guru bagi sekolah dasar yang akan didirikan. Zending tersebut telah mendirikan 22 buah sekolah desa dan sembilan buah sekolah lanjutan dengan jumlah murid 2.641. Wilayahnya meliputi Jawa Tengah bagian Utara, kecuali daerah Jepara. Kudus dan Pati yang merupakan wilayah kerja Doopsgeziende Vereeniging. Dan , sekolah sejajar dengan HIS, yaitu menggunakan pengantar bahasa Belanda, yaitu di Purwodadi dan di Blora. Pengaruh Salatiga Zending ini nampaknya cukup besar di antara Zending lainnya, hingga pusat kedudukannya di Salatiga pada jaman kemerdekaan

menjadi pusat kedudukan Synode Gereja-gereja Kristen-Indonesia di Jawa Tengah. Salatiga menjadi pusat lembaga-lembaga Kristen di Jawa Tengah, misalnya Majelis Daerah Pendidikan Kristen, dan Universitas Kristen Satya Wacana. Pekabaran Injil di Jawa Tengah bagian selatan dilakukan terutama oleh Zending Gereformeerde Kerk. Sejak tahun 1913 sekolah-sekolah Kristen mulai berkembang.

Pada orang-orang Jawa mulai timbul hasrat mencapai kemajuan dengan jalan memasukkan anaknya ke berbagai sekolah untuk menerima pendidikan umum. Oleh karena itu di mana-mana dirasakan kekurangan sekolah untuk menampung anak-anak masyarakat yang akan dimasukkan. Sementara ini pemerintah tidak mampu meningkatkan jumlah sekolah dalam waktu yang demikian. Maka pemerintah dengan senang hati menerima bantuan Zending berupa pendirian sekolah-sekolahnya. Sebagai imbalan pemerintah memberi subsidi pada sekolah Zending yang memenuhi persyaratan. Dalam pada itu pemerintah tetap berpegang teguh pada peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur-Jendral van Heutz, yang isinya: anak-anak tak boleh dipaksa untuk menerima agama Kristen serta berdoa secara kristen. Tetapi hampir tak ada orang tua murid yang melarang anaknya mendengarkan pelajaran agama Kristen dan berdoa secara Kristen.

Karena kebijaksanaan pemerintah dalam menyelenggarakan sekolah untuk anak pribumi dipengaruhi oleh aliran politik etika dan kepada anak pribumi diberi kesempatan yang lebih luas memasuki sistem barat maka akibatnya nampak pada perkembangan sekolah swasta pada umumnya dan sekolah Kristen pada khususnya.

Zending membatasi mahalnnya pada penyelenggaraan sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa daerah. Perkembangannya tidak begitu pesat. Pada tahun 1913 jumlah sekolah ada 25 buah, yang ada pada tahun 1918

menjadi 39 buah. Pada tahun-tahun berikutnya banyak orang tertarik kepada sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa daerah. Banyak berdiri perkumpulan penyelenggara sekolah Kristen yang membuka sekolah sistem Barat yang diberi nama *Hollands Javaanse School met de Bijbel* untuk anak-anak pribumi dan *Hollands Chinese School met de Bijbel* untuk anak-anak Cina. H.I.S. yang pertama ialah *Koning in Wilhelmina School* di Yogyakarta, tetapi sekolah ini hanya untuk anak putri dari kalangan atas saja. Baru sesudah tahun 1913 dibuka beberapa H.I.S. untuk umum.

Pada tahun 1913 dibuka H.C.S. di Kebumen dan di Purbalingga. Di Yogyakarta yang dibuka pertama ialah H.I.S. di Gowongan di Magelang sebuah H.I.S. dan H.C.S. Pada tahun 1915 dibuka di Purworejo sebuah H.I.S., demikian juga di Solo. Sekolah yang pertama diberi nama *Idenburgschool*. Sekolah-sekolah sistem Barat didirikan di Purwokerto, Klaten, Sragen, Wates dan Temanggung.

Di Solo juga dibuka sekolah khusus untuk putri dengan nama *Koningin Emma School*. Dengan demikian di Wilayah Jawa Tengah Selatan dalam 10 tahun didirikan 13 buah sekolah H.I.S. dan tujuh buah H.C.S. Sementara itu sekolah H.I.S. dan H.C.S. belum mencukupi dalam pendidikan; diperlukan sekolah lanjutan bernama *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Solo pada tahun 1920 dengan nama *van Limburg Stirum School*; Di Yogya pada tahun 1912 dan di Magelang pada tahun 1925. Walaupun sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah Kristen, namun tidak kekurangan murid karena orang-orang Jawa dan Cina berhasrat besar mendapat pendidikan yang maju bagi anak-anaknya.

Akibatnya dari pada tumbuhnya sekolah Kristen di mana-mana, maka perlu didirikan sekolah guru untuk mencukupi kebutuhan akan tenaga gurunya. Untuk mencukupi guru di sekolah-sekolah sistem timur didirikan sekolah guru yang mengalami sejarah sebagai berikut :

Pada tahun 1888 di Purworejo dibuka sekolah guru dengan nama *Keucheniuschool*. Murid-murid yang diterima di sekolah ini dipersiapkan untuk menjadi guru sekolah dasar dan yang juga mampu untuk memberitakan Injil. Dalam perkembangan lebih lanjut pengajaran di sekolah tersebut diberi dua arah, yaitu:

- a. Untuk menyiapkan calon guru dan mantri juru rawat dan
- b. untuk guru Injil; murid-muridnya terdiri dari anak-anak yang tamat bagian pertama dan yang pernah mempunyai pengalaman bekerja sebagai guru atau juru-rawat.

Pada tahun 1905 *Keucheniuschool* di Purworejo dipindah ke Yogya, karena tempat ini dipandang lebih strategis sebagai Pusat kebudayaan Jawa. Dengan pemindahan ini sehingga diadakan deferensiasi untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga guru bagi guru di sekolah rendah tingkat desa selanjutnya didirikan Kursus guru Desa (C.V.0.) yang penyelenggaraannya dikaitkan dengan sekolah dasar yang kuat seperti di Margoyudan dan Temenggungan Sala. Tetapi tidak lama lagi telah dirasakan perlunya untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan guru yang menyiapkan guru sekolah dasar tingkat lanjutan (*Vervolgschool*). Maka diambil prakarsa untuk mendirikan sekolah guru untuk mencukupi kebutuhan tenaga guru bagi sekolah Zending, walaupun tidak ada subsidi dari pemerintah. Sekolah ini didirikan pada tahun 1937 di kampung Baron Sala dengan nama Pamulangan Guru Zending (P.G.Z.) yang ternyata besar manfaatnya bagi pekerjaan Zending.

Bagi tujuan tersebut dirumuskan :

- a. menyiapkan tenaga guru Kristen yang akan dipekerjakan di sekolah desa;
- b. setelah berpengalaman mengajar dapat ditempatkan di sekolah dasar tingkat lanjutan (*Vervolgschool*).

Diakui bahwa sekolah P.G.Z. sebagai jenis sangat sesuai dengan adat Jawa dan kebutuhan akan sekolah Jawa.

Dengan dibukanya sekolah-sekolah H.I.S. dan H.C S, di mana-mana didorong pula adanya proses, Indonesianisasi sekolah rendah dengan sistem Barat. Dengan Indonesianisasi dimaksudkan guru-guru di sekolah rendah sistem Barat lambat laun harus diganti dengan tenaga pribumi. Berdasarkan keputusan Sinode Gereja-gereja Gereformeerd di Rotterdam pada tahun 1917 didirikan di Sala: De Christelijke Hollandsch Inlandsche Kweekschool (Chr. H.I.K) yang dibuka pada tahun 1919. Murid-murid tidak hanya berasal dari Jawa, melainkan juga dari Ambon, Tapanuli, Manado dan keturunan Cina. Bekas murid dari sekolah ini ternyata tidak saja berguna untuk sekolah Kristen pada umumnya. Dapat juga dicatat bahwa banyak di antaranya yang akhirnya menjadi pejabat pemerintah R.I. yang berguna.

Masa antara tahun 1913--1925 ditandai dengan perkembangan sekolah Kristen yang berlangsung pesat. Tetapi dalam tahun-tahun antara 1925 sampai 1938 suasana mengalami perubahan disebabkan oleh Malaise, yaitu kemerosotan ekonomi umum yang mempengaruhi kehidupan sekolah Kristen juga. Pemerintah kurang mampu memberi subsidi kepada usaha swasta. Namun demikian masih ada rumah sakit dan sekolah baru yang dibuka. Jenis sekolah baru dalam sistem pendidikan umum dibuka, yaitu sekolah untuk kerumahtanggaan yang disebut Huishoudschool khusus untuk anak putri. Sekolah Kristen jenis ini yang pertama dibuka di Yogyakarta pada tahun 1927 dengan nama "Juliana van Stolbergschool". Menyusul dibuka Huishoudschool di Sala dengan nama "Mevrouw Grootschool", di Purwokerto dengan nama "Mardikenyo", di Purworejo dan di Kebumen. Walaupun keadaan sosial ekonomi sulit, namun jumlah sekolah Kristen jenis sekolah desa dan sekolah dasar lanjutan masih dapat bertambah. Banyak sekolah baru dibuka tanpa subsidi dari pemerintah. Ini dimungkinkan karena guru-gurunya bersedia bekerja dengan gaji di bawah aturan umum. Dan guru-guru dari

sekolah Zending yang bersubsidi rela dipotong gajinya (sampai 20%) untuk membiayai sekolah baru yang belum menerima subsidi. Lain dari pada itu guru-guru Kristen yang terhimpun di Persatuan Guru Kristen (P.G.C.) juga mengambil prakarsa memberikan sekolah Kristen atas kekuatan pribumi P.G.C. mendirikan sekolah Kristen di Sala, menyelenggarakan satu buah H.I.S. 1 buah Schakelschool dan 1 buah Mulo Di Kebumen berdiri H.I.S., P.G.C. pada tahun 1937. Perkumpulan sekolah Kristen "Sedya Mulyo" mendirikan sekolah-sekolah di Yogya, Purworejo dan Kutoarjo. Di Magelang P.G.C. pribumi mendirikan sebuah H.I.S. dengan nama *Elementaire School*.

Karena jenis H.I.S. terlalu mahal, juga untuk menjembatani sekolah sistem Timur dan Barat, maka pemerintah membentuk jenis sekolah rendah baru dengan bahasa pengantar bahasa Belanda yang disebut Schakelschool pada tahun 1928.

Perkumpulan-perkumpulan sekolah Kristen juga membuka sekolah-sekolah jenis ini, di antaranya di Ngawi, Sala, Magelang, akhir-akhirnya juga di Kutoarjo, Boyolali. Sekolah-sekolah yang oleh perkumpulan sekolah Kristen didirikan tanpa mengharap subsidi dari pemerintah disebut sekolah bebas. Akhirnya perlu juga disebut pembukaan jenis sekolah, karena juga menampung anak pribumi dari lapisan tinggi yaitu Christelijke Hogere Bur gerschool (Chr. H.B.S.) di Sala pada tanggal 1 Agustus 1939. Sekedar untuk memberikan gambaran dicantumkan data statistik tahun 1938 tentang sekolah Kristen di Jawa Tengah sebagai berikut :

Sekolah desa:

bersubsidi 55 buah, dengan murid 8.783, dan tak bersubsidi 37 buah, dengan murid 2.574 orang.

Sekolah dasar lanjutan :

bersubsidi 35 buah, dengan murid 2.634, dan tak bersubsidi 26 buah, dengan murid 860 orang.

Sekolah dasar Melayu untuk anak-anak Tionghoa: bersubsidi 3 buah, dengan murid 584, dan tak bersubsidi 4 buah, dengan murid 307 orang.

H.I.S (Sistem Barat untuk Bumiputra):

bersubsidi 15 buah, dengan murid 3.698 dan tak bersubsidi 5 buah, dengan murid 433 orang.

H.C.S. (untuk anak keturunan Cina):

bersubsidi 9 buah, dengan inuhd 2.295 dan tak bersubsidi 6 buah, dengan murid 642 orang.

Schakelschool:

bersubsidi 3 buah, dengan murid 664 dan tak bersubsidi 8 buah, dengan murid 469 orang.

Mulo: (lanjutan pertama):

bersubsidi 3 buah, dengan murid 718 dan tak bersubsidi 1 buah, dengan murid 63 orang.

Huishoudschool (kepandaian putri):

bersubsidi 4 buah, tak bersubsidi 2, tak ada data tentang murid.

Statistik menyeluruh tahun 1938 menyebutkan di Jawa Tengah ada 80 buah sekolah Kristen dengan jumlah murid 11.200 orang.

4.1.2.2 Sekolah Swasta yang Berasaskan Katolik

Pada abad ke-20, sekolah Katolik mulai berkembang dengan pesat. Namun demikian ketika di dunia dilanda malaise perkembangan sekolah Katolik mulai mundur, dan akhirnya pada jaman penjajahan Jepang, mundur dengan drastis. Banyak sekolah Katolik ditutup oleh Jepang. Adapun pesatnya perkembangan sekolah Katolik tersebut antara lain karena kemenangan perjuangan Umat Katolik dan umat Protestan di Negeri Belanda, tentang peraturan subsidi sekolah Swasta. Perubahan peraturan subsidi itu berlaku pula di Hindia Belanda. Sekitar tahun 1900, yayasan sekolah swasta diberi hak menerima subsidi yang sama atau mirip sekolah negeri. Pada tahun 1904 tanggal 17 Maret, Pastor Van Lith mengajukan permohonan yang pertama untuk subsidi bagi

gedung, para tenaga pengajar dan murid-murid sekolah Katolik. Permohonan dikabulkan oleh pemerintah Belanda. Ini terbukti pada bulan April 1905 pemerintah Belanda memberi beslit subsidi kepada Xaverius College di Muntilan, atau dengan kata lain, pemerintah menyetujui pemberian subsidi bagi Xaverius College Muntilan. Di Muntilan ini kemudian berkembang pesat pendidikan misi Katolik yang terbesar di Jawa Tengah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pastur Van Lith adalah peletak batu pertama Xaverius College Muntilan.

Dalam perkembangannya sekolah-sekolah Katolik yang lain juga menerima subsidi dari pemerintah. Misalnya pada tahun 1938 sekolah Katolik yang menerima subsidi sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar sekolah-sekolah Katolik yang menerima subsidi tahun 1938.

Jumlah	Nama Sekolah
1	<i>Algemeene Middelbare School</i> (AMS) (SMA).
3	<i>Hogere Burger School</i> (HBS) (SLTA).
10	<i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i> (MULO) (SMP).
40	<i>Europeesche Lagere School</i> (ELS) (SD Eropa).
12	<i>Hollandsch Chineesche School</i> (HCS) (SD Cina).
18	<i>Hollands Inlandse School</i> (HIS) (SD Bumiputra Belanda).
33	<i>Schakel School</i> (Sekolah Peralihan).
71	<i>Vervolgschool</i> (Sekolah lanjutan).
529	<i>Volkschool</i> (Sekolah Desa).
1	<i>Hollands Inlandse Kweekschool</i> (HIK) (Sekolah Guru Bumiputra Belanda).
4	<i>Kursus Guru Desa</i> .
1	<i>Normaal School</i> .
3	<i>Technische atau Ambacht School</i> (Sekolah Teknik Pertukangan).
2	<i>Lagere Nijverheids School Putri</i> (Pendidikan Ketrampilan).

698 buah sekolah.

Dimuka telah diuraikan bahwa sekolah-sekolah Katolik dapat digunakan sebagai alat untuk menanamkan jiwa keagamaan kepada para murid serta tempat pendidikan kader Katolik. Itulah sebabnya sudah sejak permulaan abad ke-20 kegiatan misi ditekankan pada pendidikan. Hal ini terbukti dari usaha misi Katolik mendirikan berjenis-jenis sekolah yang tersebar di daerah Jawa Tengah.

Perlu dimaklumi, bahwa menurut tata gereja Katolik, daerah kegiatan misi di Jawa Tengah dibagi dalam dua daerah keuskupan, yaitu keuskupan Agung Semarang dan Keuskupan Purwokerto. Keuskupan Agung Semarang di bawah usaha misi dari Ordo Serikat Yesus SY dan keuskupan Purwokerto di bawah usaha Ordo Salib Suci MSC. Adapun Keuskupan Agung Semarang meliputi daerah Semarang, Surakarta, Kedu, Yogyakarta, Keuskupan Purwokerto meliputi daerah Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kutoarjo, Pekalongan.

Oleh karena itu jelaslah bahwa Keuskupan Agung Semarang meliputi daerah Jawa Tengah bagian timur, sedangkan Keuskupan Purwokerto meliputi daerah Jawa Tengah bagian barat. Kedua daerah keuskupan itu pada jaman kerajaan Indonesia Islam masuk daerah kekuasaan Mataram Pusat kerajaan itu ada di daerah pedalaman, yaitu di Surakarta dan Yogyakarta. Raja-raja dari kerajaan itu meskipun agama Islam sudah berkembang di daerah kerajaannya, mereka tetap mempertahankan kebudayaan dan tradisi Jawa. Sebagai akibat politik Sultan Agung yang memusnahkan kota-kota dagang di pantai utara Jawa Tengah, maka masyarakat pada kedua keuskupan itu bersifat agraris feodal dan ikatan-ikatan tradisi masih kuat.

Palinck SY yang pernah bekerja di pulau Jawa sejak tahun 1959, dalam tahun 1880 mengirim laporan ke Roma mengenai beberapa kemungkinan dan kesulitan suatu misi di antara orang-orang Jawa - Beberapa kesulitan itu antara lain kekurangan tenaga bagi karya misi Tesuit yang mahir bahasa Jawa, prasangka bahwa orang-orang Jawa tak mungkin menerima kabar Injil oleh karena sudah terlalu lama masuk Islam. Meskipun demikian van Lith sesudah menyelesaikan studinya di negeri Belanda, dengan keinginannya sendiri pada tanggal 8 Januari 1896 mengirim surat ke provinsial SY, bahwa ia rela akan

menerima pekerjaan di mana pun juga yang dianggap lebih penting. Pada tahun 1896 pastor van Lith di Semarang, dengan pastor Petrus Hoevenaars tor van Lith di Semarang menjadi misionaris di pulau Jawa. Tak lama kemudian pastor van Lith pindah ke Muntilan. Dalam perjalanannya ia singgah di Ambarawa dan Bedono serta melihat bahwa pengertian agama pada rakyat di daerah itu dangkal sekali. Di Muntilan keadaannya sama saja.

Di Muntilan mula-mula ia bertempat tinggal di rumah sewaan Pacinan. Tak lama kemudian ia pindah ke kampung Semampir, di tengah-tengah orang Jawa, dan di situlah setapak demi setapak akan didirikan komplek misi Muntilan. Sudah barang tentu sambil bergaul dengan orang Jawa, ia mempelajari situasi. Dia berpendapat bahwa agar segala kekurangan ialah bahwa para misionaris tidak atau kurang mahir dalam bahasa dan adat istiadat Jawa, sehingga segala tenaga dipusatkan kepada studi dan kontak.

Ia berpendapat bahwa suasana kota seperti kota Semarang kurang baik untuk dijadikan pusat penyebaran agama Katolik. Hal ini jauh berbeda dengan Kedu. Menurut penilaiannya daerah Keduloh yang paling cocok untuk dijadikan pusat misi Katolik. Itulah sebabnya ia memilih daerah Muntilan sebagai pusat kegiatannya. Adapun pertimbangannya antara lain sebagai berikut : daerah itu masih merupakan daerah pertanian yang murni, berbatasan dengan Yogyakarta dan Surakarta, pusat kebudayaan Jawa, lebih-lebih dari daerah Muntilan dapat dengan mudah mengadakan hubungan dengan Yogyakarta, Magelang, dan Semarang.

Pada tahun 1899 dibelinya suatu pabrik minyak kacang yang kecil yang sudah bangkrut di daerah Mendut, yaitu desa kecil yang jaraknya dari Borobudur 3 km atau 10 km dari Muntilan. Pastor van Lith menetap di Muntilan, sedangkan temannya yaitu pastor Hoevenaars tinggal sendirian di Mendut.

Dua tokoh pastor itu mempunyai cita-cita yang sama ialah ingin menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengabdikan diri demi kesejahteraan umat manusia atas dasar cinta kasih. Tetapi cara mereka mewujudkan darma bakti demi penanaman rasa keagamaan dan peningkatan derajat hidup rakyat Jawa berlainan.

Sebagai contoh, Mendut pastor Hovenaars mendirikan suatu koperasi pertama, di situ petani dapat membeli berbagai kebutuhannya dan menjual penghasilannya. Tahun 1904 berdiri Bank Kridit pertanian kecil, Retnogoeno.

Pastor van Lith juga bergerak di bidang itu. Menurut Pastor Van Hoevenaars, sistem inilah yang paling baik untuk menanamkan jiwa keagamaan bagi rakyat Jawa Tengah Sebaliknya Pastor van Lith, ini hanya merupakan salah satu percobaan. Lebih-lebih setelah ternyata bahwa Pastor Hoevenaars dalam hal memberi kridit pada petani, terbatas pada petani yang sudah beragama Katolik atau kepada petani yang sudah magang. Resikonya ada kemungkinan petani itu memeluk agama Katolik karena ingin memperoleh kridit atau beras. Sebagai contoh mereka itu disebut “Katolik beras”. Ini memang sudah diperhitungkan oleh Pastor Hoevenaars, dengan harapan “Katolik beras” itu kelak dapat di gembeng menjadi Katolik Sejati.

Pastor van Lith tidak sependapat adanya perbedaan perlakuan terhadap orang Katolik dengan orang yang bukan katolik dengan ajaran agama Katolik, yaitu cinta pada sesama manusia. Jadi Pastor van Lith tidak memandang perbedaan agama, dan ia berkeyakinan bahwa amal Kristiani setapak demi setapak akan membuka hati orang bagi rahmat Tuhan Pastor van Lith lebih mengutamakan pendalaman pengertian terhadap orang dan masyarakat Jawa. Oleh karena itu menjalin kontak dengan berbagai lapisan masyarakat, dengan priyayi, wedono, dan kontrolur, hadir dalam pertunjukan-pertunjukan wayang kulit dan wayang orang. Kadang- kadang ia bertindak sebagai pegawai pencatat sipil bagi pengantin bukan Katolik maupun penganten Katolik membantu seorang pegawai pensiun yang memiliki perkebunan kopi dan yang sudah tua, dalam menulis surat-surat resmi, sehingga pastor van Lith sendiri-mengerti seluk-beluk korespondensi dengan instansi-instansi. Selain itu ia tekun mempelajari bahasa dan adat istiadat orang Jawa. Tentang penggunaan bahasa Jawa dalam doa-doa agama Katolik pun antara Pastor Hoevenaars berpendapat bahwa menggunakan kata-kata kromo inggil dalam doa adalah tanda semangat budak belian. Sebaliknya pastor van Lith berpendapat bahwa penggunaan kata-kata kromo inggil dalam doa- doa agama Katolik tidak meniadakan hubungan cinta kasih dan kepercayaan di antara ayah dan anak.

Melihat perbedaan dua tokoh pastor yang masing-masing berkarya di Mendut dan di Muntilan itu pemimpin Gereja meminta kepada mereka masing-masing membuat memorandum, yang isinya antara lain memuat ide-idenya tentang bagaimana hari depan misi Jawa, dan sarana-sarana serta cara-cara apa yang paling tepat untuk mengembangkan agama Katolik di daerah itu.

Menurut pastor van Hoevenaars, daerah Mendut dan sekitarnya mungkin juga di tempat lain, dipupuk umat Katolik yang kompak untuk itu diperlukan sekolah-sekolah desa dan beberapa usaha ekonomis yang menolong umat Katolik. Sebaliknya pastor van Lith yakin bahwa pola kerja pastor van Hoevenaars itu tidak akan berhasil. Ini disebabkan karena kurangnya tenaga misionaris yang bekerja di seluruh Jawa.

Adapun pola kerja pastor van Lith sebagai berikut : penyebaran agama Katolik di Jawa dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud secara langsung di sini yaitu misionaris-misionaris yang berkebangsaan Belanda langsung memberi pelajaran agama atau memancarkan agama Katolik kepada orang-orang Jawa. Secara tidak langsung berarti misionaris-misionaris Belanda mengkader orang-orang Jawa untuk mengembangkan agama Katolik di seluruh Jawa. Untuk itu diperlukan pendirian sekolah Katolik. Produk sekolah-sekolah Katolik ini yaitu elite Jawa, misalnya guru, imam, pamongpraja, dokter dan sebagainya. Elite Jawa Tengah yang kelak akan menjadi raga dan rasul perintis di seluruh pulau Jawa. Mereka yang sudah tertanam Jiwa beragama Katolik, di mana saja diharapkan dapat menjiwai masyarakat sekitarnya, yaitu kecintaan terhadap Tuhan dan sesama manusia. Dengan demikian, meskipun tenaga misionaris tidak mencukupi, tetapi agama Katolik dapat berkembang berkat partisipasi elite Jawa tadi. Mgr. Luypen dan pemimpin Serikat Yesus menilai bahwa metode pastor van Lith akan lebih berhasil bila dibandingkan dengan metode pastor van Hoevenaars. Itulah sebabnya pada bulan Mei 1905 pastor van Hoevenaars dipindahkan dari Mendut Jawa Tengah ke Bandung Jawa Barat.

Dengan dipindahkannya pastor van Hoevenaars ke Bandung maka karya misi Katolik di Jawa Tengah dipusatkan kepada pendidikan

sesuai dengan sistem pastor van Lith. Sebagai pusat pendidikan di Muntilan. Namun tahun-tahun berikutnya misi Katolik giat mendirikan sekolah, baik di daerah Keuskupan Purwokerto maupun di daerah-daerah Keuskupan Agung Semarang, dengan menggunakan sistem pastor van Lith.

Seperti telah disebut di muka bahwa pada abad ke-19 pendidikan sekolah Katolik mengalami kemajuan pesat. Sebabnya antara lain karena adanya perubahan pemberian subsidi oleh pemerintah kepada sekolah swasta, yang disamakan atau mirip dengan sekolah negeri. Selain itu pesatnya kemajuan pendidikan sekolah Katolik juga karena makin banyaknya misionaris berkebangsaan Belanda datang ke Indonesia. Mereka tidak terbatas pada para pastor, tetapi juga suster dan bruder. Sementara itu di kalangan pemuda pemudi Jawa hasrat bersekolah untuk menimba ilmu makin tinggi dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah belum cukup untuk menampungnya. Berbeda dengan sekolah pemerintah penerimaan murid berdasarkan status sosial dan pelapisan masyarakat, maka penerimaan murid sekolah Katolik, berprinsip semua manusia berderajat sama.

Kepesatan sekolah Katolik pada abad ke-20 itu ditandai dengan makin bertambah banyaknya sekolah yang didirikan oleh misi Katolik dan makin banyaknya jenis sekolah yang didirikan. Misalnya sekolah umum, sekolah bisu tuli, sekolah yang mendidik calon imam, sekolah keputrian, pertukangan dan sebagainya, berikut ini berturut-turut akan disajikan gambaran sepintas lintas tentang tahun-tahun didirikannya sekolah Katolik di Jawa Tengah beberapa kegiatan.

Tahun	Keterangan
1900	Sampai sekitar tahun 1900 di negeri kita sekolah-sekolah anak-anak pribumi hanyalah sekolah rendah tiga tahun atau 4 tahun, sedikit sekali putra Bupati, wedana dan sebagainya yang diterima di sekolah-sekolah <i>Europees</i> . Sejak tahun 1907 sebagai langkah pertama bahasa Belanda diajarkan di sekolah angka satu untuk dapat melanjutkan ke <i>Hollands Inlandse School</i> (HIS). Pada tahun 1900 suster-sutster St.

-
- Fransiskus dalam rangka mengabdikan diri untuk Tuhan dan untuk kemajuan sesama manusia, mendirikan sekolah bersama kemajuan sesama manusia, mendirikan sekolah bersama dengan asramanya di Magelang. Kemudian sekolah dan asrama ini pada tahun 1943 terpaksa ditinggalkan, karena suster sebagai warga negara asing pada waktu itu diinternir oleh Jepang. Gedung sekolah diserobot oleh Jepang, untuk tempat pendidikan Lurah.
- 1904 Kursus guru di Muntilan pada permulaan tahun 1904 sudah mulai mendidik guru bagi sekolah angka dua.
- 1906 Akhir tahun 1906 di Muntilan dibuka *Kweekschool*. Bahasa Belanda menjadi salah satu mata pelajaran, kemudian menjadi bahasa pengantar. Sesudah beberapa tahun murid-murid dari sekolah ini dapat memilih berbagai jurusan antara lain : Jurusan guru, pejabat pamongpraja dan lain-lainnya. Karena alasan politik, pemerintah Belanda memegang monopoli pendidikan propaganda. Namun pastor van Lith berhasil menempatkan sejumlah bekas muridnya ke *Hogere Kweekschool* di Purworejo, STOVIA Jakarta, sekolah pertanian kehutanan dan sekolah kehewanian di Bogor.
- 1908 Sekolah Katolik di Muntilan hanya mendidik pemuda-pemuda. Pastor van Lith memikirkan juga pendidikan pemudi-pemudi agar supaya ada keselarasan. Ia mengadakan hubungan dengan suster-suster Fransiskanes di negara Belanda, untuk mengabdikan diri di Jawa Tengah. Berkat usaha pastor van Lith ini, pada tanggal 14 Pebruari 1908 empat suster Fransiskanes datang di Mendut dan disambut oleh Pastor Fisscher dan murid-murid dari Muntilan. Setelah para suster belajar bahasa Jawa, mereka mendirikan suatu sekolah khusus bagi 17 putri intern, di bawah pimpinan Gregorius Arwadi Dwijoatmojo.

Untuk landasan yuridis dalam hal mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah Katolik maka pada tahun 1906 di Muntilan didirikan Yayasan yang bernama *R.K. Kweekschool* te Moentilan. Yayasan ini mengurus sekolah guru di Muntilan, Ambarawa dan Mendut, dengan sekolah-sekolah latihannya. Jumlah murid sekolah di Mendut makin bertambah banyak sehingga mencapai 400 siswi. Sekolah di Mendut merupakan sekolah putri pertama di Indonesia, yang mengajarkan bahasa Belanda dan *Kweekschool* 6 tahun sampai dengan tahun 1942 Mendut dan Muntilan merupakan pusat pendidikan untuk masing-masing siswi dan siswa di Jawa Tengah. Komplek Mendut maupun Komplek Muntilan akhirnya dihancurkan orang selama revolusi pada tahun 1948. Di Semarang (Bangkong) para suster mendirikan biara, dan menyelenggarakan sekolah-sekolah untuk putri-putri Indonesia mulai dengan yang berumur 4 tahun - 21 tahun.

- 1916 Di Muntilan dibuka HIS.
- 1917 Pada tahun 1917 di Muntilan dibuka HIS kedua dan HCS yaitu sekolah bagi anak Cina.
- 1918 Pada tahun 1918 didirikan Yayasan Kanisius, yang akan mengurus sekolah-sekolah misi, kecuali sekolah pendidikan guru di Muntilan, Ambarawa dan Mendut, yang tetap dibawah kepengurusan Yayasan R.K. *Kweekschool*.
- 1919 Pada tahun 1919 di Magelang dibuka kedua buah HIS.
- 1920 Di Ambarawa dibuka *Normaalschool* dan dua *Standaardschool* sebagai sekolah latihan. Sekolah tersebut merupakan pindahan *Normaalschool* dari Muntilan karena gedung sekolah Muntilan tidak dapat menampung animo murid lagi.

- | | |
|------|--|
| 1924 | Guna mempersiapkan pemuda-pemudi pribumi untuk menjadi guru pendidik yang baik, maka dibukalah di Ambarawa sebuah <i>Normaalschool</i> putri lengkap dengan sekolah latihannya dan asrama. Adapun yang mendirikan sekolah tersebut ialah suster-suster Fransiskus. Setelah kemerdekaan R.I. sekolah Katolik di Ambarawa mengalami perkembangan yang pesat. Sekarang: TK, SD, SMP dan SPG tidak dapat menampung murid-murid yang membanjirinya. |
| 1925 | Di Sala para suster membuka sekolah Dasar yang kemudian berkembang sehingga kini telah mempunyai : TK, SD, SKKP dan mulai dibuka SKKA. |
| 1927 | Pada tahun 1917 di Muntilan dan di Mendut baru terdapat 10 sekolah Rakyat (<i>Volkschool</i>). Tetapi 10 tahun kemudian di kedua daerah tersebut sudah ada 38 <i>Standaardschool</i> dan <i>Vervolgschool</i> , 36 <i>Volkschool</i> (3 Tahun) dengan lebih kurang 7.000 murid, 27 HIS (sekolah bagi anak-anak Indonesia dengan bahasa Belanda). |
| 1928 | <p>a. Di kota Salatiga di daerah, yang dingin dengan pemandangan yang indah, pada tahun 1928, didirikan biara suster St. Fransiskus. Suster-suster tersebut berkarya dalam bidang pendidikan (TK, SD, SMP) dan juga dalam bidang sosial. Misalnya mengadakan kunjungan sosial guna memberikan hiburan bagi yang membutuhkannya, terutama hiburan rohani.</p> <p>b. Tahun 1928 para Bruder FIC di Ambarawa mendirikan MULO. HIS.</p> |
| 1929 | <p>a. Di Purworejo suster-suster membuka sekolah Taman Kanak (Frobel) untuk anak-anak Belanda dan kelas persiapan HIS putri..</p> <p>b. Di Wonosobo sekolah tuan Antes penyelenggaraannya diserahkan pada misi.</p> |

	<ul style="list-style-type: none"> c. Suster-suster OLV H. Hart mendirikan sekolah Taman anak-anak, dan d. Suster-suster Ursula dari Klein Klooster (Jakarta) pada bulan Juli 1929 datang ke Purwokerto, untuk mendirikan ELS dan sekolah Taman Kanak-Kanak.
1930	<ul style="list-style-type: none"> a. Di daerah pegunungan sebelah utara Purworejo dibuka lima buah sekolah Desa. b. Pada tanggal 8 Maret 1930 terjadi peletakan batu pertama untuk ELS (5 kelas) "St. Angela" di Purwokerto. Pada tanggal 9 Maret 1930 menyusul peletakan batu pertama Gereja Kristus Raja. c. Pada tanggal 1 Juli 1930 di Purwokerto, Kutoarjo, Gombang dan Tegal dibuka sekolah HIS. Sedang di Wonosobo, Kutoario dan di Gombang dibuka MCS. d. Moeder Augustine yang bertempat tinggal di Tegal, menderita paru-paru. Ia disarankan kembali ke negerinya, yang hawanya sejuk. Tetapi ia tidak mau karena ia tetap ingin mengabdikan dirinya di Jawa. Berhubung dengan hal itu atas nasehat dokter. Moeder Augustine harus menetap di hawa yang sejuk. Satu-satunya tempat yang letaknya sejuk hawanya di daerah keuskupan Purwokerto ialah Wonosobo. Pada tanggal 10 Nopember 1930 para suster datang dan menetap di Wonosobo. Mula-mula mereka mendiami rumah sewaan dan sementara itu mendirikan MCS.
1931	<p>Pada bulan April 1931 golongan penduduk Cina di Cilacap dengan perantaraan Yu Phoa menawarkan sekolah HCS mereka kepada misi, agar misi meneruskan penyelenggaraannya. Tawaran ini diterima oleh misi.</p>
1932	<ul style="list-style-type: none"> a. Guna memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon guru, maka sekolah pendidikan guru

	<p>di Bangkong (Semarang) dipindahkan ke Poncol, dengan dilengkapi latihannya. Kini biara tersebut dikelilingi gedung-gedung: TK, SD, SMP dan SPG.</p> <p>b. Pada tanggal 5 Agustus 1932, gedung sekolah ELS susteran di Pekalongan sudah selesai dibangun, dan diresmikan penggunaannya.</p>
1933	<p>Pada tahun 1933 pastor D. Dekkers menetap di Kutoarjo. Ia membeli rumah, yang dipergunakan untuk biara susteran Darah Suci. Pada tanggal 18 Juni 1933, lima suster dari kongregasi Darah Suci datang di Kutoarjo. Untuk mewujudkan pengabdianya, pada tanggal 1 Juni mereka mulai menyelenggarakan sekolah HIS dan MCS. Sementara itu di Cilacap dibuka Sekolah Kepandaian Putri.</p>
1934	<p>Di Tegal pada tanggal 17 Agustus Bruder van Liefse membangun biara dan mendirikan sekolah HCS khusus untuk laki-laki.</p>
1935	<p>Dalam bulan Juni 1935, suster-suster OVL di Purbalingga mulai menyelenggarakan sekolah ELS.</p>
1941	<p>Seminari kecil Yogyakarta kebanjiran murid. Timbul masalah tempat. Oleh karena gedung sekolah Seminari kecil Yogyakarta tidak mampu menampung murid-murid yang ingin masuk, maka pada tahun 1941 Seminari kecil Yogyakarta dipindahkan ke Mertoyudan.</p>

Dari uraian di muka jelaslah bahwa penyelenggaraan sekolah-sekolah Katolik dilakukan oleh pastor, suster, bruder. Jenis-jenis sekolah yang didirikan ialah sekolah umum, sekolah guru, sekolah pendidikan calon Imam dan sebagainya. Perkembangan agama Katolik di Jawa Tengah tak lepas kaitannya dengan perkembangan pendidikan sekolah dan makin bertambahnya tenaga penyiari injil, baik dari misionaris asing maupun oleh apa yang disebut elite Jawa bekas

pelajar sekolah Katolik. Penyiara agama Katolik secara langsung dan tidak langsung berjalan bersama-sama.

4.1.2.3 Sekolah Swasta yang Berasaskan Islam

1) Sekolah Muhammadiyah

Salah satu sekolah swasta yang berasaskan Islam yang penting adalah sekolah swasta yang didirikan oleh pergerakan Muhammadiyah yang berpusat di Yogyakarta. Sesudah tahun 1912. Di Jawa Tengah sekolah-sekolah swasta tersebut berkembang baik antara lain di Surakarta, Pekalongan dan Semarang.

Pergerakan Muhammadiyah cabang Surakarta berdiri sejak tahun 1923, merupakan ubahan dari Sidik Amanat Tabligh Fatonah (S.A.T.F). Setelah itu disusul timbulnya kursus-kursus untuk murid-murid dengan nama Siswo Praya yang sakolah Muktamar Aisyiah di Yogyakarta tahun 1931 nama Siswa Praya diubah menjadi Nasiatul Aisyiah. Tahun 1929 Muhammadiyah cabang Surakarta mendirikan Wustha Muhammadiyah di jalan Notokusuman. Kemudian ada lagi Wustha Muslimin Muhammadiyah di Sampangan.

Sedang usaha Aisyiah dalam bidang pendidikan antara lain :

- a) H I S Putri
- b) *Nederlandsch Aisyiah School.*
- c) *Huishoudschool Aisyiah.*

Dan tahun 1932 mendirikan Madrasah Bustanul Atfal untuk tingkat kanak-kanak.

Selain di Surakarta sekolah swasta yang berasaskan Islam ini berkembang baik di daerah-daerah eks Karesidenan: Banyumas, Semarang, dan Pekalongan. Perkembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah tetap berkembang.

Pada tahun 1932 Muhammadiyah memiliki :

- 103 *Volkschool*
- 47 *Standaardschool*
- 25 *Schakelschool*

Sedangkan pada tahun 1937:

- 216 *Volkschool*
- 84 *Standaardschool*
- 116 *H I S*

Pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sekolah agama dan sekolah umum. Sekolah agama meliputi: Madrasah Bustanul Atfal (Taman Kanak-Kanak), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Muallimin dan Muallimat, dan kemudian didirikan Akademi Tabligh.

Sedangkan sekolah umum meliputi:

1. Sekolah Umum :
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar. Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas;
 2. Sekolah Kejuruan :
Sekolah Guru Agama, Sekolah Guru Umum, Sekolah Keputrian, Sekolah Guru Wanita, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Ekonomi/Dagang, Sekolah Pendidikan Jasmani dan Sekolah Kemasyarakatan. Di kemudian hari Muhammadiyah juga mendirikan berbagai perguruan tinggi.
- 2) Pendidikan Pesantren

Pondok Pesantren pada umumnya tersebar di daerah pedesaan di Jawa Tengah. Sebagian besar para santri terdiri dari anggota keluarga petani penduduk masyarakat desa setempat. Oleh karena itu pondok pesantren mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional.

Kedatangan para pedagang bangsa Barat yang ingin memaksakan monopoli perdagangannya sejak abad ke-16

sampai dengan politik eksploitasi kolonial Belanda dalam abad ke-19, maka kehidupan pesantren mengalami berbagai macam hambatan. Salah satu politik kebudayaan pemerintah kolonial yang sisa pengaruhnya masih terasa sampai sekarang ialah dalam politik pendidikan. Dengan menggunakan *Staatsblad* 1818 nomor 4 pemerintah Belanda mulai mengatur dan mengawasi kegiatan pendidikan, yang harus semuanya dengan ijin Gubernur Jendral. Pengawasan terhadap lembaga pendidikan Islam yang dinamakan *Mohammedaansche Scholen* diawasi dengan peraturan yang termaktub dalam *Staatsblad* 1905 nomor 550 kemudian diubah dengan *Staatsblad* 1925 nomor 219 yang terkenal dengan sebutan "*Goeroe Ordonnantie*". Pada umumnya para kyai atau pengasuh pesantren itu berasal dari orang yang berada, artinya sesuai dengan masyarakat agraris, mereka memiliki sawah : atau ladang yang cukup luas. Para santri bertempat tinggal di pondok-pondok milik pesantren.

Para santri ada yang datang dari daerah sekitarnya atau dari luar daerah tempat pesantren misalnya para santri di Pesantren Pabelan (Magelang) ada yang berasal dari Jember (Jawa Timur), Pekalongan dan sebagainya. Mereka membawa perbekalan sendiri, dan bila studinya berlangsung lama, para santri itu membantu menggarap sawah atau ladang milik Kyai atau tanah wakaf sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya kyai tidak memerlukan imbalan materil.

Adapun materi yang diajarkan ialah kitab suci Al Qur'an. Hadist, Fiqh, dan kadang-kadang Tasawuf (mistik). Untuk dapat menguasai materi itu, diajarkan pula bahasa Arab.

Tujuan pendidikan pesantren membentuk kader Islam, dengan jalan mengembangkan pengajaran, pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan agama Islam. Untuk membangun masyarakat dan agama berdasarkan ajaran agama Islam.

Lokasi pondok pesantren di Jawa Tengah ada yang di daerah pesisiran dan ada pula yang di daerah pedalaman. Misalnya

pesantren Berjan, terdapat di daerah Purworejo. Pondok pesantren KH. Mukhlas Panggung, terdapat di Tegal.

Berikut ini akan kami ketengahkan sebagian kecil dari pesantren-pesantren yang terdapat di daerah Jawa Tengah.

a) Pondok Pesantren Al'Asyariyah Kalibeer Mojotengah Wonosobo

Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1832 di desa Kalibeer Wonosobo. Jarak dari desa Kalibeer ke Wonosobo 4 Km. Sampai sekarang pondok tersebut tetap berlangsung terus. Ia mempunyai tanah 0,5 Hektar, gedung tempat belajar sembilan buah dan fasilitas fisik lainnya.

Waktu belajar para santri pagi, sore dan malam.

Pagi : mulai jam 05.30- sampai jam 13.00

Sore : mulai jam 16.00 sampai jam 17.00

Malam : mulai jam 18.30 sanapai jam 20.00

Materi yang dipelajari:

Pengajian kitab : - Tauhid
- Fiqh
- Tasawuf
- Hadist dan sebagainya

Ketrampilan : - pertanian
- kesenian
- olah raga

Kemasyarakatan : - dakwah

Pemimpin pengasuhnya ialah : KH. Muntaha.

b) Pondok Pesantren Berjan Purworejo

Pondok ini didirikan pada tahun 1880 oleh Kyai Haji Nawawi. Cucunya bernama Kyai Haji Nawawi Siddieq yang sejak 1947 menjabat sabagai pimpinan pondok Berjan ini. Jadi kakek dari Haji Nawawi adalah pimpinan pondok pertama, Penggantinya ialah Haji Siddieq. Pada tahun 1947 pimpinan pondok pesantren Berjan diserahkan kepada anaknya, yang bernama Kyai Haji Nawawi

Siddieq. Kyai ini adalah alumnus pondok pesantren Nirboyo di Kediri.

Pada jaman orde baru ini sistem pendidikan pondok Berjan masih bersifat tradisional. Misalnya pengajian, yang kurikulumnya dibuat sendiri oleh santri dari pondok itu. Jumlah santri ada 225 yang terdiri dari santri putra dan putri. Waktu belajar pagi hari dan malam hari untuk pengajian. Kecuali pengajian juga diajarkan ketrampilan, misalnya pertanian dan perikanan. Tujuannya agar kelak para santri dapat hidup berdikari/wiraswasta.

Status tanah dan bangunan milik perseorangan/kyai. Areal tanahnya meliputi 2 Hektar. Selain itu juga memiliki fasilitas fisik, misalnya mempunyai ruang belaiar enam ruang, asrama santri empat ruang dan mesjid satu buah. Ruang belajar dan asrama santri ini dipergunakan juga untuk ruang makan atau juga untuk ruang segala kegiatan.

Adapun tujuan pendidikan pondok pesantren Berjan ialah untuk mencetak kader muslim, atau paling tidak untuk mengenal Islam. Pondok pesantren Berjan ini juga menggalakkan transmigrasi bagi para santrinya. Mengenai masalah transmigrasi ini terdapat pada mata pelajaran lhyaul Mawat. yang mengajarkan agar para santri menghidupkan tanah-tanah mati. Di tempat-tempat baru para santri diharapkan mengajarkan agama Islam.

c) Pondok Pesantren Babakan (Tegal)

Pondok pesantren Babakan didirikan pada tahun 1916 oleh KH. Mufti di daerah Rebaksin (Tegal). Mula-mulanya hanya ada 12 orang santri kemudian bertambah sampai mencapai 75 orang.

Untuk keperluan sarana bagi perkembangan pondok Babakan oleh K.H. Mufti telah diusulkan kepada pemerintah Belanda supaya membangun stasiun kereta api. Usulnya ternyata mendapat tanggapan positif dari pihak pemerintah Belanda dengan dibangunnya sebuah

stasiun kereta api di dekat pondok pesantren Babakan. Usul tersebut sebelum terwujud juga telah mendapat dukungan dari enam buah desa sekitarnya.

Dalam masa tahun 1935--1947 jumlah santri di pesantren Babakan berjumlah kurang lebih 300 orang, yaitu setelah K.H. Mufti wafat dalam tahun 1935 kemudian pimpinan pesantren dilakukan oleh kedua orang anaknya ialah Kyai Ma'sum Mufti dan K.H. Muhammad Syafi'i.

Dalam masa revolusi fisik pesantren Babakan juga ikut mengambil kegiatan dalam perjuangan gerilya, sehingga dalam tahun 1947 pesantren tersebut dikepung oleh pasukan Belanda dan dilakukan penggrebegan. Kedua Kyai pimpinan pesantren tersebut gugur karena tembakan Belanda.

d) Pondok Pesantren K.H. Mukhlas Panggung Tegal dan Pengembangannya

H. Hasan mempunyai putra empat orang, masing-masing: Hisyam, K.H. Mukhlas, K.H. Asy'ari dan Aminah. Salah seorang dari mereka yakni K.H. Mukhlas dididik khusus untuk belajar agama Islam ke pondok pesantren Termas Jawa Timur. Selesai belajar dari sana pada waktu itu ia berusia 32 tahun, pulang ke Tegal dan mulai mengajar mengaji (tahun 1918). Pengajiannya masih bersifat umum dengan lebih banyak dititik beratkan pada pembinaan mental dan penyebaran benih-benih keagamaan. Baru pada tahun 1920, dua tahun setelah bersusah payah membina umat Islam di Tegal, ia mendirikan pondok pesantren Panggung.

Usahanya ini beliau tangani sendiri dengan bantuan partisipasi sedikit/sebagian kecil masyarakat Islam waktu itu. Bahkan adiknya sendiri K.H. Asy'ari pendiri pondok pesantren Yayasan Nurul Islam di Linggapura, masih berguru padanya.

Pada waktu K.H. Mukhlas naik haji bersama K.H. Asy'ari pada tahun 1922, pengasuh pondok pesantren Panggung

diserahkan pada K. Ramadhan dari Pekalongan dan K. Asmawi dari Banyumas. Keadaan pondok berjalan seperti biasa sampai K.H. Mukhlas pulang dari Mekkah.

Adapun perkembangan pondok terlihat sejak tahun 1922 di mana mulai didirikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah untuk menampung-makin besarnya perhatian masyarakat terhadap bidang pendidikan Islam. Dengan didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah ini dimaksudkan pelajaran umum dapat ikut diajarkan di samping pelajaran agama, juga agar sistem penyampaian pelajaran dapat lebih sistematis dan dengan lebih memperhatikan perkembangan umur anak didik. Lama belajar Madrasah ini 7 tahun dengan diawali klas nol. Yang belajar di Madrasah ini umumnya anak-anak orang biasa yang tidak diterima di sekolah Belanda. Kepada murid-murid juga diberikan extra class berupa pendidikan kependuan. Organisasi kependuan yang ada pada waktu itu ialah Anis (Ansor Islam).

Masa jaya Pondok Pesantren Panggung ini kurang lebih 1932, murid/santri pondok sampai berjumlah kurang lebih 500 orang berdatangan dari luar dan dalam daerah, bahkan ada santri dari Singapura dan sebagian lagi dari daerah Purwokerto, Banyumas, Brebes, dan lain-lain.

(1) Sistem Pendidikan

Melihat perkembangan dan kebutuhan masyarakat apalagi sesudah jaman kemerdekaan banyak anak bumi putra yang sudah dapat memasuki sekolah umum, sedang mereka akan pendidikan agama Islam maka untuk menampung mereka, didirikanlah Madrasah Diniyah Islamiyah yang masuk sore hari. Lama belajar 5 tahun sedang muridnya dari beberapa Sekolah Umum. Jadi Lembaga pendidikan Yang ada dalam pondok sekarang adalah :

- (a) Pondok Pesantren sebagai induk

- (b.) Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah
- (c.) Madrasah Diniyah Islamiyah

Adapun sistem pendidikan dalam pondok Pesantren sebagai umumnya pondok yang ada, Kyai secara langsung berhadapan dengan santri satu per satu. Kyai adalah guru tunggal yang pelajaran-pelajaran dalam segala macam cabang ilmu agama.

Biasanya santri yang dipandang paling pandai diberi tugas oleh Kyai untuk menularkan ilmunya kepada santri-santri yang lebih rendah tingkatannya. Hampir mirip dengan sistem pendidikan College di Eropa pada abad ke-15. Santri-santri di pondok mempunyai kelompok-kelompok diskusi yang setiap saat mereka dapat belajar bersama, memecahkan masalah keagamaan atau masalah lain yang ada hubungannya dengan kehidupan dalam Pondok Pesantren. Jika mereka menemukan persoalan yang tidak dapat dipecahkan, mereka dapat mengajukan masalahnya pada santri yang lebih pandai, dan bila belum mendapat jawaban yang memuaskan maka langsung masalah tersebut disampaikan kepada Kyai. Sistem belajar bersama dalam Pondok sangat diutamakan, di mana mereka saling menerima dan saling memberi.

Untuk jelasnya dapat kita lihat pada ikhtisar sebagai berikut :



Jadi secara umum di kompleks pondok dipakai 3 sistem pendidikan yaitu:

- (a) Pendidikan langsung perorangan (Kyai mengajar seorang-seorang).
- (b) Pengajian umum (Kyai menghadapi orang banyak sekaligus).
- (c) Pendidikan klasikal (Kyai dan para guru menghadapi santri sesuai dengan kelas santri).

Catatan:

- sistem pertama berdasar kemampuan masing-masing santri dalam menguasai berbagai kitab.
- Sistem kedua membahas satu atau dua judul/materi terus menerus sampai tamat.
- Sistem ketiga dipakai di Madrasah.

(2) Pengelolaan Pondok serta Pembiayaannya

Bila kita membicarakan pondok, kita tidak dapat melupakan faktor Kyai yang menentukan hidup matinya pondok. Begitu, juga keadaan Pondok Pesantren Panggung. Setelah makin berkembangnya madrasah-madrasah lain di Tegal, lebih-lebih setelah K.H. Mukhlas wafat pada tahun 1964 keadaan pondok mulai menurun, daya tarik pondok terhadap masyarakat berkurang. Namun demikian sebagian anggota masyarakat yang masih cinta pada pondok tidak tinggal diam. Banyak alumni Pondok yang berusaha untuk memajukan kembali Pondok Pesantren Panggung sekarang ini secara bergilir diasuh oleh KH. Hisyam, KH. Asy'ari, K. Sa'id, K. Abdul Jamil, K. Abdul Wahid, BA, Ustadz Solehul Hadi dan Drs. Qomaruzzaman.

Mereka berusaha memajukan pondok, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan Usaha selanjutnya atas inisiatif KH. Asy'ari adik almarhum KH. Mukhlas, Pondok Pesantren Panggung akan dijadikan

perwakilan dari yayasan Nurul Islam yang berpusat di Linggapura, di mana mereka membuka pondok dan yayasan tersebut. Yayasan ini sendiri dikembangkan tidak hanya untuk daerah Tegal saja, tetapi seluruh Indonesia guna ikut memajukan pendidikan Islam khususnya pondok-pondok. Demikian menurut rencana yang sebenarnya telah diputuskan sejak tahun 1942 bersama Prof. Kahar Muzahkir, K. Zamhuri dan Bapak Notosuwiryo.

Adapun pembiayaan pondok pesantren Panggung sejak berdirinya dipikul oleh KH. Mukhlas sendiri bersama masyarakat setempat (di samping tanah wakaf yang ada). Para santri dipungut sumbangan suka rela, karena kekurangan pembiayaan terutama dalam pengembangan pembangunan, maka pada tahun 1928 KH. Mukhlas mengutus KH. Bisri ke Singapura untuk mencari dan pada bekas murid (Santrinya Hasil usaha KH. Bisri ini sepenuhnya dipergunakan untuk pengembangan bangunan gedung yang sekarang dipakai untuk gedung Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah.

Sekarang ini donatur tidak ada. Para santri secara sukarela ditarik Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tetapi ini saja banyak santri tidak mampu membayar. Bantuan dari pemerintah baru berupa uang sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sebagai gedung **workshop**, dan bantuan alat ketrampilan. Antara lain pertukangan, penjahitan dan perajutan.

- (3) Hasil Pendidikan yang ada, Dharma Bakti Kemasyarakatan dan Kegiatan Pondok Sekarang

Pondok pensantren Panggung pada zaman perang sebagai pusat pembinaan kader pembela tanah air. Banyak para santri yang menggabungkan diri dengan kesatuan Hisbullah. Pada tahun 1947 Pondok

pesantren Panggung menjadi sasaran dan terkena kanon Belanda, hingga sebagian bangunan Pondok tidak dapat ditempati. Mengingat situasi yang gawat terpaksa KH Mukhlis hijrah ke Kediri untuk sementara waktu.

Sebelum kemerdekaan, hasil yang nyata dari pondok pesantren lebih banyak mencetak kader Ummat dan Kyai yang kebanyakan menerjunkan diri ke bidang Pendidikan. Seperti K. Sa'id di Pekalongan sampai sekarang masih menjadi guru di Mualim Pekajangan, Ustadz Muhiddin, Ustadz Gufron, Ustadz Masduki dan lain-lain.

Di antara para alumni santri pondok pesantren Panggung yang sampai sekarang membuka pengajian sendiri, adapun yang lama mengajar di Madrasah sekali pun tidak dengan gaji yang sepatutnya. Di antara yang menonjol adalah KH. Asy'ari (pendiri yayasan Nurul Islam) di Linggapura pada tahun 1959. Sampai sekarang yayasan tersebut maju dengan pesat, di sampiug pondok pesantren juga didirikan PGA 6 tahun, madrasah, pendidikan ketrampilan seperti: penjahitan, gunting rambut, pertukangan, perkoperasian dan sebagainya. Tidak sia-sia beliau dalam mengajukan kemajuan yayasan yang dipimpinnya di mana sejak tahun 1935 telah banyak membuahkan hasil yang sangat berguna bagi masyarakat sekitarnya.

Putra-putri beliau sendiri dibagi ke berbagai jurusan dalam melanjutkan studinya, ada yang telah berhasil sebagai dokter, sarjana Farmasi, sarjana IAIN, dan insinyur. Sesudah kemerdekaan para santri Pondok pesantren Panggung kebanyakan para pelajar yang pagi harinya memasuki Sekolah Menengah Umum atau SLA dan SLP. Tetapi kebanyakan mereka tidak menetap di Pondok melainkan pulang ke rumah masing-masing.

Dengan demikian Dharma Bhakti Kemasyarakatan dari pondok pesantren Panggung telah benar-benar dirasakan oleh sebagian masyarakat yang dekat maupun jauh. Terasa benar berkat pembinaan mental keagamaan para santri-santrinya.

Usaha dan kegiatan sejenis, kini terus dilakukan hanya sangat disayangkan karena pengaruh situasi perkotaan menyerap dukungan bagi kemajuan pondok.

Kegiatan yang masih terus dijalankan antara lain :

- (a) Pengajian rutin setiap pagi diasuh oleh KH. Hisyam.
- (b) Pengajian setiap malam Jum'at diasuh K. Sa'id.
- (c) Madrasah Ibtidaiyah-Islamiah dipimpin oleh Ustadz Ma'nor.
- (d) Madrasah Diniyah Islamiah dipimpin/diasuh oleh Ustadz Mukhiddin'
- (e) Memeriahkan hari besar Islam
- (f) Pendidikan Ketrampilan setiap hari Minggu.

Disayangkan sebagian besar yang meramaikan pondok adalah orang-orang tua dan santri yang menetap terhitung minim.

(4) Sebab-sebab Kemunduran

Kesulitan yang dihadapi hingga kemajuan pondok belum pulih kembali antara lain :

- (a) Tidak adanya sumber dana yang tetap untuk menampung Kyai yang hendak menetap di sana.
- (b) Belum adanya kader penerus yang tangguh dari lingkungan keluarga almarhum.
- (c) Situasi sekitar sebagai kota dagang telah menyeret pada kepentingan duniawi (gairah menunjang pondok mendingin).

Kecuali itu keadaan umum yang terlalu menggantungkan pada Kyai sebagai pusat segalanya, setelah Kyai wafat membuat goncangan yang lama. Juga selera, untuk menjadi Kyai, lebih-lebih memimpin Pondok pesantren dirasakan sebagai tugas yang berat. Lowongan Kyai selalu lama tak terisi, lebih-lebih bagi pelamar muda. Kemunduran pondok tersebut benar-benar sebagai kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya. Kita prihatin justru pada saat adanya keperluan dan kesempatan untuk tetap ada serta memajukan diri terbuka lebar, justru di saat itu pula kemampuan untuk bangkit belum ada.

Saat sekarang ini di mana kelebihan sistem pondok dalam pembinaan kepr:lbadian diakui, sekarang ini pula dimana perhatian untuk memajukan pondok dengan peningkatan pendidikan ketrampilan diberikan oleh pemerintah di samping upayanya menyempurnakan yang lain dijalankan, pondok seolah-olah masih mengunci diri dalam kelelapan. Apakah demikian sebenarnya suara hati para pengasuh dan masyarakat sekitar yang sadar? Artinya tidak mau tahu terhadap kemajuan kembali Pondok? Sungguh sebaliknya.

Keinginan untuk maju kembali tetap besar. Kesadaran untuk tetap ada dan arti penting dari adanya tetap dimiliki. Kenyatannya bahwa keadaan seperti sekarang ini sangat merugikan masyarakat juga dari sepenuhnya

(5) Akibat Kemunduran bagi Masyarakat Sekitar

Di antara kerugian masyarakat akibat kemunduran-kemunduran pondok ialah :

- (a) Terhentinya pengkaderan (produk Kyai) secara khusus untuk mengganti tenaga yang sudah tua,

atau pun untuk mengimbangi bertambahnya tempat ibadah dan dorongan orang dewasa maupun anak-anak untuk belajar agama secara Privat.

- (b) Tempat yang telah tersedia dengan baik kurang pemanfaatannya hingga hasilnya tidak maksimal.
 - (c) Dikhawatirkan khususnya bagi para pemuda akan kehilangan perhatian atau pun minat untuk menjadi pemuka agama
 - (d) Dikhawatirkan pula motivasi bagi kalangan keluarga almarhum KH. Mukhlas untuk meneruskan rintisan beliau menurun bila terlalu lama tak dapat tertembus upaya membangkitkan kembali.
- (6) Usaha-usaha untuk Memajukannya

Menyadari akan arti penting dalam majunya Pondok Pesantren, maka masyarakat sekitar terundang untuk berusaha memajukannya kembali. Dari kalangan alumni santri Pondok serta keluarganya almarhum tidak bosan mengusahakannya. Seperti kami sebutkan di atas ada niatan untuk menjadikan Pesantren Panggung sebagai perwakilan dari yayasan Nurul Islam Linggapura.

Dan kami sadari sebagian masalahnya di luar jangkauan pondok, karena menyangkut dana yang besar dan rutin. Adapun usaha yang dilakukan ialah :

- (a) Membicarakan dengan para tokoh masyarakat untuk membangkitkan kembali minat terhadap kemajuan pondok.
- (b) Membicarakan di forum pengajian umum maupun subuh agar menjadi permasalahan ummat kembali dan dijaga eksistensinya.

- (c) Menyampaikan kepada pihak atasan (Depag RI) sebagai laporan selama upaya tersebut belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

(7) Kesimpulan dan Saran/Permohonan

Demikianlah secara ringkas keadaan Pondok Pesantren Panggung sekarang ini. Kesimpulan kami secara ringkas adalah:

- a). Motivasi diadakannya Pondok Pesantren Panggung masih ada di kalangan keluarga dan masyarakat sekitar.
- b). Minat mengajukan masih ada, hanya terbentur oleh biaya, oleh karena itu perlu pemupukan dan pemecahan.
- c). Sarana yang ada perlu direhabilitasi di samping pemeliharaan.
- d). Kelebihan sistem Pondok masih melembaga di hati masyarakat di samping peningkatan ketrampilan guna bekal para santri yang telah selesai untuk terjun sebagai warga masyarakat dan tokoh di lingkungannya.
- e). Sebagai jalan keluar pondok masih sangat diharapkan sebagai penjaga dan penerus kelestarian Dinul Islam. Juga sebagai tenaga pembangunan terpercaya pada era pembangunan sekarang ini.
- f). Perlu diambil langkah nyata untuk menopang para pengasuh khususnya Kyai yang akan memokokinya.

Dalam pemeliharaan ini lebih lanjut ketergantungan yang memusat pada diri Kyai sebagai pimpinan Pondok, perlu disalurkan dengan menyertakan calon penerus, hingga sewaktu-waktu tidak menimbulkan kegoncangan dan kekosongan pemimpin.

e) Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan

Pondok Pesantren Pabelan terletak di kecamatan Mungkid, kabupaten Magelang, 12 km sebelah selatan kota Magelang dan berada 1 km dari jalan raya yang menghubungkan Yogyakarta - Magelang. Pondok Pabelan didirikan oleh Kyai Raden Muhammad Ali tahun 1800. Beliau juga dianggap sebagai cikal bakal desa Pabelan.

Seperti halnya beberapa pondok pesantren yang lain, pondok pesantren Pabelan juga pernah mengalami pasang surut, karena perubahan politik atau pun peperangan. Dalam masa perang Diponegoro kegiatan pondok Pabelan dapat dikatakan terhenti. Pada waktu itu yang mengasuh pondok tersebut ialah Putra Kyai Muhammad Ali yang bernama Kyai Imam. Seluruh keluarga Kyai dan para santri pondok Pabelan adalah pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Diceritakan bahwa salah satu istri Kyai Mojo juga berasal dari desa Pabelan.

Ketika Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda banyak pengikut beliau menyelamatkan diri, termasuk Kyai Imam dan keluarganya yang meninggalkan desa Pabelan menuju ke desa Dongkelan Yogyakarta. Hanya salah seorang putra Kyai Imam yang bernama Kyai Hamdani masih tetap tinggal di Pabelan dan terus mengasuh pondok tersebut dengan sisa-sisa santri yang masih ada. Sesudah itu keadaan pesantren makin lama makin mundur dan nyaris tidak ada riwayatnya lagi.

Dalam masa kekosongan itu kemudian muncul salah seorang keturunan Kyai Muhamad Ali yang bernama Kyai Anwar mulai masa sebelum kedatangan tentara Jepang di Indonesia. Kyai Anwar berusaha menghidupkan kembali pondok yang pernah ramai itu. Usahanya, dibantu oleh menantunya Kyai Ansor. Kyai Anwar yang merintis menghidupkan kembali pesantren Pabelan dan Kyai Ansor yang kemudian mengembangkan dan

membimbingnya. Pada waktu itu ada tiga buah pondok yang masing-masing dipimpin dan diasuh oleh seorang Kyai, yaitu :

- 1). Pondok Pabelan Tengah, dipimpin oleh Kyai Anwar dan kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Kyai Kholib yang sampai tahun 1980 masih hidup dan menjadi Iman mesjid Pabelan.
- 2). Pondok Pabelan Timur, pengasuh Kyai Ansor Pengajiannya yang diutamakan di sini ialah pengajian Bahasa Arab atau sering dikenal sebagai ilmu alat (ilmu Nahwu dan Shorofy)
- 3). Pondok Pabelan Barat, yang dikenal sebagai "Pondok. Tafsir".

Meskipun ada tiga buah pondok bukan berarti bahwa masing-masing pondok berdiri sendiri, tetapi ketiganya merupakan satu kesatuan. Para santri umumnya berguru, ia mengaji kepada ketiga kyai tersebut.

Sejak jaman perang gerilya Pondok pesantren seolah-olah mengalami masa kekosongan. Kemudian dalam pertengahan tahun 1965 terbentuklah sebuah wadah persatuan masyarakat desa Pabelan berupa Badan Pemeliharaan Tradisi Islam Pabelan (PTIP) dan Persatuan Pemuda Pabelan (P3). Setelah kedatangan Kyai Hamam Dja'far yang baru pulang dari pondok di Jawa Timur yang waktu itu baru berusia 25 tahun, mulailah dilakukan usaha memperbaiki keadaan pondok. Peresmian pembukaan pondok Pesantren Pabelan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 1965 dan pada tanggal 31 Agustus 1965 dibentuklah Badan Wakaf Pondok Pabelan yang anggota-anggotanya terdiri para tokoh masyarakat dan pamong desa Pabelan. Pondok dan kemudian diberi nama baru yaitu *Balai Pendidikan Pondok Pabelan* dengan dasar pendidikannya disebut *Kulliyatul Mu'alliftnien Alislamiyah*.

Pondok Pabelan lebih mengutamakan pendidikan dari pada pengajaran dan mempergunakan jiwa pendidikan pondok sebagai landasan, yakni: keikhlasan, kesederhanaan, kebebasan, menolong diri sendiri dan ukhuwah dinniyah.

Arah dan tujuan pendidikan di Pondok, Pabelan adalah kemasyarakatan, latihan hidup sederhana, tidak berorientasi kepada salah satu golongan dan niatnya semata-mata untuk beribadah, bukan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai. Karena itu pendidikan ahlaq dan pembentukan karakter sangat diutamakan. Sedang pelajarannya diselenggarakan dengan sistem sekolah, dengan menggunakan metodik dan didaktik baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan kepramukaan juga diwajibkan diikuti oleh semua santri dan sengaja untuk mendidik kader, sehingga diharapkan apabila para santri pulang ke daerahnya memiliki kemampuan untuk merintis dan mengembangkan kepramukaan di daerahnya.

Di samping itu juga diberikan pendidikan ketrampilan yang meliputi :

- 1). Pertanian
- 2). Pertukangan
- 3). Perbengkelan
- 4). Kerajinan
- 5). Elektronika/Radio
- 6). Fotografi
- 1). PKK
- 8). Administrasi & Management
- 9). Perkoperasian
- 10). Perpustakaan.

Untuk mendidik asisten pelatih dalam kegiatan ketrampilan ini, Pondok Pabelan telah mengirimkan

beberapa orang santri seniornya untuk mengikuti latihan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, Departemen Pertanian, Direktorat Koperasi. Di samping itu juga diadakan latihan calon instruktur yang diadakan oleh pihak Pabelan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, seperti: LP3ES Jakarta, PLK Yogyakarta dan Semarang, Pusat Kerajinan Bambu RIDAKA Pekalongan, SPIK Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan kerajinan serta Dinas Perburuhan kabupaten Magelang dan lain-lainnya.

Catatan mengenai jumlah guru dan santri Pondok Pabelan, menurut keadaan tahun 1979 1980 adalah sebagai berikut :

Anggota Majelis Guru Kulliyatul Mu'allimien Al-Islamiah (KMI) Pondok Pesantren Pabelan berjumlah 60 orang terdiri dari 48 orang guru pria dan 12 wanita. Dari jumlah tersebut 45 orang di antaranya bertempat tinggal di Pesantren

Sebagian besar para guru tersebut berasal dari alumni Pondok Pesantren Pabelan sendiri, sedang yang lain adalah: Dosen/Mahasiswa IAIN Yogyakarta, IAIN Semarang, IKIP Negeri Yogyakarta, UGM, UII, serta alumni pondok modern Gontor, Tebuireng dan Termas.

Jumlah para santri ada 971 orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dari Aceh sampai Timor Timur. Mereka terdiri dari 663 santri putra dan 308 santri putri yang berasal dari keluarga: petani (32,5%), pedagang (31,4%), pegawai (30,7%), swasta/buruh (1,7%), pamong desa (1,7%), kyai (1%).

**JADWAL KEGIATAN SANTRI PONDOK PESANTREN
PABELAN**

Jam	Kegiatan
04.00 (menjelang subuh)	Semua Santri dibangunkan untuk persiapan menunaikan Jama'ah subuh.
05.00 - 07.00	Senam pagi dan olah raga. Bagi santri yang belum lancar membaca Alqur'an diharuskan mengaji kepada kyai (satu per satu - sorogan):
07.00 - 07.25	Makan pagi.
07.30.- 13.00	Belajar di kelas.
13.00 - 14.00	Berjema'ah dhuhur, makan siang
14.00 - 15.30	Kursus sore (khusus untuk bahasa Arab dan Inggris).
16.00 - 17.30	Olah Raga.
17.40 - 18.15	Persiapan untuk berjema'ah Maghrib.
18.15 - 19.00	Jema'ah Maghrib, Membaca Al Qur'an bersama-sama (semua santri).
19.00 - 20.00	Makan sore, Jema'ah Isya dan persiapan untuk belajar wajib.
20.00 - 21.00	Belaiar wajib.
21.30	Persiapan untuk tidur.

4.1.2.4 Sekolah Swasta yang Berasas Kebangsaan atau Asas Non Agama

Seperti telah disebutkan di atas bahwa bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia, timbullah berbagai organisasi sosial maupun politik, organisasi pemuda dan lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini merupakan tekad dan usaha bangsa Indonesia untuk mendidik bangsa sendiri guna mempersiapkan hari depan di alam merdeka.

Dalam bagian ini diuraikan beberapa sekolah yang berasaskan kebangsaan yang terdapat di Jawa Tengah-, sejauh dapat dilacak kembali, karena banyak di antaranya dibubarkan, baik karena dilarang oleh Pemerintah Kolonial, atau karena biaya tidak mencukupi, atau karena telah tercapai cita-cita memperoleh kemerdekaan, di mana pendidikan bersifat demokratis terbuka untuk semua orang.

Termasuk dalam kelompok ini adalah sekolah swasta lain yang tidak berasaskan agama.

1) Sekolah Kartini, dan Pendidikan Wanita yang diilhaminya

Sekolah Kartini didirikan sebagai pelaksana cita-citanya tak sempat dilaksanakannya sendiri semasa hidupnya, menyelenggarakan pendidikan untuk wanita Indonesia. Putri Bupati yang penuh kesadaran untuk memajukan bangsanya ini hanya sempat merintis pendidikan anak-anak perempuan di lingkungan pegawai Kabupaten Jepara dalam suasana kekeluargaan, pada tahun 1903. Pendidikan diadakan di ruang belakang Kabupaten, bersifat non formal. Pelajaran yang diberikan adalah ketrampilan kerumahtanggaan, seperti memasak, menjahit, membatik, adat sopan santun dalam keluarga, nilai-nilai moral, bahasa Belanda dan lainlain, yang kesemuanya ditanamkan dengan penuh cinta kasih. Tiga adik Kartini, Rukmini, Kardinah dan Sumatri. Kartini tidak sempat memimpinya karena harus mengikuti suaminya yang menjabat Bupati Rembang. Namun

sekolah perintis yang sangat membahagiakan anak-anak dan guru-gurunya ini terpaksa dibubarkan pada tahun 1905, akibat musibah berturut-turut dengan wafatnya Kartini tahun 1904, kemudian menyusul ayahandanya: Bupati Sosroningrat tahun 1905.

Ide Kartini tentang pendidikan wanita menyentuh hati para pendukung Politik Etika dan sahabat-sahabat Kartini antara lain suami istri Ch. Abendanon, Direktur Pengajaran, Agama dan Perindustrian/Kerajinan. Berdua mereka membentuk Kartini-fonds di Den Haag, suatu yasan untuk mencari dana bagi pendirian sekolah wanita di Jawa. Tahun 1912 lulus angkatan pertama sebanyak 13 anak tahun berikut meningkat dua kali. Sekolah tersebut kini terletak di jalan Dr. Cipto dan menjadi SD Negeri Kartini Semarang. Gedung sekolah Kartini kemudian berkembang di kota-kota lain seperti Jakarta, Madiun, Malang, Cirebon, Bogor, Surabaya. Di Jawa Tengah sekolahsekolah Kartini terdapat di Pekalongan, Semarang, Rembang, Jepara. Gerakan pembangunan sekolah-sekolah wanita membawa pengaruh kebanggaan kesadaran wanita di mana pun. Banyak sekolah-sekolah wanita didirikan di Jawa meskipun tidak memakai Kartini. Di Jawa Tengah misalnya "Wismo Pronowo" di Tegal yang didirikan oleh Kardinah adik Kartini. Sekolah ini khusus untuk anak-anak perempuan dari desa, dengan pelajaran yang serupa dengan Sekolah Kartini. Beliau juga mendirikan sekolah untuk perawat dan bidan dengan rumah sakit tersendiri. Rumah sakit tersebut kini bernama R.S. Kardinah di Tegal. Di Pemalang terdapat Sekolah Islam untuk putri "Wanita Susilo", di Pati Sekolah "Budi Utomo", di Blora "Darmorini", dan *Kweekschool* Katolik Wanita di Mendut.

Akibat perkembangan ini jumlah murid-murid wanita di semua jenis sekolah terus bertambah. Wanita lulusan sekolah banyak yang bekerja di luar rumah.

2) Sekolah Van Deventer

Anak-anak perempuan yang telah menyelesaikan S.D. di Sekolah-sekolah wanita perlu mengembangkan lebih lanjut ilmu ketrampilan wanita dan rumah tangga. Di samping itu makin dibutuhkan banyak guru ketrampilan wanita untuk sekolah-sekolah wanita. Maka oleh Yayasan van Deventer di Den Haag didirikan sekolah van Deventer (*van Deventer School*) pada tahun 1912. Pertama kali di Semarang didirikan sekolah van Deventer yang menempati gedung sekolah di *Genielaan* (kini jalan Tanjung). Kemudian dibuatkan gedung yang lebih baik di Candi Baru 71 (kini jalan Sultan Agung). Sekarang gedung tersebut menjadi S.G.A. Negeri Semarang. Sekolah van Deventer setingkat dengan sekolah guru 4 tahun (*Kweekschool*). Lulusan sekolah ini dapat menjadi guru Taman Kanak-Kanak dan S.D. untuk wanita.

Sekolah ini dilengkapi dengan asrama dan, dipimpin oleh direktis yang pertama Ny. Volkers. Guru-guru hampir seluruhnya orang Belanda, tetapi murid-murid seluruhnya orang Indonesia.

Asas dan tujuan sekolah van Deventer pada dasarnya sama dengan Politik Etika dan cita-cita Kartini, yaitu atas dasar perikemanusiaan, meningkatkan pendidikan wanita demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa tanpa meninggalkan kepribadian Indonesia sendiri. Pada jaman pendudukan Jepang tahun 1942 sekolah-sekolah Kartini dan van Deventer terpaksa ditutup. Setelah jaman kemerdekaan, karena pembiayaan sangat besar, sekolah-sekolah tersebut diintegrasikan menjadi sekolah negeri, kecuali sekolah Kartini di Jakarta yang tetap berdiri.

3) Sekolah Taman Siswa

Salah satu lembaga pendidikan yang diciptakan oleh Pergerakan Nasional yang paling utama ialah Pendidikan Taman Siswa. Didirikan pada tahun 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendiri Indische

Partij. Taman Siswa adalah perwujudan semangat nasionalisme di bidang pendidikan. Di Sekolah inilah generasi muda dipersiapkan, dikembangkan pribadinya agar menjadi manusia merdeka, dapat berdiri sendiri dan berpijak pada kebudayaan bangsa sendiri, yang menjadi sumber hidupnya.

a) Asas dan Tujuan

Sesuai dengan semangat nasionalisme, asas dan tujuan perguruan Taman Siswa pada pokoknya adalah:

- (1) menyelenggarakan pendidikan dengan sistem among, supaya anak didik dapat tumbuh menurut kodrat, tanpa paksaan.
- (2) menjadikan anak didik manusia yang merdeka lahir dan batin dengan tetap memelihara tertib masyarakat dan dapat berdiri sendiri.
- (3) menekankan pendidikan untuk rakyat banyak.
- (4) berpijak kepada adat dan kebudayaan sendiri, yang sesuai untuk bangsa sendiri.
- (5) mengusahakan pendidikan dengan kekuatan sendiri.

b) Struktur Sekolah Taman Siswa

Taman Siswa terdiri dari suatu Badan Pusat yang disebut Majelis Luhur Taman Siswa di Yogyakarta. Pengaruh badan pusat ini dipengaruhi oleh Konggres, dari cabang-cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia.

Cabang-cabang di daerah menyelenggarakan pendidikan secara otonom dengan memegang prinsip-prinsip Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa segera mendapat tanggapan yang sangat positif dari semua kalangan pergerakan nasional Banyak sekali pemuka dan guru-guru muda mengajukan diri menjadi guru dan mendirikan sekolah-sekolah di

daerah-daerah di seluruh Jawa juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Pendidikan formal modern yang mengambil sebagian sistem Barat tetapi menggunakan asas pendidikan Timur ini nampak sangat dekat dengan rakyat.

Dalam waktu satu windu Sekolah Taman Siswa telah mencapai 52 buah dengan jumlah murid 6.500 orang. Tahun 1930 1 Jawa Tengah terdapat sembilan. Perguruan Taman Siswa, yaitu di Tegal, Pemalang, Slawi, Kroya, Magelang, Godean, Pedan, Surakarta. Pada tahun 1924 jumlah meningkat menjadi 42 cabang.

4) Sekolah Serikat Islam

Seperti diketahui, Serikat Islam sebagai organisasi massa pertama di Indonesia mendapat dukungan yang sangat kuat dari rakyat banyak, baik di kota-kota maupun di pedesaan, justru karena dasar yang dipakai adalah Islam, agama mayoritas rakyat. Namun karena sifat massal, yang diraih dalam waktu yang pendek, banyak orang yang mempergunakan Serikat Islam untuk memasukkan ideologi lain. Salah satu di antaranya ialah marxisme/ Komunisme. Ideologi ini masuk ke beberapa cabang Serikat Islam terutama di daerah Semarang, di mana tokoh-tokoh golongan Komunis seperti Semaun, Tan Malaka, Sneevliet tinggal. Tan Malaka yang mengusulkan pendiriannya Sekolah Serikat Islam untuk anak-anak anggota Serikat Islam, agar dapat menanamkan cita-cita mereka kepada generasi muda. Usul tersebut disetujui, dan tahun 1921 Sekolah Serikat Islam dibuka di Semarang. Sekolah ini dipimpin langsung oleh Tan Malaka dan berhaluan Marxis. Murid pertama berjumlah 50 orang.

a) Asas dan tujuan :

Asas-asas yang dipakai adalah :

- 1). kebebasan jiwa pada anak didik, agar kelak menjadi manusia yang kreatif, dapat berdiri sendiri.
 - 2). membela rakyat kecil yang nasibnya sengsara karena sistem Kapitalisme.
 - 3). dasar kebudayaan asli Indonesia.
- b) Struktur Sekolah Serikat Islam

Sekolah-sekolah Serikat Islam di bawah-partai Serikat Islam, tetapi mempunyai otonomi penuh dalam pengelolaannya. Sekolah ini tidak mengikuti kurikulum dan jadwal yang tetap dan seragam seperti sekolah formal yang lazim. Murid diberi kebebasan memilih sendiri pelajaran dan caranya belajar. Jenis mata pelajaran adalah membaca, menulis, berhitung, melukis, bahasa Melayu, Belanda dan sebagainya. murid-murid juga dibimbing untuk hidup bermasyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok bermain, bekerja, belajar. Juga dikembangkan aktifitas berorganisasi, berpidato, berdiskusi dan sebagainya agar anak berkembang menjadi yang dapat memimpin. Guru-guru tidak memberi pelajaran, hanya menuntun saja. Jadi pada pokoknya Sekolah Serikat Islam lebih merupakan pendidikan kader untuk para organisasi Marxist di kemudian hari. Tidaklah mengherankan apabila Residen Semarang menghalangi berkembangnya sekolah Serikat Islam. Murid-murid cari sokongan untuk sekolahnya dari masyarakat luas yang bersimpati kepada pendidikan tersebut.

Akhirnya Tan Malaka karena kegiatan politiknya dibuang Pemerintah Kolonial ke negeri Belanda tahun 1922, pada waktunya sekolahnya telah tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 12 buah dan mempunyai murid 3.000 orang. Pada tahun 1924 bersamaan dengan pecahnya Serikat Islam menjadi

Serikat Rakyat dan Serikat Islam, maka sekolah-sekolah Serikat Islam banyak ditutup, baik karena tindakan Pemerintah Kolonial menjadi Sekolah Rakyat. Ada pula sekolah yang diserahkan kepada Taman Siswa.

4.3 Pendidikan Masa Jepang (1942–1945)

Dalam Perang Dunia II pada tahun 1942 Jepang berhasil mengalahkan Belanda di Indonesia dan menduduki seluruh kepulauan Indonesia. Salah satu langkah pertama Jepang ialah menghilangkan sedapat mungkin pengaruh Barat/ Belanda dan sebaliknya menanamkan,,kebudayaan Jepang. Kebudayaan Indonesia asli juga ditampilkan untuk menarik bangsa Indonesia ke pihak Jepang dalam perang melawan Sekutu, Bahasa Belanda dilarang dan orang harus berbicara dengan bahasa Indonesia. Demikian pula dengan segala sesuatu yang berbau Belanda. Untuk mencapai maksud tersebut seluruh sekolah ditutup untuk sementara.

Di bidang pendidikan, Jepang mengadakan reorganisasi besar-besaran. Sistem dualisme dalam persekolahan yang selama ini dipertahankan Belanda oleh Jepang dihapus dan disederhanakan. Hanya ada satu jenis sekolah rendah, dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia yang dinamakan Sekolah Rakyat enam tahun (*Kokumin Gakko*).

Sekolah Desa yang hanya tiga tahun untuk sementara dibiarkan demikian. Semua anak dari semua golongan, juga anak Cina boleh masuk Sekolah Rakyat. Tanggal 1 April 1942 Sekolah Rakyat Negeri dibuka kembali. Kemudian juga sekolah swasta. Tanggal 1 Juli 1942 sekolah lanjutan pertama dan tinggi dibuka.

Semua sekolah lanjutan umum menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP. atau *Shoto Chu Gakko*), dan Sekolah Lanjutan Atas (A.M.S., H.B.S.) menjadi Sekolah Menengah Tinggi (S.M.T. atau *Koto Chu Gakko*), juga terbuka untuk umum. Untuk S.M.P. diadakan pemisahan antara putra dan putri, sedang S.M.T. tetap dicampur. Di sektor sekolah kejuruan dibuka Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah

Guru Laki-laki dan Sekolah Guru Putri. Sekolah Guru ada 3 jenis yaitu:

Sekolah Guru 2 tahun (*Syoto Sihan Gakko*).

Sekolah Guru 4 tahun (*Guto Sihan Gakko*).

Sekolah Guru 6 tahun (*Koto Sihan Gakko*).

Sekolah Pendidikan Tehnik menjadi Sekolah Pertukangan. Tentang penempatan guru dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Di Sekolah rakyat ditempatkan guru-guru, pemegang ijazah *Normaalschool* (NS) dan *Kweekschool* (KS).
2. Di Sekolah menengah bagian pertama, diangkat guru-guru, pemegang ijazah *Kweekschool* (KS), *Hollandsch. Inlandsche Kweekschool* (H.I.K), *Hogere Kweekschool* (H.K.S) dan *Hoofdacte cursus* (H.A.C.)
3. Untuk sekolah menengah tingkat tinggi, diangkat guru-guru, pemegang H.A.C dan bekas mahasiswa perguruan tinggi dan tenaga akademis.
4. Untuk sekolah Kepandaian Putri ditempatkan guru-guru pemegang *ijasah Middelbare vakschool* dan K.S. Sekolah Guru Laki-laki atau Putri pimpinannya diserahkan kepada seorang pemegang ijazah H.A.C, susunan guru seperti pada S.M.P.
5. Di sekolah Pertukangan tenaga mengajar terdiri dari guru-guru vak pemegang ijazah *Technische school* dan guru-guru vak umum: pemegang ijazah H.I.K. dan praktikum diserahkan kepada tenaga pengalaman keluaran sekolah pertukangan.

Dapat dicatat bahwa pada waktu itu guru mendapat tugas mengajar yang berat. Dari tenaga guru umum guru-guru di sekolah lanjutan ditingkatkan menjadi guru-guru vak. Semua harus belajar sendiri untuk meningkatkan diri, tanpa pembinaan, dengan alat yang terbatas.

Tentang rencana pelajaran secara umum dapat diterangkan : mengikuti rencana pelajaran sebelum perang dengan penyesuaian dan penyederhanaan.

Termasuk penyesuaian di antaranya :

1. bahasa pengantar dijadikan satu saja yaitu bahasa Indonesia;
2. semua buku pelajaran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia;
3. istilah Belanda dalam semua cabang ilmu yang mungkin dibedakan;
4. nama-nama Belanda dalam buku bacaan yang masih mungkin dipakai diganti;
5. bahasa Jepang diajarkan sebagai mata pelajaran.

Termasuk penyederhanaan, di antarannya:

1. sekolah menengah umum bagian pertama dijadikan ,satu jurusan saja, yaitu jurusan B, Pasti Alam
2. sekolah menengah umum bagian tinggi dijadikan dua jurusan. sastra dan pasti alam dengan mengadakan jurusan sastra Barat
3. sekolah guru untuk sekolah rendah dijadikan satu jenis saja, yaitu S.G.L atau S.G.P.

Di samping pelajaran umum sangat diutamakan:

1. pendidikan jasmani meliputi: pendidikan jasmani, bersenam, berbaris dan latihan kemiliteran;
2. kerja bakti untuk menenangkan semangat berpartisipasi dengan Perang Asia Timur Raya dihidupkan;
- 3: pelajaran agama diberikan di luar rencana sekolah;
4. pendidikan kenegaraan dimasukkan dengan menanamkan perasaan hormat kepada pemerintah dan Kaisar Jepang, sedang pendidikan budi pekerti ditingkatkan untuk menanamkan semangat kepahlawanan. Dalam hubungan ini pendidikan jasmani dan kemiliteran diutamakan, pendidikan akan akal dan pembinaan ilmiah kurang diperhatikan.

Jasa Jepang di bidang pendidikan ialah melaksanakan demokratisasi di bidang pendidikan. Setiap anak berhak masuk sekolah sesuai tingkatan pendidikannya. Jepang banyak membuat perubahan di bidang pendidikan yang bersifat paksa dan berlangsung secara tepat dan radikal.

Dalam hal ini dapat dicatat unsur-unsur yang baik, di antaranya :

1. perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan;

2. orang-orang Indonesia sanggup menjadi tenaga pengajar di semua tingkat jenis sekolah yang ada; jurusan B, Pasti Alam;
3. terjadi pemupukan keberanian dan kesanggupan berdiri sendiri.

Adapun sebagai segi-segi negatif antara lain :

1. banyak syarat didaktis, paedagogis diabaikan.
2. pendidikan akal kurang dapat perhatian sebagai mana mestinya;
3. etatisme dan kultus individu terhadap Kaisar Jepang dibangkitkan.

Jepang menutup semua sekolah yang menggunakan bahasa Belanda. Sebagian besar gedung sekolah milik misi diambil-alih semua pastor, suster, bruder yang berkebangsaan Belanda ditawan, padahal pastor, suster serta bruder pribumi jumlahnya sangat sedikit.

Mereka inilah yang tetap berusaha meneruskan penyelenggaraan pendidikan Katolik. Namun demikian dapat dikatakan bahwa pada jaman penjajahan Jepang itu perkembangan sekolah Katolik di Jawa Tengah mengalami kemunduran yang hebat.

Demikian pula dengan sekolah Kristen. Hampir seluruhnya terpaksa ditutup. Waktu sekolah-sekolah boleh dibuka kembali, sekolah swasta tidak menerima subsidi dari pemerintah Jepang. Sekolah Kristen di Surakarta mencoba untuk dapat membuka terus sekolahnya dengan bantuan dari masyarakat, tetapi hanya bertahan dua tahun. Tahun 1944 terpaksa ditutup. Sekolah-sekolah swasta lainnya juga mengalami nasib yang sama.

BAB V

MASA REPUBLIK INDONESIA (1945--1979)

5.1 Politik Pemerintah Indonesia Terhadap Pendidikan (1945--1979)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah perubahan yang bersifat mendasar dalam bidang pendidikan. Pendidikan disesuaikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Landasan idiil pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Meskipun negara kita mengalami beberapa kali perubahan UUD, namun Pancasila tetap merupakan landasan idiil pendidikan di Indonesia. Pada waktu Mr. Soewandi menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia di Yogyakarta yang diketuai oleh Ki-Hajar Dewantoro. Panitia ini dibentuk berdasarkan keputusan rapat Badan Pekerja KNIP pada tanggal 27 Desember 1945 atas dasar pertimbangan pemerintah balawa untuk pembentukan negara dan masyarakat baru, perlu diadakan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Dengan terbentuknya Panitia ini Pemerintah berharap akan ada kebulatan paham dengan masyarakat.

Sebagai pedoman kerja Panitia Menteri Soewandi telah mengambil keputusan sebagai berikut :

- a. Panitia bertugas merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah.
- b. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat.
- c. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas termasuk fakultas, dengan disertai daftar dan keterangan-keterangan yang langsung.

Mengenai pokok pokok pendidikan dan pengajaran'baru, panitia mengajukan saran tentang tujuan pendidikan guna penyusunan masyarakat baru yang memerlukan adanya perubahan pedoman pendidikan serta pengajaran paham perseorangan yang hingga saat itu masih berlaku, sebaiknya diganti dengan paham susila dan rasa perikemanusiaan yang tinggi. Pendidikan dan pengajaran diarahkan kepada usaha membimbing murid-murid, agar menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab. Selanjutnya untuk memperkuat potensi rakyat hendaklah diadakan satu macam.sekolah untuk segala lapisan masyarakat. Sesuai dengan dasar keadilan sosial semua sekolah harus terbuka untuk tiap penduduk negara baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu hasil dari Panitia Penyelidik Pendidikan pada waktu itu adalah mengenai perumusan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik menjadi warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan perkataan lain, tujuan pendidikan pada masa tersebut penekanannya pada penanaman semangat patriotisme. Penanaman patriotisme sebagai tujuan pendidikan memang sesuai dengan situasi pada waktu itu di mana negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik, dan sewaktu-waktu pemerintah kolonialis Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali negara Indonesia. Oleh karena itu semangat patriotisme sangat ditekankan oleh pemerintah sebagai tujuan nasional pendidikan di Indonesia.

Pada bulan Desember 1949, Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Walaupun demikian, landasan idiil pendidikan tetap tidak mengalami perubahan, tetapi

tujuan pendidikan mengalami perubahan. Pada tanggal 5 April 1950 diundangkan Undang-undang No. 4 tahun 1950 mengenai Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah oleh Presiden Republik Indonesia (Mr. Asaat) dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yaitu S.Mangunsarkoro (Pada waktu itu Republik Indonesia merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat).

Dalam Undang-undang No. 4/1950 bab II, pasal 3, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, setia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Sebagai negara yang sudah merdeka dan menganut sistem demokrasi, maka tujuan pendidikan pun menghendaki agar sistem pendidikan warganegara-warganegara bersifat demokratis pula. Ini berarti setiap persekolahan pada waktu itu harus dapat menanamkan dan mengembangkan sifat-sifat demokratis pada anak-anak didiknya.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa bidang pendidikan setelah masa kemerdekaan mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan ini pun menyangkut pula sistem persekolahan didasarkan kepada sistem golongan, baik golongan berdasarkan bangsa maupun status sosialnya. Tetapi setelah kemerdekaan sistem persekolahan di Indonesia, hanya mengenal tiga tingkat pendidikan.

1. Pendidikan Rendah

Pendidikan yang terendah di Indonesia adalah sekolah dasar. Pada tahun 1945 sekolah ini disebut Sekolah Rakyat (SR) dan lama pendidikan enam tahun.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah terbagi atas dua tingkat. Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Masing-masing tingkat lamanya tiga tahun. Tingkat pendidikan menengah ini dibagi pula atas dua jenis sekolah yaitu Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.

3. Pendidikan Tinggi

Dalam periode 1945--1950, kesempatan untuk meneruskan studi ke lembaga pendidikan tinggi terbuka lebar bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat. Lembaga pendidikan tinggi berkembang pesat, tetapi pelaksanaannya di selenggarakan di tengah perjuangan fisik maka perkuliahan kerap kali disela dengan perjuangan ke garis depan. Lembaga pendidikan tinggi yang ada adalah Universitas Gajah Mada, beberapa sekolah tinggi dan akademi di Jakarta (daerah pendudukan), Klaten, Solo dan Yogyakarta.

Sistem persekolahan serta tujuan dari masing-masing tingkat pendidikan di atas diatur dalam Undang-undang No. 4 th. 1950 bab V pasal 7, sebagai berikut:

BAB V

Tentang jenis pendidikan dan pengajaran dan maksudnya

Pasal 7

1. Pendidikan dan Pengajaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan Pengajaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, dan ketangkasan baik lahir maupun batin.
3. Pendidikan dan Pengajaran menengah (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan memperluas pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.

4. Pendidikan dan Pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup
5. Pendidikan dan Pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya, supaya mereka dapat memiliki hidupnya lahir batin yang layak.

**SISTEM PERSEKOLAHAN
TH. 1945 - 1950**

**PENDIDIKAN
RENDAH**

**PENDIDIKAN
MENENGAH**

**PENDIDIKAN
TINGGI**



Setelah kemerdekaan, sistem persekolahan di Indonesia memberi kesempatan belajar kepada segala lapisan masyarakat. Di dalam UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1 dikatakan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pun di dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran Tahun 1950 Bab XI pasal 17 menyebutkan:

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

Dari penjelasan kedua undang-undang di atas, pemerintah Indonesia memberi kesempatan belajar yang sama kepada setiap anak baik untuk pendidikan rendah, menengah, maupun pendidikan tinggi. Ini pun berarti bahwa setiap anak dari setiap golongan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memasuki sekolah tertentu. Persyaratan yang diperlukan hanyalah prestasi belajar anak itu. Apabila prestasi belajar anak itu baik, maka kesempatan untuk belajar terbuka baginya.

Meskipun Indonesia telah mengalami perubahan UUD sebanyak tiga kali, namun dalam setiap UUD falsafah Pancasila tetap dijadikan dasar dan landasan idiil pendidikan di Indonesia. Hal tersebut tercantum ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga bermasyarakat, baik di Pusat maupun di Daerah.

Adapun tujuan pendidikan pun telah berkali-kali mengalami perubahan antara lain dengan dikeluarkannya Undang undang No. 4 tahun 1950. Undang-Undang No. 12 tahun 1954, keputusan Presiden RI No. 145 tahun 1965, ketetapan MPRS RI No. XXVII/MPR/1966.

Rumusan terakhir mengenai tujuan pendidikan ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menurut Tap MPR No. IV/MPR/

1978 yang di dalamnya, memuat rumusan Tujuan Pendidikan Nasional, di antaranya berbunyi sebagai berikut :

- a. Pendidikan Nasional berdasarkan azas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- b. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat
- c. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikanmoral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta.

Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan ialah UU No. 4 tahun 1950 jo UU No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan di sekolah dan UU No. 22 tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam pelaksanaannya kemudian diatur oleh keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang Pembinaan Seluruh Pendidikan dan Latihan yang disusul oleh Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972.

Untuk sekolah-sekolah, tujuannya diuraikan dalam Surat Keputusan Menteri P dan K tentang pembakuan Kurikulum, No. 008 c/ U/1975 untuk sekolah dasar, No. 008d/U/ 1975 untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan No. 008e/U/1975 untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas. Untuk Pendidikan Tinggi, dasar dan arah pembinaan serta pengembangannya diuraikan dalam Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri P dan K No. 0140/U/1975.

5.2 Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

5.2.1 Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan

Sejak Kemerdekaan RI tahun 1945 Pemerintah benar-benar meningkatkan pendidikan umum untuk rakyat banyak. Hal ini adalah untuk mengejar ketinggalan pada jaman Kolonial, di mana masih sangat banyak rakyat yang tidak dipat bersekolah, dan tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.

Sampai tahun 1979 Sekolah-sekolah Negeri meningkat dengan pesat, demikian pula jumlah murid dan guru. Peningkatan tersebut mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Atas. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari tahun ke tahun di mana penduduk usia sekolah terus meningkat..

Peningkatan paling menyolok seperti di propinsi-propinsi lain adalah jumlah Sekolah Dasar sejak jaman Orde Baru tahun 1960 untuk mencukupi kebutuhan rakyat di desa-desa, sekolah jaman Belanda tidak mencukupi lagi. Pada tahun 1976 telah dibangun 3958 buah SD Inpres dan penambahan guru untuk SD Inpres sebanyak 25.186 orang.

Selain itu juga Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas penambahan lokal-lokal untuk SLP dan SLA terus diusahakan. Untuk membantu pemerintah pusat maka pemerintah Daerah Tingkat II banyak membantu dengan mengembangkan tanah dan gedung sekolah Apabila sekolah usaha PEMDA tersebut telah memenuhi persyaratan minimal, dapat (diangkat menjadi Sekolah Negeri. Beberapa di antaranya ialah SMP Kodya Magelang menjadi SMP Negeri III Magelang.

Selain mengusahakan Sekolah Lanjutan Umum, juga Sekolah Kejuruan diperhatikan, meskipun sangat kurang. Hal ini disebabkan tingginya biaya sekolah kejuruan, kurangnya guru vak yang ahli dan animo muridnya yang kurang dibandingkan dengan Sekolah Umum.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga trampil untuk Pembangunan, maka dibentuk SMPP (Sekolah menengah Pembangunan Persiapan) di beberapa tempat misalnya : Wonogiri, Wonosobo, Rembang, Brebes, Surakarta, Purwodadi Sebuah STM

Pembangunan yang modern didirikan di Semarang Dan dalam menanggulangi kekurangan SMP, sedang dirintis SMP Terbuka di daerah Tegal, yaitu SLP yang tidak terikat kepada ruang-ruang kelas dan jadwal pelajaran yang ketat. Hal ini memungkinkan murid-murid belajar di tempat pekerjaannya dengan membawa bahan pelajaran.

5.2.2 Perguruan Tinggi dan Akademi

5.2.2.1 AKABRI Umum dan Darat di Magelang

I . Latar Belakang Sejarah

Beberapa bulan setelah diproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia didirikan AMN. Pencetus ide adalah Jenderal Urip Sumohardjo yang waktu itu menjadi Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat. Pendirian AMN ini dipisahkan dengan kelahiran TKR yang didekritkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1945.

a. Tahap Pertama 1945--1949

Pendirian AMN itu didorong oleh situasi pada waktu itu. Terbentuknya TKR dan BKR yang anggotanya demikian banyak dengan jumlah tenaga perwira yang sedikit sekali. Tenaga perwira dan Bintara yang terlatih dan terdidik sangat diperlukan untuk memimpin TKR. Problem ini mendorong gagasan untuk membentuk secepat mungkin sekolah Perwira dan sekolah Bintara secara darurat. Pada tanggal 27 Oktober 1945 Jenderal Urip Sumohardjo memerintahkan kepada seorang Letnan KNIL lulusan Akademi Militer kerajaan Belanda di Breda bernama Samidjo untuk membentuk Akademi Militer dan Sekolah Kader di Yogyakarta. Samidjo membentuk AMN tanpa persiapan baik modal, tenaga pengajar, perlengkapan maupun gedung. Samidjo harus mengusahakan sendiri. Ia mengadakan pengumuman penerimaan calon yang berminat bersamaan dengan

pengumuman peminat untuk menjadi guru dan instruktur, lewat pers dan radio. Pengumuman pembukaan Akademi Militer dan Sekolah Kader ini pada tanggal 31 Oktober 1945 ditanda tangani oleh Jenderal Urip Sumohardjo selaku Kepala Markas Besar Umum TKR dan disiarkan lewat pers pada tanggal 1 Nopember 1945.

Dalam tahun 1946 ketika suasana agak tenang setelah perundingan Indonesia Belanda masa pendidikan di Akademi Militer diperpanjang menjadi 3 (tiga) tahun demi peningkatan mutu. Dengan demikian sifat darurat pendidikan Akademi Militer ini jadi hilang.

Pada tahun 1949 angkatan ke tiga yang diterima menjadi calon taruna adalah pemuda lulusan SMA. Akibatnya minat para pemuda terhadap Akademi Militer menjadi merosot. Karena banyak mengundurkan diri dan suasana juga sudah berubah akhirnya tinggal tujuh orang taruna. Dalam tahun 1950 Akademi Militer ini terpaksa ditutup.

b. Tahap ke dua 1950--1966

Tahap ke dua adalah lahirnya pendidikan Akademi yang masing-masing sebagai berikut: Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta Akademi Angkatan Kepolisian di Sukabumi Akademi Militer Nasional (AMN Darat) di Magelang, sebagai bentuk lanjut Militaire Academie di Yogyakarta.

c. Tahap ke tiga, 1966 - Sekarang

Tahap ketiga merupakan peleburan dari ke empat Angkatan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1966 dan terdiri dari bagian :

Bagian Umum dan Darat di Magelang
Bagian Udara di Yogyakarta

Bagian Laut di Surabaya
 Bagian Kepolisian di Sukabumi, kemudian
 dipindah;in ke Semarang.

2. Program Pendidikan

Tahun pertama adalah piagam pendidikan umum, meliputi Pendidikan dasar bagi para taruna, jadi belum ada pembagian. Lama pendidikan menjadi tiga bulan pertama, tiga bulan kedua dan enam bulan terakhir (satu Tahun). Setelah memasuki-bagiannya masing-masing, maka dilanjutkan dengan tahap tahun ke dua, yaitu diarahkan untuk memberikan disiplin dan aktifitas. Tahun ke tiga meliputi masa pengembangan pendidikan kepribadian taruna. Dalam pendidikan ini taruna sudah dilatih untuk memimpin lingkungan sendiri dan memecahkan persoalan dalam kaitan kepemimpinan. Tahap tahun ke empat merupakan masa peningkatan dan pematapan dari pengetahuan dan kecakapan selama pendidikan di samping mengembangkan tugas dan tanggung jawab sebagai latihan untuk masa mendatang.

3). Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada selama masa pendidikan meliputi :

Asrama beserta perlengkapannya

Perairan dan perlengkapannya

Makanan

Alat pelajaran

Pemeliharaan rohani, jasmani dan kesehatan

Uang Saku berkisar dari Rp. 5.400,- Rp 14.250, fasilitas-fasilitas lain dan lengkap antara lain gedung olah raga, lapangan tenis, golf, lapangan tembak, kolam renang. Ada pula gedung pertemuan, studio, drumband dan lain-lain.

4) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan yakni menghasilkan Perwira-perwira remaja yang :

Tanggap, dapat diandalkan dan tahan uji.,
 Tanggap, cerdas dan memiliki kemampuan menanggapi
 dan memahami persoalan kemudian memecahkan
 persoalan itu.) -,-
 Trengginas, dalam berfikir dan bertindak
 Untuk memperoleh/mencapai hal itu titik beratnya
 terletak pada kedisiplinan yang sangat ketat.
 Demikianlah garis besar sejarah AKABRI di Magelang.

5.2.2.2 AKAMIGAS (Akademi Minyak dan Gas Bumi)

Di Cepu, yaitu suatu tempat di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1967 didirikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (AKAMIGAS). Adapun mahasiswa-mahasiswanya adalah para karyawan putra. Hal ini disebabkan karena kelak lulusan Akamigas ini adalah karyawan yang kerjanya bukan duduk di belakang meja merencanakan eksploitasi pengolahan pemasaran melainkan terjun langsung ke lapangan, antara lain langsung menangani proyek-proyek minyak mulai dari mencari sumber minyak, masuk ke luar hutan naik turun gunung mencari sumber minyak. Naik truk berpanas-panas bila harus pergi memeriksa sumur yang letaknya berjauhan atau ikut mengebor di tengah hutan. Jelaslah bahwa pekerjaan ini kurang sesuai dan kurang menarik bagi wanita

Dulu lembaga pendidikan itu pernah menerima lulusan SLTA dari luar perminyakan karena dianggap lebih baik dari pada bila hanya menerima dari karyawan saja, tetapi ternyata Departemen P dan K melarangnya, akibatnya penerimaan calon mahasiswa AKAMIGAS dari SLTA dibatalkan.

1) Fasilitas Pendidikan

Pendidikan AKAMIGAS di Cepu dilengkapi dengan sarana pendidikan yang cukup. Misalnya disediakan asrama mahasiswa, perpustakaan (misalnya untuk sumur, sumur minyak di daerah Nglobo), laboratorium,

kendaraan, dan sebagainya, Para mahasiswa yang belajar di AKAMIGAS, mendapat uang saku.

Adapun perusahaan yang mengirinkan karyawannya ke AKAMIGAS antara lain: Pertamina, Amco, Mobil Oil dan lain-lainnya.

2) Sistem Pendidikan

Ada dua pola sistem pendidikan di AKAMIGAS, yaitu pola lama dan pola baru.

a. Pola Lama.

Dalam sistem pendidikan pola lama, mahasiswa kuliah selama tiga tahun terus menerus. Ini hanya bertahan tahun 1977. Apabila bertahan sampai dengan siswa tidak lulus ujian kenaikan tingkat atau dimulai tidak disiplin dan banyak merugikan baik bagi perusahaan maupun bagi akademi maka mahasiswa tersebut dipersilahkan kembali ke perusahaan tempat ia bekerja.

b. Pola Baru.

Berbeda dengan pola lama, pola baru menggunakan sistem berjenjang artinya, seorang mahasiswa bila tidak tamat (setahun) di tingkat I (mungkin di tingkat II atau III) dikembalikan ke per-usahaannya, untuk bekerja lagi. Sebaliknya bila ada mahasiswa yang cerdas, ia boleh terus naik tingkat-tingkat di atasnya tanpa harus kembali ke perusahaannya. Ada juga kemungkinan karyawan bisa langsung di tingkat II atau III.

Adapun berjenis-jenis jurusan di AKAMIGAS. Namun demikian jumlah jenis jurusan yang ada tidak semua tiap tahun ajaran baru dibuka melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya tahun ajaran 1978/1979 jurusan yang dibuka antara lain: Pengeboran, Laboratorium Pengolahan)

Tehnik Mesin Tehnik Listrik,
Logistik dan lain-lain

Oleh karena pendidikan ini terencana benar-benar baik dalam kurikulumnya maupun dalam anggarannya. Sebelum calon diterima di AKAMIGAS, akan dites kejurusan, test pelajaran dasar serta test sikap.

5.2.2.3 Universitas Diponegoro di Semarang

1) Latar Belakang Sejarah.

Penduduk Jawa Tengah yang makin lama makin bertambah padat dan menurut perhitungan kasar pada tahun 1956 berjumlah 17,5 juta jiwa (orang). Pada masa itu diperkirakan pemuda yang lulus SMA Negeri lebih dari 2.000 orang. Angka akan bertambah terus mengingat ditambah lagi dengan lulusan sekolah swasta. Sedangkan ibukota Jawa Tengah tidak memiliki universitas yang mencetak sarjana sebagai tenaga ahli untuk pembangunan. Keadaan ini mendorong beberapa orang pejabat di Jawa Tengah memprakarsai berdirinya sekolah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi. Yayasan ini bermodal (formal)

Rp 100,- yang dikumpulkan dari dermawan ini dilegalisasi oleh notaris dengan nama Yayasan Universitas Semarang pada tanggal 21 Desember 1956.

Adapun nama pengurus Yayasan sebagai berikut:

Ketua	: Mr. Soedarto.
Wakil Ketua	: Mr. Dan Soelaiman.
Panitera	: Mr. Soesanto Kartatmodjo.
Bendahara	: Achmad Tjokrokusumo.
Pembantu	: Mr. Imam Bardjo.
	Mr. Goenawan.
	Mr. Tan Tjing Hok.
	Mr. Koo Swan Ik.

Pada tanggal 18 Mei 1962 nama yayasan diganti menjadi Yayasan Universitas Diponegoro. Pada 10 Oktober 1968 berdasarkan rapat anggota yang notulennya disampaikan kepada notaris nama yayasan disempurnakan menjadi Pembina Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang.

Landasan Idiil Pancasila. Tujuan Membina dan mengembangkan Undip yang berdasarkan Pancasila. Jenis Pendidikan adalah Pendidikan Tinggi dengan nama Universitas Diponegoro.

Mula pertama yang dibuka adalah Fakultas Hukum dengan jurusan Perdata, Pidana, Tatanegara dan Ekonomi. Sekarang (1980) berkembang menjadi tujuh fakultas yaitu Fakultas Hukum,, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan Perikanan, Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultis Tehnik.

Rektornya adalah Prof. Soedarto SH.

- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi:
 - a) Keadaan kampus belum lengkap dan masih berlokasi di tengah kota yaitu di Pleburan. Buku-buku perpustakaan belum lengkap.
 - b) Tenaga Dosen masih kurang.
 - c) Kurikulumnya nampaknya masih belum stabil seperti Universitas-universitas yang Senior. Pengaruh dari beberapa Universitas Senior masih dominan.

5.2.2.4 IKIP Negeri Semarang

1) Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pengajar di SLP dan SLTA pada tahun 1950 di Semarang dibuka Kursus B I dan B II. Lama kursus pada tahap awal adalah enam bulan, kemudian ditingkatkan untuk kursus B I menjadi tiga tahun dan kursus B II dua tahun. Lulusan BI

berwewenang menjadi tenaga pengajar SLTP dan SLTA. Pada 1960 di Semarang berdiri pula sebuah perguruan tinggi yang masih berstatus swasta. Pada waktu itu kursus B I dan B- II di Semarang dan Surakarta dirubah dan ditingkatkan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan diintegrasikan dengan Universitas Diponegoro. Karena' harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan maka berdasarkan keputusan bersama antara Menteri PTIP dan Menteri P dan K, menjelang pertengahan tahun 1964 FKIP dipisah dari Universitas Diponegoro, kemudian digabungkan dengan Induk Lembaga pendidikan Keguruan yang sama di Yogyakarta. Masing-masing menjadi IKIP Yogyakarta. Cabang Semarang dan Cabang Surakarta.

Pekembangannya yang cepat dengan memiliki lima Fakultas dan 13 jurusan. Oleh karena itu berdasarkan SK Menteri PTIP tanggal 8 Maret 1965 No. 40/ 1965 ditetapkan bahwa IKIP Semarang berdiri sendiri sebagai suatu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan yang berotonomi penuh.

Sejak saat itu IKIP Semarang mulai-bebas memilih pimpinannya. Sampai sekarang IKIP Semarang mengalamatni perkembangan yang pesat dengan memiliki 21 jurusan yang tergabung dalam lima Fakultas. Selain itu juga memiliki Balai Penelitian Pendidikan di bawah pengawasan dan pembinaan Pembantu Rektor Bidang Akademis.

2) Landasan Idiil

IKIP berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

3) Tujuan

IKIP bertujuan menciptakan sarjana yang ahli di dalam bidangnya, maupun melaksanakan penelitian dan melakukan tugas pada lembaga-lembaga pendidikan lain yang sesuai dengan keahliannya.

4) Jenis Sekolah

IKIP hanya mengasuh pendidikan calon guru dalam berbagai bidang ilmu.

5) Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- a) Kampus yang luasnya 6,2 Ha terletak di Semarang terdiri dari:
Ruang Kantor, Ruang-ruang Kuliah untuk lima Fakultas,
Gedung Perpustakaan bertingkat tiga (3 lantai),
Laboratorium-laboratorium, Perumahan Dinas untuk Dosen, Sekolah Pembangunan Proyek Perintis,
- b) Tenaga pengajar belum sepenuhnya terpenuhi tetapi terus ada kaderisasi.
- c) Kurikulum sesuai dengan IKIP Negeri lainnya.

5.2.2.5 Universitas Negeri Jendral Soedirman Purwokerto

1) Latar Belakang Sejarah.

Daerah Karesidenan Banyumas dengan ibukotanya Purwokerto merupakan daerah pinggiran, daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada jaman Mataram Banyumas termasuk kerajaan Mataram dalam kedudukan yang paling luar, yaitu Monconegari Kilen. Meskipun menurut tradisi Banyumas berada di bawah dan berorientasi kepada kerajaan Mataram, namun andil daerah ini kepada perjuangan revolusi Indonesia cukup menonjol. Banyak tokoh nasional berasal dari daerah ini. Beberapa nama besar dapat dikemukakan misalnya Jendral Soedirman (bekas Panglima Besar ABRI), Let. Jen. Gatot Subroto (bekas WAKASAD), Soekarno Joyonegoro (bekas kepala Kepolisian Negara RI) dan Jendral Surono (Menteri KESRA). Tidak mengherankan bila rakyat mempunyai kebanggaan besar kepada daerah dan warga mereka. Hal ini mungkin menumbuhkan keinginan untuk mempunyai Universitas sendiri, suatu lembaga pendidikan tinggi yang mencetak Sarjana-sarjana

yang diperlukan masyarakat, untuk menampung lulusan SLTA di Jawa Tengah bagian barat.

Akhirnya atas prakarsa masyarakat dan pemerintah Daerah Banyumas didirikanlah Universitas Negeri Jendral Sudirman, sekaligus mengabadikan nama Pahlawan Kemerdekaan tersebut, pada tahun 1963, di kota Purwokerto. Rektor yang pertama adalah prof. dr. Benyamin, putra daerah Banyumas.

2) Landasan Idiil

Landasan idiil dari Universitas Negeri Jendral Sudirman ialah Pancasila dan UUD 1945.

3) Tujuan

Seperti tercantum dalam Tridarma Perguruan Tinggi ialah mengembangkan Pendidikan Tinggi, Penelitian demi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mengamalkan ilmu untuk pengabdian kepada masyarakat. Secara khusus Universitas Jendral Sudirman memberikan perhatian kepada ilmu terapan dan ilmu dasar yang pragmatis, sesuai dengan kondisi lingkungan, bermanfaat bagi perkembangan daerahnya dan pembangunan nasional, serta mengisi lapangan kerja yang sangat dibutuhkan.

4) Jenis-jenis Fakultas

Fakultas yang terdapat di Universitas Jendral Sudirman ini ialah Fakultas Biologi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan dan Fakultas Ekonomi.

5) Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Universitas Jendral Sudirman adalah:

- a) Adanya kerja sama yang erat antara Universitas dengan Pemerintah Daerah, baik daerah Tingkat I maupun tingkat II. Karena tanpa bantuan dana dari

pemerintah Universitas di daerah sulit mendapatkan dana.

- b) Sinkronisasi antara pengembangan ilmu dengan kebutuhan daerah. Dengan bekas keresidenan Banyumas merupakan daerah pertanian yang luas dan subur, terdapat industri berat (baja) dan industri kerajinan, serta mempunyai pelabuhan samudra (Cilacap). Maka tepat sekali adanya fakultas-fakultas ekonomi, pertanian, peternakan, dan biologi sebagai ilmu dasar.

(Sumber : Universitas. Negeri Jendral Sudirman, Purwokerto. Laporan Tahunan Rektor 1976/1977).

5.2.2.6 Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret

1) Latar Belakang Sejarah

Sejarah lahirnya Universitas Negeri Surakarta merupakan kejadian yang unik, lain dari sejarah berdirinya Universitas di Indonesia pada umumnya. Hal ini tidak lepas dari kondisi kota Surakarta.

Surakarta adalah pusat kerajaan Mataram yang kemudian dipecah menjadi empat kerajaan, tetapi tetap menjadi ibu kota Kasunanan Surakarta sampai kerajaan ini dijadikan daerah RI tahun 1945. Dan sampai saat ini Surakarta tetap hidup sebagai pusat kebudayaan Jawa.

Banyak para bangsawan dan cendekiawan, ahli kesenian, kesusasteraan dan ilmu pengetahuan menetap di kota kebudayaan ini. Terdorong oleh keinginan memberikan dharma bakti di bidang pendidikan, sejak awal tahun 1950-an oleh cendekiawan telah didirikan berbagai perguruan tinggi swasta di Surakarta. Keinginan untuk mempunyai Universitas Negeri telah lama ada, namun terbentur kepada kemampuan pemerintah yang belum dapat menyediakan biaya.

Perintisan mendirikan Universitas Negeri di Surakarta dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pemerintah Daerah (Walikota Surakarta), dalam hal ini oleh Bapak Kusnandar pada tahun 1968. Pihak lain ialah kelompok Perguruan Tinggi Swasta yang dipelopori oleh Universitas Nasional "Saraswati". Sejak tahun 1966, memperjuangkan pula berdirinya suatu Universitas Negeri. Kemudian menyusul suatu Tim Gabungan Pemerintah Daerah dan PT Swasta untuk mengumpulkan data sebagai persiapan Universitas Negeri pada tahun 1972. Pemerintah Pusat (Departemen P dan K) pada dasarnya menyetujui didirikannya Universitas Negeri, asal Perguruan-perguruan Tinggi Swasta dan Negeri bersedia melebur menjadi satu. Ternyata cukup banyak yang bersedia bergabung.

Pada tahun 1974 proses penggabungan dilaksanakan.

Delapan Perguruan Tinggi yang bersedia bergabung ialah:

- a) STO Negeri Surakarta
- b) PTPN Veteran cabang Surakarta
- c) AAN Negeri Surakarta
- d) Universitas Nasional
- e) Universitas Cokroaminoto
- f) Universitas Islam Indonesia cabang
- g) Universitas 17 Agustus cabang Surakarta
- h) Institut Jurnalistik Indonesia Surakarta.

Setelah seluruh inventarisasi dan persiapan pendirian Universitas selesai dilaksanakan, maka tanggal 1 Juni 1975 didirikanlah Universitas Gabungan Surakarta, hasil integrasi dari ke delapan Perguruan Tinggi tersebut di atas. Upacara diadakan di pagelaran keraton Surakarta, dihadiri oleh kurang lebih 2.000 mahasiswa dan ratusan dosen.

Universitas Gabungan Surakarta ini (belum Negeri) meliputi-tujuh Fakultas yaitu :

- a) Fakultas Hukum
- b) Fakultas Sosial Politik, Jurusan Publisistik dan Administrasi Negara
- c) Fakultas Ekonomi
- f) Fakultas Pertanian
- g) Fakultas Teknik.
- h) Fakultas Kedokteran.
- i) Fakultas Sastra.

Universitas Gabungan Surakarta dipimpin oleh Presidium dengan Ketua Sumari Wongsopawiro, Walikota Surakarta. Akhirnya Universitas Gabungan Surakarta dijadikan Universitas Negeri pada tanggal 8 Maret 1976 dengan nama “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret” oleh Presiden Suharto, dengan KEPRES nomor 10 tahun 1976. Peresmian dilakukan di Sitinggil Keraton Surakarta oleh Presiden Suharto. UNS menempati gedung antara lain di Pagelaran Kraton Surakarta-Sementara menanti selesainya kampus I UNS di Ketingan, Kelurahan Jebres, Surakarta. Rektor UNS yang pertama ialah GPH Haryo Mataram SH.

2) Landasan Idiil :

Pancasila dan UUD 1945.

3) Tujuan

Sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi, bertujuan melaksanakan Pendidikan Tinggi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan mengamalkan ilmu teknologi sebagai pengabdian kepada masyarakat Secara khusus UNS diharapkan dapat mengembangkan Studi Kebudayaan Jawa dan Kesenian Jawa, mengingat kota Surakarta sebagai kota pusat kebudayaan Jawa yang masih hidup,

4) Jenis-jenis Fakultas

Fakultas-fakultas pada UNS merupakan hasil integrasi dari berbagai Perguruan Tinggi. adalah sebagai berikut :

- a) Fakultas Ilmu Pendidikan
- b) Fakultas Keguruan
- c) Fakultas Sastra Budaya
- d) Fakultas Sosial Politik
- e) Fakultas Hukum
- f) Fakultas Ekonomi
- g) Fakultas Kedokteran
- h) Fakultas Pertanian
- i) Fakultas Teknik.

5.2.2.7 IAIN Walisongo

Sejarah berdirinya IAIN Walisongo didahului oleh berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam di Kudus dalam bulan Oktober 1963. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus pada waktu itu adalah Drs. Soenarto Notowidagdo mendirikan Perguruan Tinggi di kota Kudus yang terdiri dari dua Fakultas Agama dan Fakultas Ekonomi. Hal tersebut mencerminkan masyarakat Jawa Tengah bagian utara pada umumnya serta masyarakat kota Kudus khususnya bahwa sebagian yang menonjol adalah para pedagang dan sebagian terbesar beragama Islam, dengan tidak dilupakan pula usaha mereka di bidang pertanian.

Dalam perkembangan selanjutnya Fakultas Agama di Kudus menjadi Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN "Sunan Kalijaga". Sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1968/1969]Dekan Fakuhas dijabat oleh Drs. Soenarto Notowidagdo. Status sebagai cabang tersebut berlangsung dari tahun 1966 sampai 1970, bersamaan dengan peresmian berdirinya IAIN Walisongo.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI no. 40 tahun 1969 tertanggal 2 Mei 1969 Panitia pendiri IAIN Walisongo Jawa Tengah disahkan sebagai panitia Negara yang diketuai oleh Drs. Soenarto Notowidagdo, anggota Badan Pemerintah Harian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Kemudhkn IAIN Walisongo diresmikan penegriannya pada hari Senen Wage tanggal 6 April 1970 berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30 dan 31/1970 bertempat di gedung Balai Kota Kotamadya Semarang.

Rektor IAIN Walisongo setelah peresmian sebagai IAIN Negeri ialah K.H. Zubair. Sedang selama persiapan penegriannya (1963 s/d 1969) sebagai Rektor ialah Drs. Soenarto Notowidagdo.

IAIN Walisongo sebelum diresmikan sebagai Institut Negeri telah memiliki Fakultas-fakultas sebagai berikut :

- 1) Fakultas Da'wah di Semarang.
- 2) Fakultas Syari'ah di Demak.
- 3) Fakultas Syari'ah di Bumiayu.
- 4) Fakultas Ushuludin di Kudus.
- 5) Fakultas Tarbiyah di Salatiga.

Berhubung telah diresmikannya IAIN Walisongo pada tahun 1970 maka fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga cabang Kudus masuk ke dalam lingkungan IAIN Walisongo Jawa Tengah. Sejarah perkembangan Fakultas-fakultas dalam lingkungan IAIN Walisongo akan diuraikan dengan singkat sebagai berikut:

Di kota Tegal semula berdiri Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengingat IAIN Walisongo telah memiliki Fakultas Tarbiyah di Salatiga dan segera akan menerima perlimpahan Fakultas Tarbiyah di Kudus, maka kalau di Tegal akan dinegerikan, fakultas yang sama harus ada ijin khusus dari Menteri Agama. Oleh karena itu disarankan agar Tegal mengubah Fakultas tersebut menjadi Fakultas Ushuludin.

Saran tersebut diterima dan berdasarkan SK Menteri Agama tanggal 2 Mei 1970 No. 53/70 tentang pembentukan Panitia penergian Fakultas Ushuludin Walisongo cabang Tegal. Kemudian disusul dengan SK Menteri Agama tanggal 30 September 1970 No. 254/70 tentang penergian Fakultas

Ushuludin IAIN Al-Jami'ah Walisongo cabang Tegal dan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 14 April 1971.

Berdasarkan SK Menteri Agama tanggal 25 Pebruari 1974 No. 17/1974 Fakultas Usuludin Walisongo Tegal dipindahkan ke Semarang. Fakultas Da'wah dibuka pada awal tahun 1969 dan pembukaan kuliahnya diadakan pada tanggal 12 Maret 1969 bertempat di gedung yayasan Pendidikan Diponegoro Jalan Mugas No. 1 Semarang. Sejak tahun 1971 IAIN Walisongo menempati gedung yayasan Al-Jami'ah di jalan Ki Mangunsarkoro. 17 Semarang.

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo cabang Salatiga pada mulanya FIP-IKIP NU Cabang IKIP NU Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1967. Pada tanggal 2 April 1969 Fakultas Tarbiyah bergabung pada IAIN Walisongo.

IAIN Wllisongo sekarang terdiri atas tujuh Fakultas yaitu :

- 1) Fakulas Tarbiyah di Semarang.
- 2) Fakultas Syari'ah di Semarang.
- 3) Fakultas Ushuludin di Semarang.
- 4) Fakultas Da'wah di Semarang.
- 5) Fakultas Tarbiyah cabang Salatiga.
- 6) Fakultas Syari'ah cabang Pekalongan.
- 7) Fakultas Ushuludin cabang Kudus.

Tiga lembaga yang ada ialah :

- 1) Lembaga Riset dan Survey.
- 2) Lembaga Ilmiah dan Penerbitan.
- 3) Lembaga Bahasa.

Keadaan Mahasiswa dan Lulusan

Jumlah Mahasiswa	Th. 1975	Th. 1976	Th. 1977
a. Mahasiswa, baru yang diterima	350	470	480
b. Jumlah seluruh mahasiswa	1.197	1.229	1.428
c. Jumlah Lulusan Sarjana Muda	92	105	106
d. Jumlah Lulusan Sarjana Lengkap	3	27	

Jumlah tenaga edukatif tetap menurut keadaan dalam tahun 1977 : 84 orang.

Perpustakaan IAIN Walisongo Jawa Tengah memiliki buku 9.302 eksemplar yang, terdiri dari 1.729 judul.

Nama-nama tokoh yang pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Walisongo ialah:

- 1) Drs. Moh. Soenarto Notowidagdo (sebelum penegerian).
- 2) K.H. Zubair.
- 3) Prof. Teuku H. Ismail Yakup SH. MA.
- 4) Drs. Ahmad Ludjito.
- 5) Drs. H. Zarkowi Suyuti.

5.2.2.8 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)

Dengan berpedoman Peraturan Pemerintah dalam hal ini peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1965

Pendidikan Dasar untuk tenaga-tenaga pimpinan Pemerintah Dalam Negeri, juga mengingat pula hasil rapat kerja Pendidikan Departemen Dalam Negeri dan Koperasi Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia yang berlangsung di Jakarta antara tgl. 8 s/d 10 Desember 1964 dan antara 11 s/d 15

Desember 1964 ditentukan Pola Umum untuk pendidikan Akademi Pemerintah Dalam Negeri. Hasilnya yaitu memutuskan dan menetapkan peraturan umum tentang Pendidikan Dasar untuk tenaga-tenaga pimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.

Kota Semarang dianggap memberi syarat untuk didirikan Akademi tersebut, seperti tersebut dalam surat kawat Gubernur kepala Daerah Jawa Tengah no. UP KGI 134/ 19/ 11 tgl. 20 Agustus 1965 tentang pendirian Akademi pemerintahan Dalam Negeri di Semarang.

Gagasan tersebut terwujud dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 62 tahun 1965 yang menetapkan mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Semarang.

1. Tujuan

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 2 Tahun 1965 disebutkan tentang tujuan pendidikan APDN ialah untuk membentuk tenaga-tenaga pimpinan yang bermoral tinggi, berwibawa dan/Setia kepada semua ajaran-ajaran revolusi Indonesia dan untuk mendapatkan tenaga pimpinan yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, kepribadian, sikap dan pertanggung jawaban yang Nation Wide pada Badan-badan Pemerintah Dalam Negeri.

2. Penyelenggaraan

Lama pendidikan adalah 3 (tiga) tahun dan diselenggarakan dengan sistem semester sebagai berikut :

- a) tahap pertama lima semester kuliah Akademi.
- b) satu semester kuliah kerja, penyelidikan dan pembuatan Skripsi.

3. Kedudukan mahasiswa Semua mahasiswa berstatus :

- a) Mahasiswa berikatan dinas.

- b) Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar dan masing-masing memperoleh hak-hak yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.

Setelah lulus ujian penghabisan para Mahasiswa menerima ijazah Akademi dan diangkat sebagai pegawai dalam lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dalam golongan E/11 PGPN tahun 1961.

4. Keadaan Perpustakaan APDN.

- a) Buku-buku literatur: 7414 eksemplar terdiri dari 793 judul.
- b) Buku-buku Reference: 144 eksemplar terdiri dari 33 judul.
- c) Peraturan-peraturan/Himpunan Peraturan: 280 eksemplar terdiri dari 145 judul.
- d) Lembaran Negara, Berita Negara dan lain-lain: 794 eksemplar terdiri dari 428 judul.

Jumlah Personalia APDN, Pimpinan dan karyawan sebanyak 56 orang (keadaan bulan Nopember 1978).

5. Syarat-syarat masuk APDN Semarang.

- a) Pegawai/calon Pegawai negeri sipil pusat diperbantukan di daerah, baik pria/wanita dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun, dibuktikan dengan salinan surat pengangkatan SK terakhir (rangkap 3).
- b) W N R 1.
- c) Umur tidak lebih dari 33 tahun.
- d) Berijazah SMA Negeri (semua jurusan) dengan angka rata-rata 6.
- e) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah, tidak Cacat jasmani, disertai surat hasil Rontgen (di APDN).
- f) Tinggi badan sekurang-kurangnya wanita 150 cm. dan pria 160 cm

- g) Surat keterangan dari team screening pemerintah. daerah setempat bersangkutan.
- h) Daftar konduite dari pimpinan/atasan langsung yang bersangkutan.
- i) Menyerahkan (3) buah pas photo ukuran 4 x 6.
- j) Apabila sudah memenuhi ketentuan od 1c. di atas supaya disertai surat izin dari Gubernur KDH Jawa Tengah.

6. Pendaftaran.

- a) Waktu pendaftaran mulai tanggal 3--20 Februari 1981 (waktu jam kerja).
- b) Prosedur pendaftaran.
lamaran ditulis oleh pemohon dialamatkan kepada Gubernur KDH Jawa Tengah (up. direktur APDN Semarang, jalan Sety'abudi Sronдол Barat Semarang), dilampiri warkah sebagai tersebut dalam persyaratan, turunan-turunan supaya dilegalisir oleh yang berwajib dan khusus untuk Ijazah dilegalisir kepada kepala sekolah yang bersangkutan, Dep. P dan K setempat.
- c) Pelamar datang dengan surat pengantar dan masing-masing seorang pelamar dengan surat pengantar bupati/walikota KDH 11/kepala dinas TK I Jawa Tengah (dengan Cat pengantar kolektif tidak dibenarkan).

APDN berdiri dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri SK No. 62 tahun 1965.

Direktur APDN.

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1) Drs. Sumendar | 1965 - 1968 |
| 2) Drs. Abdul Saleh | 1968 - 1069 |
| 3) Drs. Adnan Widodo | 1969 - 1973 |
| 4) Drs. Suharyadi | - |
| 5) Drs. Harsono Sanjoyo | - |

- 6) Drs. Suyitno -
7) Drs. Suwadi -

Lama Pendidikan minimum 3 tahun.
maximum 4 tahun.

APDN berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri.

5.2.3 Sekolah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa

5.2.3.1 Sekolah Angkatan Laut di Tegal

Peresmian Sekolah Angkatan Laut di Tegal dilakukan oleh Presiden Soekarno, pada tanggal 12 Mei 1946. Markas/tempat Sekolah Angkatan Laut menempati sekolah kepandaian putri, yang pada masa pendudukan Jepang digunakan untuk tempat tawanan perang

Pendidikan di Sekolah Angkatan Laut dibagi menjadi dua tingkatan ialah: untuk calon Perwira yang disebut tingkatan menengah, dan Calon Bintara yang disebut tingkatan rendah. Kedua tingkatan ini masing-masing menjadi dua jurusan: ialah Jurusan Dek (pelaut) dan Jurusan Mesin. Tingkatan Menengah terdiri dari tiga kelas, dua jurusan dek dan satu jurusan mesin dengan masa pendidikan direncanakan tiga tahun, dua tahun untuk pendidikan teori dan satu tahun pendidikan praktek di kapal.

Dalam angkatan pertama yang masuk di Sekolah Angkatan Laut di Tegal ini, untuk tingkatan menengah adalah pemuda berjasah Sekolah Menengah Tinggi (setingkat SLTA, serta bekas siswa Sekolah Pelayaran Tinggi Semarang, Tegal, Cilacap dan Jakarta yang belum menamatkan pelajarannya.

Untuk tingkatan rendah diterima tamatan SMP.

Sedangkan tenaga-tenaga pendidik diambil dari bekas Instruktur SPT (Sekolah Pelayaran Tinggi), sebagai Komandan SAL (Sekolah Angkatan laut) Tegal I, ditunjuk Laksamana III Adam, wakilnya Letnan Kolonel Hadi Winarso.

SAL hijrah ke Juwana, akibat serangan Belanda pada aksi militer pertama pada tanggal 23 Juli 1947 malam, kompleks SAL dibumi-hanguskan, sedangkan para siswanya ditarik mundur ke tempat latihan opsir (LO) di daerah pegunungan Kali Bakung yang baru dibuka bulan Mei 1947 L.O. Kali Bakung ini merupakan tempat latihan bagi perwira-perwira ALRI dari pelbagai pangkalan di seluruh Indonesia dan dipimpin oleh Mayor Edy Martadinata.

Setelah perjanjian Renville dalam tahun 1948 siswa SAL kembali ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di rumah seorang Cina dan kelas rendah di sebuah gudang agak di luar kota.

Pimpinan pendidikan dipegang oleh Mayor Koen Djaelani dan Mayor Widagdo. S.M. ke Bumi Moro Kembangan, setelah tercapai persetujuan KMB dan pimpinan ALRI kembali ke Jakarta dan Surabaya, para bekas siswa SAL yang lulus dalam saingan : Selection Board diberi pangkat sersan Mayor/untuk kelas menengah dan koprak efektif (untuk kelas rendah) sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan di SAL yang di buka dalam bulan Idaret 1950 di Pasiran, Surabaya, di bawah pimpinan Mayor Thomas dan Kapten Tukiran.

Dalam pendidikan ini dididik calon perwira, bintang tamtama ALRI yang tenaganya sangat dibutuhkan dengan segera untuk mengoper kapal-kapal perang Belanda yang diserahkan pada RI.

Pasiran dipindahkan ke Bumi Moro (Moro, Kembangan) yang lebih luas dan memenuhi syarat dan pada tanggal 11 Maret 1952, diresmikanlah Kesatuan Pendidikan Angkatan Laut Moro- Kembangan (KPA LM). Di sinilah Calon perwira setaraf Akademi Angkatan Laut yang mula disebut Institut Akademi Laut menjadi Akademi Angkatan Laut (AAL) dan terakhir setelah integrasi dengan ketiga Angkatan dan Polri di bawah Hankam menjadi AKABRI bagian Laut. Sedangkan KPM diubah menjadi Pendidikan Angkatan Laut (Pusdikal) kemudian menjadi Komando Pendidikan dan Latihan

Angkatan Laut (KODIKLATAL), dan akhirnya setelah melalui pelbagai perkembangan dan kemajuan-kemajuan disesuaikan dengan fungsinya tgl 17 Agustus 1976 menjadi Komando Pendidikan TNI Angkatan Laut (Kodikal) sampai sekarang.

5.2.3.2 Sekolah Perikanan Laut (SPL) dan Sekolah Usaha Perikanan Laut (SUPL) di Tegal

1) Latar Belakang dan Sejarah berdirinya SPL dan SUPL

Sekolah ini mula-mula dirintis oleh Jepang pada waktu menduduki Indonesia. Didirikan pada tahun 1943, Sekolah ini bertujuan mendidik kader pelayaran dan perikanan laut, dengan nama Gyomin Doozyo di Pekalongan. Lama pendidikan hanya tiga bulan. Sebetulnya Jepang hanya akan mencari cara untuk mengerahkan pemuda-pemuda yang akan membantu peperangan, terbukti sebagian besar mata pelajaran adalah latihan kemiliteran.

Pada masa Revolusi, sekolah tersebut berhenti, murid-murid turut berjuang. Tahun 1947 baru dapat dibuka kembali di Rembang oleh Jawatan Perikanan Laut, yang mengadakan koordinasi dengan kota pati Jepara dan Batang. Namun Agresi Belanda II menghentikan lagi Sekolah tersebut, dan baru dapat dibuka kembali tahun 1950 di Tegal

2) Asas dan tujuan

Sebagaimana pendidikan di Indonesia maka SPL dan SUPL berasas Pancasila dan UUD 1945 serta merupakan Sekolah Pemerintah. Tujuan SPL dan SUPL ialah, mempersiapkan pemuda yang akan rnenjadi nelayan dan pengusaha perikanan. Juga memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para nelayan dan pengusaha perikanan dalam bentuk kursus, latihan, dan sebagainya.

3) Jenis Sekolah

SPL dan SUPL adalah sejajar dengan Sekolah Lanjutan Atas.

Jenis Sekolah Formal ada dua macam :

- a) Sekolah Perikanan Laut.
- b) Sekolah Usaha Perikanan Laut Menengah.

Lama pendidikan masing-masing tiga tahun.

Di samping itu diadakan pendidikan non formal, misalnya :

- a) Training Center Perikanan
- b) Past Service Training
- c) In Service Training
- d) Pendidikan Kenelayanan.

5.2.3.1 Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) di Jepara

1) Latar belakang dan Sejarah berdirinya SMIK.

Gagasan mendirikan Sekolah Menengah Industri Kerajinan dicetuskan oleh R. Ngabehi Prodjo Sukemi, salah seorang keluarga Mangkunegaran. Sekolah ini merupakan pengembangan dari STP Negeri Jepara yang telah ada pada awal tahun 1950-an. Gagasan ini diwujudkan dengan mengganti STP Negeri menjadi SMIK Negeri pada tahun 1959. Projo Sukemi digantikan oleh Wignyo, kemudian oleh Jumadi sebagai Direktur yang pertama sampai 1962 Waktu itu jurusan hanya satu yaitu jurusan Ukir Kayu. Baru tahun 1979 berganti nama menjadi Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK)

2) Asas dan Tujuan

Asas dan tujuan SMIK adalah Pancasila dan UUD 1945, merupakan Sekolah milik Pemerintah. Tujuan pendidikan ini adalah memelihara dan mengembangkan ketrampilan mengukir serta kerajinan lain dengan mencetak tenaga

trampil, guna pengembangan kewiraswastaan di bidang kerajinan.

3) Jenis Sekolah

SMIK merupakan Sekolah Kerajinan Menengah Atas; dengan masa pendidikan tiga tahun. Sejak tahun 1979 mempunyai dua jurusan :

- a) Ukir Kayu
- b) Kerajinan Batik

Direncanakan untuk menambah jurusan dengan :

- c) Kerajinan kulit dan
- d) Kerajinan logam

Masa pendidikan direncanakan empat tahun.

4) Perlengkapan pendidikan.

Sejak berdiri tahun 1959--1978 Sekolah ini masih meminjam gedung STN 1, dengan peralatan yang dipinjam, serta alat-alat ukir milik murid sendiri. Sejak tahun 1979 SMIK baru menempati gedung baru milik sendiri, dengan peralatan yang lebih lengkap.

Sesuai dengan tradisi ukir rakyat Jepara, motif-motif yang dipelajari adalah motif Jawa Klasik, termasuk gaya Jepara. Di samping itu juga diperkenalkan gaya Eropa, gaya kontemporer dan pemahatan relief.

Hasil karya para pelajar berupa patung, relief, hiasan dinding, alat rumah tangga. Khusus untuk mebel ukir menerima pesanan dari luar/umum.

5.2.3.4 Pusat Pendidikan dan Pengajaran Kegunaan Tunanetra (P3KT) di Temanggung.

1) Latar Belakang dari Sejarah berdirinya P3KT Khusus

Penyuluhan dan bimbingan sosial ternyata membangunkan kesadaran sosial kepada masyarakat

yang telah terbelenggu rantai penjajahan. Hal ini menimbulkan atau merupakan ciri yang khas bagi pekerjaan Sosial di Indonesia, di samping mempergunakan cara lain yang telah mendahuluinya. Batu dasar yang telah diletakkan Departemen Sosial terhimpun untuk melaksanakannya pengabdianya dalam wadah LSD atau Lembaga Sosial Desa. Lembaga ini didirikan pada tanggal 5 Mei 1952 dengan ditandai Sangkalan "*Kanthe Pancasila Trus Manunggal*" yang selanjutnya berkembang menyebar ke seluruh Indonesia. Demikian gagasan yang terlahir dari pertemuan tahunan telah mewujudkan

konsep : bagaimana menggarap warga desa yang buta. Gagasan yang mencakup kepentingan sosial ini kemudian ditanggapi oleh Instansi Sosial dengan memulai latihan Kerja orang buta, tanggal 17 Nopember 1953 di Pematang.

2) Asas dan Tujuan

Asas Sekolah ini adalah Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan pendidikan milik Pemerintah.

Tujuannya ialah mempersiapkan anak tunanetra dengan ketrampilan untuk dapat hidup di masyarakat membawa karsa diri, mereka yang tidak lebih rendah dari pada yang tidak cacat.

3) Perkembangan Pendidikan

Penggarapan dimulai dengan membenahi istilah buta diperhalus menjadi tunanetra, karena pekerjaan tersebut memerlukan perhatian tersendiri. Para Tunanetra selanjutnya dijadikan satu bersama Tunawisma Perawatan Sosial Sementara Temanggung, dimana lokasi ini sebenarnya dulu bekas tempat pemerahan lembu, kebun kopi dan vanillie dari Dominicus Petrus Graafesal.

5.3 Pendidikan yang Diselenggarakan Pihak Swasta

Selain pendidikan yang diusahakannya oleh pemerintah, pihak swasta juga besar peranannya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan untuk rakyat di Jawa Tengah Sebagian besar dari sekolah-sekolah Swasta, khususnya sekolah yang berasaskan agama Islam, Kristen dan Katolik diasuh oleh yayasan-yayasan yang telah ada sejak jaman Belanda. Sedang sekolah-sekolah Swasta non agama banyak yang didirikan pada masa Kemerdekaan yaitu sejak tahun 1945. Jumlah sekolah swasta terus meningkat untuk mengisi kebutuhan rakyat akan pendidikan. Menurut statistik pada tahun 1979 jumlah seluruh sekolah Negeri dan Swasta di Jawa Tengah adalah 20.231, di mana 18% adalah sekolah-sekolah Swasta. Jumlah seluruh murid pada tahun 1979 adalah 4.390.967, di mana jumlah murid swasta mencapai 13%.

Di bawah ini diuraikan berturut-turut perkembangan sekolah-sekolah Swasta.

5.3.1 Sekolah Swasta Berasaskan Islam

Sekolah-sekolah swasta yang berasaskan Islam sebagian besar merupakan kelanjutan dari sekolah-sekolah yang telah didirikan jaman Belanda, misalnya Sekolah Muhammadiyah. Sekolah ini cukup tersebar di daerahdaerah seluruh Jawa Tengah. Dari Tabel 5 nampak bahwa 88% Sekolah-sekolah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas Islam adalah sekolah Muhammadiyah. Hal ini mungkin disebabkan karena pengalaman di bidang pendidikan formal yang mengambil sistem Barat adalah yang paling lama, memiliki organisasi yang lebih rapi dari sekolah Islam yang lain di samping dedikasi di bidang pendidikan yang tinggi.

Sekolah-sekolah Islam yang terbanyak terdapat di Kabupaten Purwodadi/Grobogan, kemudian di Kabupaten Cilacap dan Kotamadya Semarang.

Selain sekolah-sekolah Islam umum seperti tersebut di atas, terdapat pula pendidikan Madrasah. Sekolah Madrasah adalah perkembangan dari pendidikan Islam tradisional, di mana mata pelajaran keimanan lebih banyak diberikan daripada mata

pelajaran umum. Namun sekolah Madrasah ini telah disesuaikan dengan sistem pendidikan formal, dengan jenjang Sekolah Dasar 6 tahun (Ibtidaiyah), SLP (Tsanawiyah) 3 tahun dan SLA (Aliyah) 3 tahun.

Madrasah-madrasah umumnya diasuh oleh organisasi-organisasi Islam, seperti Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah. Pendidikan ini mempunyai basis yang kuat di pedesaan dan merupakan sarana pendidikan generasi muda dari masyarakat tradisional sejak jaman dahulu. Di Jawa Tengah menurut statistik tahun 1978. (Tabel: 9) madrasah di Jawa Tengah paling banyak terdapat di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Kabupaten Pati.

5.3.2 *Sekolah Swasta Berasaskan Kristen*

Sekolah-sekolah yang berasaskan Kristen juga sebagian besar merupakan kelanjutan sekolah yang telah didirikan pada jaman Belanda. Perkembangan pada Kemerdekaan hingga sekarang cukup baik. Sekolah-sekolah Kristen dikoordinasi oleh Majelis Pendidikan Kristen Daerah Jawa Tengah berpusat di Salatiga.

Menurut Statistik tahun 1978 jumlah sekolah-sekolah Kristen di Jawa Tengah adalah 1,5% dari seluruh sekolah di Jawa Tengah (SD, SLP, SLA) (Tabel 6). Sekolah-sekolah tersebut paling banyak terdapat di Kabupaten Semarang, Kotamadya Semarang dan Kotamadya Surakarta

5.3.3 *Sekolah Swasta Berasaskan Katolik*

Sekolah-sekolah Katolik berkembang baik, sebagian besar melanjutkan pendidikan yang sudah dikembangkan pada jaman Belanda. Sekolah-sekolah Katolik diasuh oleh yayasan Kanisius, yayasan Pangudi Luhur dan yayasan Marsudirini yang diasuh oleh para Suster Fransiskan. Sekolah-sekolah tersebut paling banyak terdapat di Kotamadya Semarang, Kotamadya Surakarta dan Kabupaten Semarang (Tabel: 7), Sekolah Katolik meliputi 1% dari seluruh sekolah di Jawa Tengah.

5.3.4 Sekolah Swasta Berasaskan Non Agama

Sekolah-sekolah Swasta non Agama banyak jumlah sekolah-sekolah ini berkembang pesat setelah tahun 1945. Sekolah-sekolah ini mencapai 5,5% dari jumlah semua sekolah (SD, SLP, SLA) di Jawa Tengah (Tabel: 8).

5.3.5 Sekolah Kejuruan Swasta

5.3.5.1 Sekolah Farming Menengah Atas di Ungaran

1. Latar Belakang dan Sejarah berdirinya SFMA

Gagasan mendirikan Sekolah Farming Menengah Atas adalah dari Bapak Sarino Mangunpranoto (bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Beliau ingin, menciptakan pendidikan yang cocok untuk kebutuhan pengembangan pedesaan. Kemiskinan rakyat desa yang jumlahnya paling banyak dan sebagian besar tinggal di desa tidak dapat ditangani hanya dengan pendidikan sekolah umum yang intelektualistis bagi rakyat desa. Setelah peninjauan ke berbagai negara seperti USA dan Eropa, maka ditemukan suatu sekolah yang dianggap cocok untuk melayani masyarakat pedesaan yaitu Sekolah Farming Menengah Atas.

Sekolah tersebut merupakan perpaduan antara pendidikan formal dan informal. Sekolah ini juga merupakan pendidikan tingkat bawah dari Akademi Farming yang telah didirikan oleh Bapak Sutiman beserta Bapak Sarino di Semarang.

S.F.M.A. didirikan tahun 1961 di Ungaran, menempati tanah seluas kurang lebih 15 Ha yang dipakai untuk gedung sekolah, perumahan guru, asrama murid dan kebun percobaan.

2. Asas dan Tujuan

S.F.M.A. berasas Pancasila dan UUD 1945, tidak berdasarkan Agama tertentu. Tujuannya ialah

menghasilkan tenaga menengah yang trampil di bidang pertanian (termasuk peternakan, bidang pertanian (termasuk peternakan, perikanan), serta menghayati masalah pedesaan, guna membantu mengatasi kemiskinan di desa.

3. Perkembangan Pendidikan

Semua SFMA menempati gedung SMP Negeri Ungaran. Kemudian dengan bantuan dana dari masyarakat tahun 1973 memiliki gedung SFMA sendiri. Dengan bantuan QXFAM dapat mengembangkan prasarana gedung, laboratorium, bengkel kerja dan peralatan.

Pada dasarnya murid-murid dididik membuat peralatan sendiri yang sederhana agar di desa tidak tergantung kepada alat dari luar negeri. Meskipun peralatan modern juga diperkenalkan kepada mereka.

Sampai tahun 1980 alumni SFMA berjumlah 175, putra dan putri 80% bekerja di tempat-tempat kerja sesuai dengan keahliannya, 20% kembali ke desa dan bekerja di desa. Lulusan SFMA sebagian menjadi petugas kecamatan, pamong desa dan kader tani informal. Bimbingan dan teladan mereka di desa sangat bermanfaat bagi kemajuan rakyat desa.

Murid-murid SFMA kira-kira 50% dari keluarga petani, sedang lainnya dari berbagai golongan (pegawai negeri, ABRI, guru, pedagang). Guru-guru adalah tenaga ahli/guru yang menguasai vak tertentu, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi, ahli masyarakat desa dan sebagainya. Murid-murid diwajibkan tinggal di asrama yang disediakan sekolah.

5.3.6 Perguruan Tinggi Swasta

Perguruan Tinggi Swasta yang merupakan hasrat masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah sejalan dengan program pendidikan nasional. Dalam batas tertentu

fungsinya tidak berbeda dengan perguruan Tinggi Negeri, yaitu:

- a. menjadikan dirinya pusat pemeliharaan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional masa sekarang dan masa mendatang.
- b. mendidik mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian dan bertanggungjawab terhadap masa depan Bangsa dan Negara Indonesia.
- c. menggiatkan mahasiswa agar berinanfaat bagi usaha pembangunan nasional dan daerah.
- d. mengembangkan tata kehidupan kampus yang memadahi dan berkepribadian Nasional.

Kehadiran Perguruan Tinggi Swasta memang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat antara lain terus meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pendidikan tinggi sementara daya tampung Perguruan Tinggi Negeri terlalu kecil dibandingkan dengan makin meningkatnya para lulusan SLTA. Timbul masalah kemudian mengenai Perguruan Tinggi Swasta yang bagaimanakah yang diijinkan. dan berhak men'gambil bagian secara aktif dalam program pendidikan tiaggi. Tentu saja Perguruan Tinggi Swasta itu hendaknya didirikan dengan motivasi yang jelas di atas landasan konsep yang kokoh serta ditunjang oleh berbagai fasilitas yang minimal harus dipenuhi demi terselenggaranya pendidikan yang bersangkutan.

Angin baru yang menyegarkan kehidupan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia mulai terasa sejak tahun 1975, yaitu setelah pada akhir tahun 1974 dibentuk Direktorat Perguruan Tinggi Swasta. Dewasa ini (1980) di seluruh Indonesia terdapat 342 buah Perguruan Tinggi Swasta yang sebagian besar berbentuk Akademi, tersebar di seluruh wilayah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dengan jumlah mahasiswa dalam tahun 1978 sebanyak 140 ribu orang.

Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta dirumuskan dalam Pembinaan Lima Tahun Pertama disingkat Bilita 1, yang tujuannya antara lain:

- a. membantu PTS agar dapat melaksanakan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara bertanggung jawab ditinjau dari segi ilmiah kemasyarakatan.
- b. mengantarkan PTS yang berpotensi untuk mencapai taraf perkembangan sehingga kelak dapat berkembang dengan kekuatannya sendiri.
- c. menyetatkan pertumbuhan dan perkembangan subsistem PTS, sehingga subsistem itu berperan dan berfungsi secara nyata dalam pembangunan nasional dan daerah dalam menunjang dan menuju terwujudnya satu sistem pendidikan tinggi nasional.

Dengan memperhatikan beberapa ketentuan dalam Bilita I dapatlah diharapkan bahwa di kalangan masyarakat tidak akan timbul keresahan atau kekhawatiran terhadap berbagai bentuk PTS yang tidak bertanggung jawab, sebab semua PTS harus mengikuti program Bilita jika masih menghendaki terus hidup dan berkembang.

Daerah Jawa Tengah termasuk daerah yang berpotensi besar dalam bidang pendidikan tinggi, terbukti dengan beberapa Perguruan Tinggi yang terdapat di daerah Jawa Tengah, baik negeri maupun swasta atau; kedinasan Perguruan Tinggi Swasta yang terdapat di Jawa Tengah seluruhnya berjumlah 31 buah yang terdiri: Universitas (4), Institut (8), Akademi (18) dan Sekolah Tinggi (1). Mereka tersebar di kota-kota: Semarang (14), Surakarta (8), Magelang (2), serta Purwokerto, Purworejo, Klaten, Karanganyar, Kudus, Sukoharjo, Salatiga masing-masing sebuah.

Berikut ini akan dibicarakan secara singkat beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

a. Universitas 17 Agustus 1945 (Semarang)

Nama Universitas 17 Agustus 1945 disingkat UNTAG didirikan oleh Yayasan Universitas 17 Agustus 1945. Dalam tahun 1970 yayasan tersebut diubah menjadi Yayasan Pembinaan Pendidikan 17 Agustus 1945 yang mengasuh UNTAG AKABA 17, Sekolah Pengatur Analisis dan SMA 17.

Meskipun di Jakarta dan Surabaya terdapat nama yang sama yaitu Universitas 17 Agustus 1945, namun UNTAG Semarang tidak ada hubungannya atau bukan merupakan Perguruan Tinggi Cabang. UNTAG Semarang mempunyai 4 Fakultas: Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Jumlah mahasiswa dalam th. 1980 sebanyak 2.081 sedang jumlah Dosen 141 orang dan Asisten 81 orang. Sedangkan jumlah karyawan ada 62 orang. Kampus UNTAG Semarang berada di jalan Seteran Dalam 9 Semarang. Lulusan UNTAG Fakultas Hukum 65 Sarjana lengkap, Fakultas Sospol 29, Sarjana lengkap dan 4 Sarjana lengkap Fakultas Teknik.

b. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang.

UNISSULA didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf pada tgl. 20 Mei 1962, yang meliputi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik dan Fakultas Syariah. Di samping itu terdapat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Jumlah Mahasiswa 2.023 orang (1980) dan jumlah Dosen 242 orang serta Asisten 67 orang.

UNISSULA memiliki Rumah Sakit "Sultan Agung" tempat praktek para calon dokter dari Universitas tersebut. Perpustakaan UNISSULA memiliki 8.507 Exemplar buku yang terdiri dari 4.216 judul.

Untuk Fakultas Kedokteran telah diselenggarakan Ujian Negara oleh Consorciium Medical Sciences (CMS), yaitu suatu badan yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan Menteri P dan K, telah diluluskan 113 Sarjana Kedokteran (Drs. Med) dan 18 orang dokter. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat telah lulus Ujian Negara 323 orang Sarjana Muda dari 41 Sarjana Lengkap.

Perincian Ujian Negara UNISSULA selengkapnya sebagai berikut :

	Fakultas	Sarjana Muda	Sarjana
a.	Fakultas Hukum & Penget. Masy	323	41
b.	Fakultas Kedokteran	113	18
c.	Fakultas Syariah	103	12
d.	Fakultas Ekonomi	114	9
e.	Fakultas Tehnik	8	1
	Jumlah	661	81

UNISSULA menempati kampusnya di jalan Seroja Selatan 14 A dan ji. Kaligawe Semarang.

c. Universitas Kristen SATYA WACANA di Salatiga

Universitas Kristen Satya Wacana pada mulanya merupakan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia yang bertujuan untuk mendidik Calon guru di Sekolah Kristen yang pada sekitar tahun 1950 masih kurang. Tanggal didirikannya UKSW pada 30 Nopember 1956. Kemudian pada tahun 1959 Perguruan Tinggi tersebut dikembangkan menjadi Universitas Kristen Satya Wacana yang berarti "Setia Kepada Firman Tuhan".

Semula UKSW telah memiliki tiga buah Fakultas Yaitu : Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dalam th. 1980 UKSW telah memiliki tujuh fakultas :

1. Fakultas Ekonomi
2. Fakultas Hukum
3. Fakultas Biologi
4. Fakultas Pertanian
5. Fakultas Teknik Elektronik
6. Fakultas Theologi
7. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan Tiga departemen yaitu :
 - Ilmu Pendidikan
 - Ilmu Bahasa dan
 - Ilmu-ilmu Sosial

Jumlah mahasiswa dalam tahun 1980 sebanyak 2.707 orang. Dari jumlah tersebut 59% beragama Kristen Protestan 21,57% beragama Kristen Katholik, 17,84% beragama Islam, 0,59% beragama Hindu/Budha, 0,41% beragama Khong Hoe Tjoe dan 0,04% beraliran kepercayaan.

Pada akhir tahun 1979 jumlah alumni Sarjana Muda dan Sarjana lengkap tercatat 3.923 orang yang tersebar di berbagai daerah wilayah Indonesia. Di beberapa kota besar telah berdiri Ikatan Alumni Satya Wacana (Ikasatwa) yang sering membantu Almamaternya dalam pengumpulan dana pendidikan. Sementara itu mereka juga membantu testing masuk UKSW di Kupang, Ujungpandang, Biak, Ambon dan lain-lain Dengan cara demikian maka para calon mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah-daerah luar Jawa tidak perlu harus datang untuk mengikuti testing di Salatiga. Hasil testing dikirim ke Salatiga untuk dikoreksi oleh Panitia penerimaan mahasiswa baru UKSW.

Kampus UKSW memiliki fasilitas yang memenuhi syarat bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi., Di

dalamnya terdapat Toko Buku, Pusat Bimbingan, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Fakultas Pertanian, Laboratorium Fakultas Esak, Gedung Olah Raga, Gedung Perpustakaan, Lapangan Olah Raga, Asrama Mahasiswa, Perumahan Dosen, Cafeteria dan lain-lain Perpustakaan pusat UKSW merupakan salah satu perpustakaan terbaik di Indonesia, memiliki koleksi buku. 44.042 eksemplar 543 judul majalah. Asrama mahasiswa UKSW dapat menampung mahasiswa sebanyak sekitar 300 orang, Para mahasiswa tingkat sarjana diharapkan supaya tinggal di luar asrama supaya mempunyai pengalaman masyarakat.

UKSW juga memberikan beasiswa yang diambilkan 20% dari anggaran belanja tahunan UKSW. Beberapa tahun yang lalu UKSW ditunjuk sebagai penyelenggara Kegiatan Pusat Pengembangan Sistem Pengajaran di Perguruan Tinggi (PPSP) yang merupakan Program Nasional Departemen P dan K.

d. Universitas Tidar Magelang (UTM).

DPRD Kotamadya Magelang mengeluarkan SK : No. 14 Tahun 1977 tentang persetujuannya untuk menyediakan anggaran sebesar dua puluh juta rupiah bagi persiapan sebuah kampus perguruan Tinggi Swasta.

Langkah ini disusul oleh musyawarah antara Walikota Magelang dan pengurus Yayasan "Artha Bhakti" Magelang serta Kopertis Wilayah V pada bulan Pebruari dan April tahun 1978 dan kemudian menghasilkan SK Walikota kotamadya Magelang No. DP 300/I/ 15/1636 tanggal 16 Maret 1978 mengenai penggabungan seluruh Akademi yang ada di Magelang untuk selanjutnya menjadi sebuah Universitas. Akhirnya pada tanggal 9 Januari 1979 terbentuklah Badan Hukum bernama Yayasan

Perguruan Tinggi Tidar dan pada tanggal 2 Mei 1979 berdirilah Universitas Tidar Magelang.

Dalam lingkungan Kopertis Wilayah I/ Jawa Tengah jelaslah bahwa Universitas Tidar Magelang merupakan yang termuda. Saat -ini (1980) mempunyai lima Fakultas, yaitu:

Fakultas Sastra Budaya jurusan Bahasa/Perancis, Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Umum, Fakultas Pertanian dengan jurusan Agronomi, Fakultas Sosial Politik dengan jurusan Administrasi Negara.

Jumlah mahasiswa semester pertama tahun 1979 tercatat 692 orang dan pada semester kedua menyusut menjadi 551 orang. Penyusutan ini terutama dari kalangan mahasiswa yang berasal dari SLTA kejuruan (misalnya STM) karena kebanyakan mengalami kesulitan dalam perkuliahan.

Tenaga pengajar tetap sebanyak 13 orang tenaga pengajar tidak tetap dibantu dari Yogyakarta dan Surakarta, sehingga seluruhnyaberjumlah 51 orang.

e. Akademi Farming Semarang.

Akademi Farming Semarang didirikan pada tanggal 1 Desember 1960. Adapun tujuan idealnya mendidik para pemuda Indonesia untuk menjadi pelopor pembaharuan terutama dalam usaha mengubah sikap mental tradisional menjadi sikap mental modern yang menghargai sikap kewiraswastaan. Tujuan praktik adalah mendidik tenaga ahli menengah yang erat hubungannya dengan bidang peternakan dan perikanan.

Mengingat bahwa Akademi Farming Semarang merupakan satu-satunya di Indonesia, maka kurikulumnya pun bersifat khas. Dalam masa studi selama tiga tahun para mahasiswa menerima sekitar

60 macam mata kuliah yang umumnya merupakan mata kuliah dasar.

Sejak berdirinya sampai tahun 1980 Akademi Farming telah meluluskan sebanyak 946 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini pada tiap propinsi di seluruh Indonesia dapat dikatakan terdapat lulusan Akademi Farming Semarang. Dalam programnya dinyatakan bahwa pada tahun 1988 diharapkan kelak tiap kabupaten terdapat tenaga ahli lulusan Akademi tersebut.

Dalam tahun 1980 tercatat jumlah Dosen tetap tujuh orang dan dosen tidak tetap 38 orang ditambah sembilan orang Asisten. Dalam rangka pengembangan fasilitas kampus dan laboratorium, Akademi Farming Semarang telah memperoleh tanah seluas 5 Ha di Semarang Selatan, melalui Kopertis Wilayah V. Sementara ini Akademi tersebut telah mempergunakan tanah seluas 3 Hektar di Sewakul Ungaran untuk praktek para mahasiswa.

Kegiatan praktikum kimia, mikrobiologi, biokimia, peternakan, ilmu alam dilakukan di kampus Akademi Farming, Milgas Atas (Semarang). Praktikum hasil ternak diselenggarakan di Rumah Pemotongan Hewan Kabluk (Semarang Timur) dan praktek perikanan darat diadakan di Siwarak (Ungaran).

Masa depan lulusan para Akademi Farming cukup cerah. Penempatan tenaga para lulusan Akademi tersebut boleh dikatakan tidak sulit mengingat jalinan kerja sama yang baik selama ini antara lain dengan pihak Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perkebunan Jawa Tengah, OXFAM (Inggris), Dinas Pertanian Rakyat dan lain-lain.

Sejak tanggal 26 Maret 1966 Akademi Farming berstatus "diakui". Ternyata bahwa Akademi

Farming Semarang juga telah dikenal oleh masyarakat propinsi Nusa Tenggara Timur, terbukti sejak beberapa tahun lalu telah mengirimkan rata-rata 12 orang mahasiswa setiap tahun untuk kuliah pada Akademi tersebut dengan biaya ikatan dinas dari Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur.

f Universitas Muhammadiyah.

Dengan persetujuan Kopertis V IKIP Muhammadiyah Surakarta yang berdiri pada 1 Oktober 1958 dikembangkan menjadi Universitas Muhammadiyah dengan fakultas-fakultas ilmu Pendidikan, Keguruan, Ekonomi, Hukum dan Teknik. Sedang Fakultas yang bernaung di bawah koordinator Perguruan Tinggi Agama Swasta ialah Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin.

Jumlah mahasiswanya sekarang sekitar 2.500 orang sedang jumlah tenaga pengajar seluruhnya 125 orang dosen tidak tetap dibantu dari UNS Sebelas Maret, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang dan instansi-instansi yang lain-lain

Sampai tahun 1980 telah lulus 6 orang sarjana lengkap negara, 1.857 sarjana muda negara dan 34 sarjana muda lokal.

g. A K P E L N I Semarang

Akpelni atau Akademi Pelayaran Niaga Indonesia yang beralamat di jl. Mgr. Sugiopranoto 37 (Bulu) Semarang didirikan pada tanggal 17 September 1964 berstatus "terdaftar" pada Direktorat Perhubungan Laut No. 724/TPR/Pend. 67 dan terdaftar pula pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 43/DPT/B/73. Dengan demikian Akpelni mempunyai dua induk yang masing-masing berkepentingan dengan masalah akademik, sedangkan Direktorat Pendidikan Tinggi melalui Kopertis V Jawa Tengah berkepentingan

dengan masalah administrasi pendidikan pada umumnya.

Sampai saat tahun 1980 pembinaan dari kedua induk tersebut berjalan lancar.

Tujuan Pendidikan di Akpelni adalah mendidik calon perwira pelaut petugas yang cakap dan ahli dalam bidang pelayaran, berjiwa-Pancasila dan ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan Nusa dan Bangsa serta umat manusia.

Sampai bulan Januari 1980 Akpelni Semarang telah meluluskan 493 orang terdiri atas :

- 160 orang berijasah Mualim Pelayaran III jurusan Nautika.
- 247 orang Ahli Mesin Kapal.
- 86 orang berijasah ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga.

Banyak di antaranya telah mengikuti ujian Negara, namun tidak diperoleh berita terperinci beberapa di antaranya yang, telah lulus ujian Negara tersebut.

Beasiswa dan Ikatan Dinas juga diberikan para taruna dari pihak PT PELNI dan Direktorat Perkapalan, PN Pertamina. Pada tahun 1973/1974 PT Pelni telah menyediakan Ikatan Dinas kepada 37 taruna, jurusan Nautika dan Tehnika, pada tahun 1974/1975 kepada 24 Taruna dan tahun 1976/1977 kepada 12 orang Taruna Para Taruna yang telah mendapat Ikatan Dinas setelah lulus bekerja pada PT. PELNI,

Sementara itu Direktorat Perkapalan PN Pertamina pada tahun 1975/1976 telah memberikan Ikatan Dinas kepada 25 orang taruna dan Dep. P dan K telah memberikan beasiswa kepada sejumlah taruna dari semua jurusan.

Tenaga pengajar dibantu dari UNDIP, IKIP. Negeri Semarang, Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B) dan Angkatan Laut yang berkedudukan di Semarang. Akpelni juga mendapat bantuan tanah seluas 2 hektar untuk kampus yang terletak di Semarang Selatan.

h Akademi Maritim Nasional (AMNI) di Semarang.

AMNI didirikan pada tanggal 9 September 1963. Dalam beberapa hal mempunyai persamaan dengan Akpelni baik dalam pembinaan bidang Akademi maupun bidang administrasi pendidikan.

AMNI berstatus terdaftar pada Ditjen Perhubungan Laut No. DPL-902/1/a tanggal 13 Agustus 1975 dan juga terdaftar pada Departemen P dan K No. 126/B-SWT/P/65 tanggal 14 September 1965.

AMNI memiliki tiga jurusan yaitu: Nautika, Tehnika dan Tatalaksana. Sampai tahun 1980 AMNI telah menghasilkan 786 sarjana muda Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan dari jumlah tersebut telah lulus ujian Negara sebanyak 226 orang Ahli Mesin Kapal dan sembilan di antaranya lulus ujian Negara.

i. Institut Teknologi Katholik Semarang (ITKS) dan Akademi Teknologi Semarang (ATS)

ITKS didirikan oleh Yayasan Sandjoyo pada tahun 1972 merupakan kelanjutan dari Fakultas Teknik Universitas Kristenn Atmajaya', dan terdaftar di Kopertis V tahun 1975 SK. 009/Kpt/75. ITKS mempunyai jurusan Arsitektur dan telah berhasil meluluskan enam orang sarjana muda Negara untuk angkatan yang pertama. Sampai sekarang jurusan Arsitektur memiliki 250 orang mahasiswa. Mulai tahun 1980 ini dibuka jurusan Sipil yang hanya mampu menampung sekitar 60 orang mahasiswa baru. Jumlah Pengajar sebanyak 60 orang, 10% di

antaranya merupakan dosen tetap, 30% dibantu dari instansi pemerintah dan swasta, 60% dosen tidak tetap dari UNDIP. Dalam tahun 1979 ITKS mendapat bantuan lima orang dosen tetap dari pemerintah.

Kecuali itu ITKS juga menyelenggarakan berbagai kursus bagi para lulusan SLTA untuk menambah ketrampilan, serta para pelajar yang putus sekolah. Kursus-kursus tersebut meliputi: Dekorasi, Maintenance Bangunan, Tata Tanam, Juru Gambar dan Konstruksi lama kursus antara 1-3 bulan dan tiap angkatan menampung sekitar 30 orang.

ATS didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tehnologi Semarang. yang berdiri dengan Akte Notaris No. 143 tanggal 26 April 1979. Terdaftar dengan ijin Kopertis V Jawa Tengah dengan No. 465/Kpt/VI/1979 tanggal I Juni 1979. ATS usianya masih terlalu muda, menempati gedung -STM Cinde (Semarang), memiliki jurusan Mesin dan Jurusan Sipil. Jumlah mahasiswanya sebanyak 168 orang.

g. **I K I P Veteran**

IKIP Veteran didirikan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran atas dasar SK Menteri Veteran dan Demobilisasi tanggal 27 Juni 1967 Nomor 47/Kpts/Men. Vet/67. Terdaftar pada Departemen P dan K berdasarkan SK Menteri P dan K No. 174/PT/111/69 tanggal 18 Maret 1969.

IKIP Veteran Jawa Tengah memiliki tiga Fakultas yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Sosial dengan jurusan Civics/Hukum, Ekonomi, Geografi dan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Didaktik

Kuirikulum dan Bimbingan/Penyuluhan, serta Fakultas Tehnik dengan Jurusan Tehnik Mesin dan Tehnik Sipil.

IKIP Veteran pernah mempunyai cabang-cabangnya di Yogyakarta, Wonosari, Boyolali dan Magelang, yang semuanya cabang-cabang tersebut sekarang berdiri sendiri. Kuliahnya waktu sore hari dan menempati gedung SMEA Negeri di Jl. Plampitan Semarang. IKIP Veteran telah berhasil meluluskan sekitar 500 orang sarjana muda ujian Negara.

k. **A K A B A 17 (Semarang)**

Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 pada mulanya merupakan Fakultas Sastra UNTAG. Fakultas Sastra yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1963 ternyata sampai tahun 1970 tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, terbukti jumlah mahasiswanya makin menurun.

Dengan beberapa pertimbangan akhirnya Fakultas tersebut pada tanggal 10 Nopember 1970 diubah menjadi Akademi Bahasa 17 dengan studi pokok bahasa Inggris. Di samping itu dikembangkan pula bidang studi bahasa Belanda dan Bahasa Cina (Mandarin). Akaba 17 telah meluluskan sekitar 190 orang sarjana muda dan 135 orang telah menempuh ujian negara.

1. **Akademi Publisistik Pembangunan Dipanegara (APPD) di Semarang.**

APPD yang menempati gedung Sekolah Kesatrian di Jalan Gajah Mada 119 A Semarang ini berstatus terdaftar pada Kopertis Wilayah V dengan SK No. 003/KPT/111/1974, didirikan oleh tokoh-tokoh-pendidik dan Pers di Semarang.

Tujuan pendidikan ialah untuk mendidik para mahasiswa menjadi tenaga terampil dalam bidang pers dan komunikasi massa pada umumnya. Kuliah diberikan waktu sore hari dan para mahasiswanya sebagian adalah para pegawai.

Kemajuan yang telah dicapai oleh APPD dapat dilihat dari hasil kelulusannya. Ujian Negara telah dilaksanakan empat kali dengan hasil sebagai, berikut:

Tahun 1975 I lulus 88%

Tahun 1975 II lulus 92%

Tahun 1975 III lulus 100%

Tahun 1975 IV lulus 84% (1979).

Jumlah mahasiswa yang telah lulus ujian negara seluruhnya 112 orang (1980). Jumlah tenaga pengajar ada 35 orang. Masih ada 18 buah Perguruan Tinggi Swasta yang belum sempat termasuk dalam laporan ini. Hal itu bukan karena kurang penting peranannya, melainkan beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang telah dibicarakan secara singkat di atas dapatlah mewakilinya dari keadaan pertumbuhan serta perkembangan Perguruan Tinggi Swasta di daerah Jawa Tengah.

Sebagian dari Perguruan Tinggi tersebut sudah berstatus terdaftar dalam Kopertis Wilayah V dan sebagian masih dalam proses penyelesaian status. Ternyata dari 31 Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah 18 buah berbentuk Akademi, berarti lebih dari 58%.

5.3.7 *Pendidikan Swasta Non Formal*

Selain pendidikan formal, pendidikan non formal juga diselenggarakan oleh pihak swasta. Salah satu contoh adalah : Kursus Sosial Ekonomi Desa Pancasila (KSED).

a. Latar Belakang dan Sejarah berdirinya K.S.E.D.

Lembaga ini didirikan pada tahun 1958 di Semarang oleh Ibu Eny Miryam yang bekerja sama dengan Ibu Benediete Milcent salah seorang anggota Organisasi The Grail,

berkebangsaan Prancis, sedang Ibu Eny Miryam adalah seorang warga negara Indonesia..

Gagasan ini timbul setelah beliau melihat adanya kepincangan yang menyolok antara wanita Kota dengan Desa. Dengan Perjuangan yang berat melalui segala rintangan baik dari Pemerintah, masyarakat, maupun lingkungan keluarga, akhirnya pada tanggal 8 September 1958 Ibu Eny dan kawan-kawan berhasil memulai Kursus yang pertama kali selama tiga bulan dengan bantuan para pastur Paroki dapat dikumpulkan 14 orang pemuda desa yang berasal dari daerah Yogyakarta, Solo, Magelang untuk dididik dan diberi pengetahuan/ketrampilan Kewanitaan dan kemasyarakatan, yang nantinya dimanfaatkan untuk dirinya maupun disebarkan kepada masyarakat di sekelilingnya.

b. Asas dan Tujuan K.S.E.D.

Asas KSED adalah Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya melayani masyarakat desa dengan cara mendidik para kursus sebagai calon pelopor pembangunan Desa, oleh karenanya materi yang diberikan juga harus disesuaikan dengan keadaan Desa.

c. Perkembangan Pendidikan KSED.

Ibu Eny Miryam sebagai pimpinan Kursus merasa bahwa fasilitas Kursus di Semarang kurang memenuhi syarat untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran KSED adalah desa tetapi para Kursus tinggal di kota, sehingga selama tiga bulan mereka terpisah dengan kehidupan desa. Untuk mengatasi hal itu, akhirnya berhasil, memperoleh tanah dari keluarga Ibu Eny sendiri, yang terletak di desa Kenteng Bandungan, Ambarawa (7 Km dari Kota Ambarawa), atas kerelaan keluarganya di atas tanah seluas kurang lebih 6.000 m² didirikan bangunan untuk tempat Kursus serta Asrama.

KSED dipindahkan dari Semarang ke Bandungan pada awal 1962. Tempat tersebut sampai sekarang masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan KSED. Kurikulum KSED Pancasila meliputi bidang-bidang yang praktis diperlukan di masyarakat misalnya:

1. Bidang pertanian pengetahuan beberapa jenis tanaman bergizi, Palawija, sayur-sayuran beserta praktek penanamannya.
2. Peternakan.
3. Tanaman Jamu dan pengobatan Tradisional
4. Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Masyarakat.
5. Industri Rumah Tangga.
6. Koperasi Perwarungan, usaha bersama.
7. Pembangunan masyarakat dan moral kerja.

Sampai tahun 1978 KSED telah mendidik 808 orang dan dipersiapkan sebagai tenaga pemhangunan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

BAB VI

P E N U T U P

6.1 Proyeksi Pendidikan Masa Depan

Kegiatan pencatatan dan pengumpulan data Sejarah pendidikan di daerah Jawa Tengah akan bermanfaat sekiranya dari hasil laporan tersebut dapat dijadikan pedoman untuk langkah pengembangan pendidikan masa depan di daerah tersebut.

Jawa Tengah memiliki beberapa bentuk pendidikan atau jenis sekolah yang khas dan tidak ada di daerah lain, jadi mungkin satu-satunya di Indonrsia, yakni Sekolah Menengah Kerajinan Kayu (Semarang), Akademi Farming, STP Ukir (Jepara), Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang, Sekolah Seni Tari dan Karawitan (Surakarta), Pendidikan bagi anak-anak Cacad (Surakarta), Sekolah Luar Biasa untuk anak-anak tuna wicara dan tuna rungu (di Wonosobo), Akademi Minyak dan Gas Bumi (Cepu), dan lain sebagainya. Meskipun beberapa jenis pendidikan khusus tersebut tidak berada dalam naungan Departemen P dan K, namun pengembangannya erat hubungannya dengan kegiatan pendidikan yang langsung di bawah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

Sejarah pendidikan di Jawa Tengah yaitu berupa pendidikan Tradisional telah dimulai sejak kedatangan pengaruh kebudayaan Hindu/Budha, kemudian diteruskan dengan kedatangan agama Islam.

Pendidikan yang bercorak Hindu/Budha meskipun sisanya sulit kita temukan, namun dengan adanya beberapa buku peninggalan sejarah yang bercorak Hindu/Budha dapat dikatakan bahwa di Jawa Tengah pernah berkembang sistem pendidikan Hindu/Budha.

Pendidikan Hindu/Budha di Indonesia, khususnya daerah Jawa Tengah, menggunakan sistem Asrama, yaitu murid bertempat tinggal bersama guru dalam satu asrama atau pemondokan. Sistem pendidikan padepokan pada masa kedatangan Islam berkembang menjadi sistem pondok pesantren. Pendidikan pondok pesantren ini, sampai sekarang (1980) masih ada bahkan telah mengalami perkembangan baik dalam sistem pendidikannya maupun kurikulumnya.

Di tiap daerah kabupaten/kotamadya seluruh Jawa Tengah yang jumlahnya 35 buah terdapat pondok pesantren baik yang masih bersifat tradisional maupun yang modern. Beberapa daerah kabupaten ada yang memiliki lebih dari 25 buah pondok pesantren seperti : Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Grobogan.

Selain pendidikan Islam tradisional (pesantren, madrasah), maupun Islam modern (Muhammadiyah), pendidikan swasta Kristen dan Katolik juga berkembang baik di wilayah Jawa Tengah. Pendidikan tersebut sejak jaman Belanda membantu mendidik rakyat kebanyakan yang tidak diterima di sekolah-sekolah Gubernemen. Sampai masa kini peranan pendidikan swasta Kristen, dan Katolik dan pendidikan swasta lainnya memberikan andil besar dalam membantu pendidikan di Jawa Tengah.

Problema yang dihadapi Jawa Tengah dalam bidang pendidikan antara lain makin bertambahnya jumlah anak usia sekolah sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk Jawa Tengah secara singkat sebagai berikut :

Tahun 1972: 22.317.000 orang.

Tahun 1978: 24.316.218 orang.

Sementara itu jumlah anak usia sekolah dalam tahun 1972 sekitar 3.503.802 orang. Tahun 1978 sekitar 7.423.489 orang. Dari jumlah tersebut yang dapat tertampung di sekolah-sekolah sekitar 50%.

Masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya:

1. Masih banyak jumlah anak yang putus sekolah, terutama tamatan SD. Sebagai gambaran dalam tahun 1975 jumlah lulusan SD sekitar 214.425 anak yang dapat tertampung di SLP banya sekitar 91.676 anak. Ini berarti daya tampung SLP baru mencapai 63,5%. Bagaimana nasib anak-anak SD yang tidak tertampung?
2. Jumlah penduduk Jawa Tengah yang buta huruf masih cukup banyak, yaitu berkisar 21,8%. Usaha-usaha mengatasi buta huruf selalu ditingkatkan.
3. Demi perkembangan pendidikan di Jawa Tengah perlu mendapat perhatian yaitu biaya pendidikan yang masih terasa mahal, baik yang menyangkut prasarana maupun sarana, termasuk gedung, alat pelajaran, buku-buku dan lain-lain
4. Kelambatan sistem informasi mempunyai pengaruh pula terhadap laju pembangunan dalam bidang pendidikan.
5. Bencana Alam yang sering terjadi menimpa beberapa daerah di Jawa Tengah seolah-olah menjadi suatu peristiwa yang rutin datangnya, yaitu banjir di musim hujan. Banjir sering mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat dan kelancaran perhubungan menjadi terganggu. Beberapa tempat pendidikan yang tertimpa bencana banjir mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan secara rutin dan kadang-kadang juga menimbulkan kerusakan atas gedung sekolah serta alat pendidikan dan alat pengajaran.

Dalam usaha meningkatkan perkembangan pendidikan di daerah Jawa Tengah, maka perlu diperhatikan tentang pola kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang meliputi daerah perbukitan, tanah datar dan daerah pesisir. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah mempunyai mata pencaharian bidang pertanian, sehingga perlu kiranya meningkatkan pendidikan pertanian, baik pada tingkat sekolah menengah maupun tingkat Perguruan Tinggi.

Sebagai akibat politik pendidikan Barat masa pemerintahan kolonial Belanda, maka telah timbul diskriminasi dalam pendidikan khususnya di Jawa Tengah dan di Indonesia pada umumnya.

Diskriminasi dalam bidang pendidikan mengakibatkan kurangnya peminat pada bidang pendidikan kejuruan, karena merupakan pendidikan terminal tingkat menengah. Kehidupan sosial ekonomis menghadapi tantangan dan berbagai tuntutan mengakibatkan masyarakat cenderung berkurang minatnya kepada pendidikan kejuruan tingkat menengah. Para orang tua lebih senang untuk menganjurkan anak-anaknya memasuki sekolah umum supaya dapat meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi sampai tingkat Akademi, Universitas ataupun Institut.

Pengetrapan sistem pendidikan Barat Modern di Indonesia khususnya di daerah-Jawa Tengah, mengakibatkan pula pendidikan tradisional tidak mendapat tempat untuk berkembang dan kurang pembinaan.

6.2 *Saran-saran*

1. Pendidikan non-formal yang bersifat tradisional seperti pondok Pesantren perlu ditingkatkan pembinaannya. Agar kegiatan pembinaan itu terarah sejalan dengan cita-cita Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan, perlu wadah komunikasi timbal-balik antara pusat dan daerah, yaitu pembentukan Badan Koordinator Pembinaan Pondok Pesantren Daerah Propinsi yang bekerja sama dengan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah.
2. Karena sebagian besar penduduk Jawa Tengah terdiri dari kaum petani dan nelayan, maka perlu dipikirkan untuk mendirikan sekolah pertanian tingkat menengah pada tiap kota bekas ibukota karesidenan.
3. Jenis pendidikan yang khas di daerah Jawa Tengah dan beberapa mungkin hanya satu-satunya di Indonesia supaya meningkatkan daya tampung bagi para peminatnya.
4. Di daerah Jawa Tengah banyak terdapat peninggalan Sejarah yang bernilai pendidikan yang perlu mendapat perhatian dalam pemeliharaan dan pengamanan. Kecuali sebagai penunjang pendidikan peninggalan-peninggalan sejarah tersebut mempunyai

peranan penting dalam rangka promosi kepariwisataan, sehingga perlu peningkatan fungsi cagar budaya.

5. Pendidikan bidang kesenian di Jawa Tengah perlu mendapat perhatian khusus, karena beberapa kesenian tradisional daerah Jawa Tengah ada yang hampir lenyap untuk memelihara kelestarian kesenian tradisional daerah Jawa Tengah, maka perlu peningkatan pendidikan bidang kesenian.
6. Bekas tempat-tempat pendidikan yang mengandung nilai-nilai sejarah sedapat mungkin dipelihara kelestariannya atau jika dipandang perlu dapat diperbaiki atau dipugar.
7. Kerena sebagian penduduk daerah pesisir utara Jawa Tengah bergantung dari hasil laut, maka perlu dipikirkan kemungkinannya mengadakan pendidikan yang mendidik calon ahli pengolahan produksi laut.

6.3 Kata Akhir

Hasil laporan ini masih banyak kekurangannya, semoga dapat dilengkapi oleh peneliti-peneliti yang lain, dengan pengungkapan berbagai aspek bidang pendidikan yang berkembang di daerah Jawa Tengah. Meskipun demikian kami mengharapkan semoga hasil laporan yang sederhana ini masih dapat bermanfaat untuk melengkapi penyusunan program pengembangan pendidikan di daerah Jawa Tengah.

Kepustakaan

Ibu Alim Masykuri, *Riwayat berdirinya Universitas Negeri Surakarta
Sebelas Maret*, UNS Sebelas Mar. ., 1977.

Abendanon. J. H. *Door Duisternis tot licht*, 'S. Gravenhage, Luctor
et Emergo, 1923.

Alex V. d. Leeden, Noeke Moediono, Gadis Rasid, *H. B. S. V
Samarang, Buku Keuangan Reuni 1976* Panitia Persiapan
Reuni ex HBS V Semarang.

Badan Penelitian dan Pembangunan Pendidikan dan Pengembangan
Kebudayaan Dep. P dan K., *Pendidikan di Indonesia
1900--1940*, I., Jakarta, 1977.

-----, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta,
1979.

Berg, H. J. Van den Dr. H. Keskamp et. al, *Dari Panggung Peristiwa
Sejarah Dunia I - H*, J. B. Wolters, Jakarta, 1952.

Bertsch. A. P. - Samuel Brusse et al., *Hoogere Burgerschool
Semarang*, 1 Nopember 1877--1977.

Burger, D. H. - Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis
Indonesia*, jilid 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.

Chjs, J. A. Van der., *Bijdragen tot de Geschiedennis Van het Inlandsch
Onderwijs in Nederlandsch Indie*.

- Djamhur dan Danasuparta, Drs., *Sejarah Pendidikan*, Pen. CV Ilmu. Bandung.
- Furnivall, J. S., *Netherland India - A Study of Plural Economy*, Cambridge, University, Press, 1944.
- Graaf, H. J. de., *Geschiedennis Van Indonesia*, 'S-Gravenhage Bandung, 1949,
- Hall, DGE, A. *History of Southeast Asia*, Mac Millan, London Melborne - Toronto, 1970.
- Koentjaraningrat, Prof. Dr., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cetakan III, Djambatan, Jakarta, 1976.
- Krom, Prof. Dr. N. J., *Zaman Hindu*, terjemahan dari buku "Hindoe Javaansche Tijd" Oleh Arif Affendi, Pt. Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Lembaga Reserch & Survey IAIN WALISONGO. *Laporan Hasil Proyek Penelitian Bahan-Bahan Sejarah Islam di Jawa Tengah bagian Utara*, Semarang, 1974.
- Leur, J. C. Van., *Indonesian Trade and Society*, W. Van Hoeve Ltd - The Hague - Bandung, 1955.
- Majelis Luhur Taman Siswa, *Taman Siswa 30 Tahun*, Yogyakarta, 1955.
- Muskens - Pr. Dr. N. PM., *Sejarah Gereja Katholik Indonesia*. Jilid IIIb dan 4, Penerbit Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Wali Gereja Indonesia, Jakarta, 1973.
- Proyek Pembinaan dan Bantuan kepada Pondok Pesantren, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Ketrampilan di Pondok, Pesantren*, Departemen Agama RI, 1978.
- Team Penyusun BKP 3 dan Texts Book Writing Centre PTDI, *Peranan Pondok Pesantren dalam Pembangunan*, Badan Penerbit PT. PARYU BARKAH Jakarta, 1974.
- Pigeaud Ph. D., Th. GTh., *Java in the 14 th. Century. A Study in Cultural History*, The Hague Martinus Nijhoff, 1962.

- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah *Daerah Jawa Tengah*, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Dep. P dan K, Jakarta, 1978.
- Purbacaraka, Prof. Dr. R. NG., *Riwayat Indonesia*, I, Jakarta.
- Said M & Mansur, Dahlan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, Penerbit Kebangsaan, Jakarta, 1953.
- Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia, II - III- IV - V - VI*, Departemen P dan K, Jakarta 1975.
- Sartono Kartodirdjo, *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia abad XIX - XX* No. 1, Desember 1967, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM, Yogyakarta.
- Sedikit tentang: Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan* (Stensilan), Dipersiapkan Untuk Penataran Wartawan Bidang Agama Tingkat Nasional Angkatan ke 11 di Pondok Pesantren Pabelan, tanggal 17 - 23 Desember 1979.
- Sidi Gazalla, Drs., *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Jakarta, Pustaka Antara, 1968.
- Solichin Salam, *Sekitar Wali Sanga*, Kudus, 1972.
- , *K. h. Ahmad Dahlan, Tjita-tjita dan Perdjoaangannya*, Depot Pengajaran Muhammadiyah, Jakarta, 1962.
- Soedikto, Hermien, *Suatu masa dalam kehidupan Kartini*, Jepara, 1977.
- Soeroto, Siti Soemandari, *Kartini Sebuah Biografi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Statistik Pendidikan, *Propinsi Jawa Tengah Tahun 1974--1978*, Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah.
- Toisuta, Willy, et. al, *Sejarah Pengajaran Kristen di Indonesia*, MPPK/MPS, Salatiga 1976.
- Umar Hasyim, Sunan Kalijaga, Penerbit "Menara", Kudus 1974

Wirowidjojo, Drs. R. Soetjipto, *Sekolah Kristen di Indonesia*. GKJ dan GKI, Jawa Tengah 1978.

Wyndham, H. A., *Native Education*, London, University Press. 1933.

BROSUR - BROSUR/DOKUMEN

LUSTRUM PERTAMA IAIN WALISONGO
Jawa Tengah 6 April 1970 - 6 April 1975.

KENANGAN DELAPAN TAHUN IAIN WALISONGO
6 April 1970 - 6 April 1978.

Pemerintah Daerah dan Kantor Sensus & Statistik Kabupaten Magelang, *Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam angka Tahun 1976--1977*.

Lampiran Pidato Laporan Direktur APDN Semarang pada Peringatan Dies Natalis ke-XIII dan Wisuda Sarjana Muda Angkatan ke-XI APDN Semarang pada tanggal 7 Nopember 1978 di Semarang

Sekolah Tehnik Pertama Negeri Jepara.

Peringatan 10 tahun tentang kemajuan STP Negeri di Jepara 1956.

Buku Peringatan Genap 100 Tahun Suster-Suster St. Fransiskus di Indonesia 1970.

Booklet sasana Rehabilitasi Penderita Cacat Netra Temanggung, Kantor Wilayah Departemen Sosial Jawa Tengah Semarang.

Algemeen Verslag Van het Indlandsch Onderwijs in Nederlandsch Indie 1893 t/m 1897.

Arsip Onderwijs 1900--1940 di Arsip Nasional.

Regearings Almanak 1900, jilid 1.

Buku Peringatan Seperempat Abad 25 Mei 1976, Perhimpunan Perhimpunan Pendidikan Kristen Surakarta.

Universitas Negeri Jendral Soedirman Purwokerto, Laporan tahunan Rektor 1976--1977.

Surat Kabar

Harian "SUARA MERDEKA" Semarang

Tanggal 2 Juli 1976

Tanggal 23 Mei sampai dengan 5 Juni 1980

Tanggal 12 Mei 1980

STATISTIK PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1978

Lampiran I

172

A. LUAS DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK.

KERESIDENAN	DAERAH TK. II	LUAS DAERAH	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK USIA SEKOLAH			
				7--12	13--15	16--18	Jum 7--18
SEMARANG	1. Cod. Semarang	364,89	957,029	152561	66405	66493	285009
	2. Kod. Salatiga	16.61	95,162	12909	5788	5624	24321
	3. Kab. Semarang	1008.19	684.205	120902	44982	38546	204430
	4. Kab. Kendal	881.17	665.382	113639	43297	37101	196767
	5. Kab. Demak	1060,33	626,263	110704	41187	35295	187186
	6. Kab. Grobongan	201116	989A46	17asl7	64670	55416	293903
P A T I	7. Kab. P a t i	1710.68	935147	165866	61712	52881	280459
	8. Kab. Kudus	477,26	497,662	90105	33524	28727	152356
	9. Kab. Jepara	1035,28	647,648	118605	44128	27814	200547
	10. Kab. Rembang	1036,34	412,176	73585	27378	23461	124424
SURAKARTA	11. Kab. Muara	2623,48	674,545	124430	46296	39671	210297
	12. Kod. Surakarta	46,57	444,221	76552	34324	33365	144241
	13. Kab. Klaten	694,06	1064244	191974	71424	61205	324603
	14. Kab. Boyolaii	107519	767A23	142077	52860	45297	240234
	15. Kab. Sragen	999,9	737,499	128719	47891	41038	217648
	16. Kab. Sukoharjo	485,96	574180	98986	36828	31559	167373
	17. Kab. Karanganyar	79317	581A67	100642	37445	32087	170174

KEDU	18. Kab. Wonogiri	1921,45	933,735	179052	66618	57085	302755
	19. Kod. Magelang	19A8	109A23	20383	9140	8885	38408
	20. Kab. Magelang	117647	900121	166451	61928	53068	281447
	21. Kab. Temanggung	83347	526143	94562	35185	30148	159892
	22. Kab. Wonosobo	964,07	581,813	103699	9140	33061	38408
BANYUMAS	23. Kab. Purworejo	111240	691117	132857	61928	42130	224151
	24. Kab. Kebumen	136743	1016438	18776&	35185	59768	317284
	25. Kab. Banyumas	1311,01	1168.669	209147	38582	66681	353641
	26. Kab. Cilacap	2334,15	1302.055	238086	49164	75907	402574
	27. Kab. Purbalingga	766,41	654,820	117513	43720	37465	198698
PEKALONGAN	28. Kab. Banjarnegara	1133,77	657,226	118623	45134	37819	201576
	29. Kod. Pekalongan	17,77	118,03	120619	9243	8984	38847
	30. Kod. T e g a l	12,67	117,359	19542	14432	8517	42221
	31. Kab. Pekalongan	875,55	622,064	111098	41034	35420	187552
	32. Kab. T e g a l	861,17	1008.620	173556	64572	55333	293461
	33. Kab. Brebes	1676,84	1183.037	209392	77868	66727	353987
	34. Kab. Pemalang	1046,80	882,516	161365	60037	51446	272848
	35. Kab. Batang	750,36	510,932	91044	33949	29091	154284
JUMLAH		34,502,0	24,316,118	4353760	1146.616	1423415	7.423489

Sumber : Statistik Pendidikan Jawa Tenph (1974 - 1978) Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi Jawa Tengah.

B. JENIS SEKOLAH DAN JUMLAH MURID-JUMLAH LULUS

No.	JENIS SEKOLAH	TAHUN	JUMLAH NEGERI				JUMLAH NEGERI				JUMLAH NEGERI			
			SEK.	MURID	GURU	LULUS	SEK.	MURID	GURU	LULUS	SEK.	MURID	GURU	LULUS
1.	T K	1978	8	168	4	112	5717	207492	8247	143262	5719	207660	8251	6619
2.	S D	1978	8	312M83	107155	223545	1061	211606	7068	49709	1273,	399694	184452	8312
3.	S M P	1978	205	186267	5314	33412	885	iU3427	13138	49709	1273	399694	184452	83121
4.	SMEP	1978	68	6160	1460	5270	26	1226	274	976	941	7386	1734	624
5.	SKKP	1978	19	1619	386	1312	28	1244	317	1004	471	2863	703	231
6.	S T	1978	144	23935	3545	13217	33	2361	390	1584	177	26296	3935	1480
7.	SMA	1978	56	41173	2542	8593	124	41839	2566	6437	198	83012	5108	1503
8.	SMEA	1978	35	8588	957	4764	89	27014	1873	4922	124	45002	2830	968
9.	SMKK	1978	7	2354	163	518	23	3685	369	939	30	6039	532	145
10.	STM/SMIK	1978	29	12215	1045	3804	106	42130	2943	9658	135	54345	3988	1346
11.	SMPS	1978	2	598	103	124	-	-	-	-	2	593	103	12
12.	SMKI	1978	1	475	43	51	1	29	14	-	2	504	57	5
13.	SMFA	1978	-	-	-	-	7	658	111	15	7	658	Jill	15
14.	SPG	1978	26	16622	636	5138	33	10844	222	242	59	27466	858	7567
15.	SGO	1978	8	1973	268	272	-	-	-	-	8	1973	2681	272
16.	KPG/KBB	1978	15	1231	139	1111	-	-	-	-	15	1231	1391	1111
17.	PGSLP	1978	1	464	65	464	-	-	-	-	1	464	651	464
18.	SPGLLB	1978	1	194	18	83	-	-	-	-	-	194	18	83

Sumba : Statistik Pendidikan, Propinsi Jawa Tengah (1974 -- 1978)

Kantor Wilayah Dep. P dan K, Propinsi Jawa Tengah.

**Tabel: 4 Sekolah-Sekolah Negeri di Jawa Tengah 1978
Per Kabupaten**

No.	Kab./Kodya	Jenis dan Jumlah Sekolah						Ket	
		TK	SD	SLP					
					UM	KEJ	UM		KEJ
1.	Kodya Semarang	-	422	24	15	7	15		
2.	Kab. Semarang	-	469	-		1	1		
3.,	Kab. Kendal	-	485	4	6	3	4		
4.	Kodya Salatiga	-	62	2	4	1	3		
5.	Kab. Demak	-	425	3	2	1	1		
6.	Kab. Grobogan /Purwodadi	-	796	7	3	2	1		
7.	Kab. Pati	-	718	7	8	2	3		
8.	Kab. Jepara	-	522	4	3	1	1		
9.	Kab. Rembang	-	347	5	3	2	1		
10.	Kab. Kudus	-	365	9	1	1	3		
11.	Kab. Blora	-	538	5	6	2	3		
12.	Kodya Pekalongan	-	89	10	3	1	4		
13.	Kab. Pekalongan	-	437	-	-	-	-		
14.	Kab. Batang	-	361	6	1	1	1		
15.	Kab. Pemalang	-	-		3	1	2		
16.	Kodya Tegal	-	87	16	13	4	6		
17.	Kab. Tegal/Slawi	-	567	-	-	-	-		
18.	Kab. Brebes	-	765	12	2	2	2		
19.	Kodya Surakarta	-	196	20	5	5	16		
20.	Kab. Sukoharjo	-	385	12	6	2	3		
21..	Kab. Sragen	-	555	17	8	1	3		
22.	Kab. Boyolali	-	510	17	5	1	4		
23.	Kab. Klaten	-	755	24	17	3	11		
24.	Kab. Karanganyar	-	429	8	9	2	1		
25.	Kab. Wonogiri	-	727	11	9	4	1		
26.	Kodya Magelang	-	64	-	-	-	-		
27.	Kab. Magelang	-	6	25	6	5	2		
28.	Kab. Temanggung	-	413	6	2	1	1		

29.	Kab. Wonosobo	-	439	6	5	1	3
30.	Kab. Kebumen	-	847	11	8	2	6
31.	Kab. Purworejo	-	533	17	12	1	5
32.	Kab. Banyumas/ Purwokerto	-	804	22	2	3	7
33.	Kabupaten Banjar- negara	-	537	12	8	8	1
34.	Kab. Purbalingga	-	484	16	2	1	3
35.	Kab. Cilacap	-	1003	16	2	1	3
Jumlah			16.759:339	177	63	123	

Sumber : Kan.Wil. dan K. Jawa Tengah 1978.

**Tabel: 5. a. Sekolah-Sekolah Islam di Jawa Tengah 1978
Per Kabupaten/Kotamadya**

No.	Kab./Kodya	Jenis dan Jumlah Sekolah						Ket
		TK	SD	SLP		SLA		
				UM	KEJ	UM	KEJ	
1.	Kodya Semarang	-	50	20	-	2	1	8 muh
2.	Kab. Semarang	-	43	-	-	-	-	-
3.	Kab. Kendal	-	7	8	-	3	-	7 muh
4.	Kodya Salatiga	-	1	1	-	1	1	2 muh
5.	Kab. Demak	-	4	3	-	-	-	-
6.	Kab. Grobogan/ Purwodadi	-	11	6	5	1	-	3 muh
7.	Kab. Pati	-	9	4	1	-	1	4 muh
8.	Kab. Jepara	-	5	6	1	-	-	3 muh
9.	Kab. Rembang	-	4	2	-	-	-	-
10.	Kab. Kudus	-	7	5	-	1	1	3 muh
11.	Kab. Blora	-	46	5	-	1	1	4 muh
12.	Kod. Pekalongan	-	25	13	3	1	-	8 muh
13.	Kab. Pekalongan	-	33	-	-	-	-	-
14.	Kab. Batang	-	3	-	-	-	-	-
15.	Kab. Pemaslang	-	-	6	1	-	-	3 muh
16.	Kodya Tegal	-	11	4	-	-	-	2 muh
17.	Kab. Tegal/Slawi	-	6	5	-	-	-	3 muh
18.	Kab. Brebes	-	4	-	-	-	-	-
19.	Kodya Surakarta	-	26	10	7	8	-	14 muh
20.	Kab. Sukoharjo	-	9	4	-	1	-	5 muh
21.	Kab. Sragen	-	3	13	1	2	-	14 muh
22.	Kab. Boyolali	-	3	7	1	1	-	2 muh
23.	Kab. Klaten	-	7	15	2	5	-	26 muh
24.	Kab. Karanganyar	5	7	2	1	2	-	12 muh
25.	Kab. Wonogiri	-	1	12	1	-	2	10 muh*
26.	Kodya Magelang	4	-	-	-	-	-	-
27.	Kab. Magelang	-	11	16	-	2	8	24 muh
28.	Kab. Temanggung	-	2	6	-	1	1	6 muh

29.	Kab. Wonosobo	-	10	3	-	-	1	4 muh.
30.	Kab. Kebumen	-	3	7	2	1	1	8 muh
31.	Kab. Purworejo	-	-	12	-	1	1	7 muh
32.	Kab. Banyumas/ Purwokerto	-	52	9	-	1	2	10 muh
33.	Kab. Banjar- negara-	-	21	9	-	1	-	10 muh
34.	Kab. Purbalingga	-	1	6	-	1	-	7 muh
35.	Kab. Cilacap	-	63	16	-	2	-	10 muh
	Jumlah	-	490	234	10	36	41	219 muh

Sumber : Kan. WU. P dan K Jawa Th. 1978.

*) Jumlah Sekolah Muhammadiyah

**Tabel : 5.b Sekolah Islam (Madrasah) di Jawa Tengah
Tahun 1979--1980 per Kabupaten**

No.	Kabupaten/Kodya	Jenis Sekolah			Ket.
		Ibtidaiyah	Tsanawiyah	Aliyah (SLTA)	
1.	Kodya Semarang	186	13	3	
2.	Kabupaten Semarang/ Unggaran	7	6	7	
3.	Kabupaten Kendal	86	11	4	
4.	Kodya Salatiga	12	3	3	
5.	Kabupaten Demak	78	24	4	
6.	Kabupatoo Grobogan/ Puriwodadi	92	17	6	
7.	Kabupaten Ipati	189	39	12	
8.	Kapupatmi Jepara	113	21	8	
9.	Kabupaten Rembang	32	11	15	
10.	Kabupaten Kudus	100	16	8	
11.	Kabupaten Blora	43	8	1	
12.	Kodya Pekalongan	97	12	4	
13.	Kabupaten Pokalongan	21	31	1	
16.	Kabupaten Batang	105	9	1	
17.	Kabupaten Pemalang	42	6	1	
16.	Kodya Tegal	5	1	-	
17.	Kabupaten Tegal/ Slawi	123	5	3	
18.	Kabupaten brebes	137	1	3	
19.	Kodya Surakarta	8	6		
20.	Kabupaten Sukoharjo	80	9	4	
21.	Kabupaten Sragen	93	8	-	
22.	Kabupaten Boyolali	209	24	7	
23.	Kabupaten Klaten	71	23	6	
24-	Kabupaten Karanganyar	56	2		
25.	Kabupaten Wonogiri	42	4		

26.	Kodya Magelang	5	1		
27.	Kabupaten Magelang	348	33	2	
28.	Kabupaten Temanggung	132	10	4	
29.	Kabupaten Wonosobo	98	15	-	
30.	Kabupaten Kebumen	83	10	41	
31.	Kabupaten Purworejo	36	8		
32.	Kabupaten Banyumas/ Purwokerto	151	27	9	
33.	Kabupaten Banjarnegara	164			
34.	Kabupaten Purbalingga	163	19	2	
36.	Kabupaten Cilacap	155	9		
	Jumlah	3.433	437	127	

Sumber : Kan.Wil. Departemen Agama, Jawa Tengah (1978)

**Tabel : 5.c Sekolah Islam (Madrasah) di Jawa Tengah
Tahun 1979--1980 per Kabupaten**

No.	Daerah	Jumlah Pondok	Jumlah Guru	Santri		Jumlah
				Pria	Prp.	
1.	Kodya Semarang	14	69	677	37	714
2.	Kodya Salatiga	3	5	127	43	170
3.	Kab. Semarang	32	-	1964	1133	4097
4.	Kab. Kendal	46	201	1900	20	1920
5.	Kab. Demak	60	-	4654	1103	5757
6.	Kab. Grobogan	25	90	1996	3134	4230
7.	Kab. Pati	36	182	3054	2144	5198
8.	Kab. Kudus	15	-	1006	378	1374
9.	Kab. Jepara	21	76	1874	1295	3189
10.	Kab. Rembang	21	33	2332	689	3021
11.	Kab. Blora	20	93	1551	840	2391
12.	Kodya Pekalongan	2	19	200	166	366
13.	Kodya legal	1	11	22	17	29
14.	Kab. Pekalongan	13	13	2386	1413	3799
15.	Kab. Batang	6	15	552	530	1082
16.	Kab. Pemaslang	15	69	981	352	1233
17.	Kab. Tegal	9	-	1410	300	1710
18.	Kab. Brebes	18	-	1629	754	2323
19.	Kab. Banyuma	16	-	1433	938	2371
20.	Kab. Cilacap	41	-	1435	938	3373
21.	Kab. Purbalinggo	6	22	384	204	588
22.	Kab. Banarnegara	6	15	575	374	949
23.	Kodya Magelang	a	20	119	35	154
24.	Kab. Magelang	32	81	4181	848	5029
25.	Kab. Temanggung	20	49	1187	440	1627
26.	Kab. Wonosobo	40	-	2993	2340	5233
27.	Kab. Purworejo	18	50	986	663	1649
28.	Kab. Kebumen	13	-	1175	278	1585
29.	Kodya Surakarta	9	63	654	926	932
31.	Kab. Boyolali		187	1516	1164	2680
32.	Kab. Sragen	5	29	553	261	814
33.	Kab. Sukoharjo	2	26	143	26	169
34.	Kab. Karanganyar	4	5	394	264	658
35.	Kab. Wonogiri	3	17	228	99	307
	Jumlah :	594	1446	48631	2346	72

Sumber : Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah 978

**Tabel : 6. Sekolah-Sekolah Kristen di Jawa Tengah 1978
Per Kabupaten**

No.	Kabupaten	Jenis dan Jumlah Sekolah						KET.
		TK	SD	SLP		SLA		
				UM	KEJ	UM	KEJ	
1.	Kodya Semarang	-	16	13	-	4	1	(.34)
2.	Kabupaten Semarang	-	43	-	-	1	2	(46)
3.	Kabupaten Kendal	-	1	-	-	-	-	
4.	Kodya Salatiga	-	5	3	1	1	2	
5.	Kabupaten Demak	-	1	-	-	-	-	
6.	Kabupaten Grobogan/ Purwodadi	-	4	6	-	1	2	
7.	Kabupaten Pati	-	3	4	-	1	1	
8.	Kabupaten Jepara	-	2	3	-	-	-	
9.	Kabupaten Rembang	-	1	1	-	-	-	
10.	Kabupaten Kudus	-	2	2	-	1	1	
11.	Kabupaten Blora	-	4	4	-	1	1	
12.	Kodya Pekalongan	-	5	-	-	1	1	
13.	Kabupaten-Pekalongan	-	2	1	-	-	-	
14.	Kabupaten Batang	-	-	-	-	-	-	
15.	Kabupaten Pemalang	-	5	1	-	-	-	
16.	Kodya Tegal	-	-	-	-	-	-	
17.	Kab. Tegal/Slawi	-	-	-	-	-	-	
18.	Kabupaten Brebes	-	-	-	-	-	-	
19.	Kodya Surakarta	-	12	10	2	1	4	(29)
20.	Kabupaten Sukoharjo	-	2	1	-	-	-	
21.	Kabupaten Sragen	-	1	2	-	-	-	
22.	Kabupaten Boyolali	-	-	1	1	-	3	
23.	Kabupaten Klaten	-	8	6	1	1	3	
24.	Kabupaten Karanganyar	-	3	-	-	-	-	
25.	Kabupaten Wonogiri	-	-	2	-	-	-	
26.	Kodya Magelang	-	4	4	-	-	-	
27.	Kabupaten Magelang	-	13	-	-	-	-	
28.	Kabupaten Temanggung	-	2	3	-	-	-	
29.	Kabupaten Wonosabo	-	4	2	-	-	-	

30.	Kabupaten Kebumen	-	5	4	-	1	-
31.	Kabupaten Purworejo	-	-	3	-	2	1
32.	Kabupaten Banyumas/ Purwokerto	-	6	3	-	1	1
33.	Kabupaten Banjarnegara	-	1	1	-	-	-
34.	Kabupaten Purbalingga	-	2	1	-	-	-
35.	Kabupaten Cilacap	-	8	6	-	2	-
	Jumlah :	-	165	92	5	19	20

Sumber : Kan.Wil. dan K. Jawa Tengah 1978.

**Tabel : 7 Sekolah-sekolah Katolik di Jawa Tengah 1978
per Kabupaten**

No.	Kabupaten	Jenis dan Jumlah Sekolah						
		TK	SD	SLP		SLA		KET.
				UM	KEJ	UM	KEJ	
1.	Kodya Semarang	-	29	23	-	4	5	
2.	Kabupaten Semarang	-	21	-	-	2	-	
3.	Kabupaten Kendal	-	2	-	-	-	1	
4.	Kodya Salatiga	-	6	-	-	-	-	
6.	Kabupaten Demak	-	-	-	-	-	-	
6.	Kabupaten Grobongan/ Purwodadi	-	1	-	-	-	-	
7.	Kabupaten Pati	-	-	-	-	-	-	
8.	Kabupaten Jepara	-	-	-	-	-	-	
9.	Kabupaten Rembang	-	1	3	-	-	-	
10.	Kabupaten Kudus	-	-	1	-	-	-	
11.	Kabupaten Blora	-	2	2	2	-	-	
12.	Kodya Pekalongan	-	1	-	-	-	-	
13.	Kabupaten Pekalongan	-	-	1	-	1	-	
14.	Kabupaten Batang	-	-	-	-	-	-	
15.	Kabupaten Pemaslang	-	-	1	-	-	-	
16.	Kodya Tepi	-	-	1	-	1	2	
17.	Kab. Tegal/Slawi	-	-	-	-	-	-	
18.	Kabupaten Brebes	-	-	-	-	-	-	
19.	Kodya Surakarta	-	14	6	1	4	2	
20.	Kab. Sukoharjo	-	-	-	-	-	-	
21.	Kabupaten Stagen	-	-	3	-	2	1	
22.	Kabupaten Boyolali	-	-	3	-	1	-	
23.	Kabupaten Klaten	-	4	-	2	1	1	
24.	Kabupaten Karanganyar	-	-	2	-	-	-	
25.	Kabupaten Wonogiri	-	-	-	-	-	-	
26.	Kodya Magelang	-	4	2	-	-	-	
27.	Kabupaten Magelang	-	7	7	-	4	5	

28.	Kabupaten Temanggung	-	2	1	-	-	-
29.	Kabupaten Wonosobo	-	-	-	-	-	-
30.	Kabupaten Kebumen	-	1	-	-	-	-
31.	Kabupaten Purworejo	-	-	4	-	1	1
32.	Kabupaten Banyumas/ Purworejo	-	4	2	-	-	-
33.	Kabupaten Banjarnegara	-	-	-	-	-	-
34.	Kabupaten Purbalingga	-	2	1	-	-	1
35.	Kabupaten Cilacap	-	1	-	-	-	-
	Jumlah :	-	100	65	5	22	20

Sumber : Kan.Wil. dan K. Jawa Tengah 1978.

**Tabel : 8. Sekolah-sekolah Swasta non Agama di Jawa Tengah
Tahun 1978 per Kabupaten**

No.	Kabupaten	Jenis dan Jumlah Sekolah						
		TK	SD	SLP		SLA		KET.
				UM	KEJ	UM	KEJ	
1.	Kodya Semarang	-	60	66	2	8	11	
2.	Kabupaten Semarang	-	1	-	-	3	7	
3.	Kabupaten Kendal	-	1	15	-	1	4	
4.	Kodya Salatiga	-	2	5	-	1	5	
5.	Kabupaten Demak	-	3	15	2	4	3	
6.	Kabupaten Grobogan/ Puriwodadi	-	-	23	1	1	3	
7.	Kabupaten Pati	-	4	20	-	2	3	
8.	Kabupaten Jepara	-	1	12	-	-	3	
9.	Kabupaten Rembang	-	3	6	-	1	3	
10.	Kabupaten Kudus	-	6	14	2	1	6	
11.	Kabupaten Blora	-	4	11	2	1	4	
12.	Kodya Pekalongan	-	1	13	1	1	3	
13.	Kabupaten Pekalongan	-	-	-	-	-	-	
14.	Kabupaten Batang	-	-	-	-	-	-	
15.	Kabupaten Pemalang	-	1	13	-	1	2	
16.	Kodya Tegal	-	2	19	1	3	5	
17.	Kab. Tegal/Slawi	-	-	-	-	-	-	
18.	Kabupaten Brebes	-	-	20	1	3	4	
19.	Kodya Surakarta	-	18	20	2	7	16	
20.	Kabupaten Sukoharjo	-	-	-	-	-	2	
21.	Kabupaten Sragen	-	-	11	-	1	5	
22.	Kabupaten Boyolali	-	1	14	1	3	7	
23.	Kabupaten Klaten	-	9	24	1	4	9	
24.	Kabupaten Karanganyar	-	1	11	3	-	4	
25.	Kabupaten Wonogiri	9	35	5	-	-	4	
26.	Kodya Magelang	2	-	-	-	4	11	
27.	Kabupaten Magelang	18	34	-	-	-	-	

28.	Kabupaten Temanggung	-	1	15	-	2	5
29.	Kabupaten Wonosobo	-	9	7	-	-	2
30.	Kabupaten Kebumen	-	2	31	2	4	13
31.	Kabupaten Purworejo	-	-	48	8	5	17
32.	Kabupaten Banyumas/ Purwokerto	-	70	19	9	3	13
33.	Kabupaten Banjarnegara	-	3	8	-	-	3
34.	Kabupaten Purbalingga	-	4	6	-	1	5
35.	Kabupaten Cilacap	-	11	28	7	4	10
Jumlah :		-	247	563	51	73	61

Sumber : Kan.Wil. dan K. Jawa Tengah 1978.

Lampiran : III

**NAMA DAN ALAMAT PERGURUAN TINGGI SWASTA
YANG TERMASUK DALAM
WILAYAH KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI
SWASTA WILAYAH V DI JAWA TENGAH**

No	A l a m a t	Nama Perguruan Tinggi
1.	Jln. Veteran Dalam No. 9 Semarang	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2.	Jln. Raya Demak (Kaligawe) Semarang	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3.	Jln. Diponegoro No. 54/58 Salatiga	Universitas Kristen Satya Wa- cana Salatiga
4.	Jln. Tidar No. 21 A Magelang	Universitas Muhammadiyah Magelang
5.	Jln. Plampitan No. 35 Semarang	IKIP Veteran Jawa Tengah Semarang
6.	Jln. Veteran No. 23 Sukoharjo	IKIP Veteran cabang Sema- rang di Sukoharjo
7.	Jln. Brigjen Sudiato No. 60 Surakarta	IKIP Muhammadiyah Sura- karta
8.	Jln. Masjid No. 1 Karanganyar	IKIP Muhammadiyah Ka- ranganyar
9.	Jln. Kenanga No. 6 Purworejo	IKIP Muhammadiyah Purwo- rejo
10.	Jln. dr. Angka No. 1 Purwokerto	IKIP Muhammadiyah Daerah Purwokerto
11.	Jln. Gang Widoro No. 3 Klaten	IKIP Yayasan Pendidikan Klaten
12.	Jln. Pandanaran Semarang	Institut Teknologi Katolik Semarang
13.	Jln. Sunan Muria No. 1/bawah. Kudus	SekolahTinggi Ekonomi Kudus

14.	Jln. Mugas No. I Semarang	Akademi Keuangan dan Perbankan Semarang
15.	Jln. Yosodipuro No. 38 Surakarta	Akademi Uang dan Bank Pignatelli Surakarta
16.	Jln. Jen. Gatot Subroto Magelang	Akademi Uang dan Bank Artha Bhakti Magelang
17.	Jln. Diponegoro No. 19 Surakarta	Akademi Uang dan Bank Pancasila Surakarta
18.	Jln. Diponegoro No. 19 Surakarta	Akademi Accounting Pignatelli Surakarta
19.	Jln. Tembaga No. 9 Surakarta	Akademi Pimpinan Perusahaan Indonesia Surakarta
20.	Jln. Veteran Dalam No.9 Semarang	Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang
21.	Dn. Pemuda No 116 Semarang	Akademi Bahasa Trinitas Semarang
22.	Jln. Veteran No. 207 Surakarta	Akademi Bahasa Asing Pignatelli Surakarta
23.	Jln. Jen. Gatot Subroto Magelang	Akademi Bahasa Asing Artha Bhakti Magelang
24.	Jln. Gajah Mada No. 119 A Semarang	Akademi Publisistik Pembangunan Dipanegara Semarang
25.	Karangasem Lawehan Surakarta	Tehnik Mesin Industri Surakarta
26.	Jln. Menteri Supeno No. I Semarang	Farming Semarang
27.	Jln. Menteri Supono No. I Semarang	Akademi Maritim Nasional Indonesia
28.	Jln. Mgr. Sugiopranoto SJ. No. 37 Semarang	Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang
29.	Jln. Veteran No. 67 Semarang	Akademi Keuangan dan Akutansi Semarang
30.	Jln. Kolonel Sutarto No. 92 Surakarta	Akademi Tehnik Mesin "WARGA" Surakarta
31.	Jln. Cinde Raya No. 27 Semarang	Akademi Tehnologi Semarang

Lampiran: IV

PEDOMAN WAWANCARA SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH JAWA TENGAH

Situasi Daerah/Lingkungan pada waktu lembaga berdiri.

1. Situasi Politik:

- 1.1 Bagaimana politik umum pada waktu itu? (pergolakan Politik, politik kolonial, masa pembangunan dan sebagainya).
- 1.2 Bagaimana sikap penguasa terhadap lembaga pendidikan Yang bersangkutan?
- 1.3 Lain-lain peristiwa dalam bidang politik.

2 Situasi Ekonomi:

- 2.1 Bagaimana situasi ekonomi pada waktu itu? (jaman “depresi”, jarban makmur, daerah yang bersangkutan, daerah miskin, daerah makmur dan lainlain).
- 2.2. Apakah jenis-jenis mata pencaharian penduduk daerah tersebut (sebagian besar petani, lainnya pegawai pabrik, pegawai negeri).
- 2.3 Lain-lain hal yang menonjol dalam bidang ekonomi.

3 Situasi Pendidikan:

- 3.1. Tingkat pendidikan penduduk (masih banyak yang buta huruf, sudah ada yang bersekolah dan sebagainya).
- 3.2. Bagaimana sarana pendidikan pada waktu itu? (jumlah sekolah, murid, guru, sistem kurikulum dan sebagainya).
- 3.3. Bagaimana peranan guru dan kedudukan guru pada waktu itu?

4. Kehidupan beragama:

- 4.1. Apakah daerah yang bersangkutan merupakan daerah “santri”? (diuraikan sifat-sifat kesantrian penduduk, ibadah/adat istiadat keagamaan).
- 4.2. Apakah ada agama-agama lain yang terdapat di daerah itu selain Islam? (sebutkan kegiatan keagamaan/tata cara keagamaan mereka).
- 4.3. Golongan penduduk yang mana aktif beribadat/ yang tidak aktif beribadat dari agama tertentu? (pribumi, asing, priyayi, pegawai, pedangang, buruh, tani, dan sebagainya).

5. Kehidupan Kebudayaan:

- 5.1. Apakah adat kebiasaan, kesenian daerah tersebut bercorak : Hindu-Jawa/Islam/Cina/Barat? (uraikan, dapat lebih dari satu).
- 5.2. Apakah ada kebiasaan berjariah ke punden, makam suci, benda suci, sungai, selamatan dan sebagainya?

6. Situasi Kesehatan:

- 6.1. Bagaimana keadaan kesehatan rakyat dan kesehatan lingkungan?
- 6.2. Apakah di daerah tersebut, masih menggunakan pengobatan tradisional atau sudah ada pengobatan modern? (Uraikan).

7. Kegiatan Sosial yang lain:

- 7.1. Apakah penduduk mempunyai kegiatan-kegiatan sosial? (perkumpulan-perkumpulan sosial, olah raga dan sebagainya).

8. Penduduk:

- 8.1. Berapa jumlah penduduk (kira-kira) pada waktu itu? Kalau ada juga kelompok umur, jenis kelamin.
- 8.2. Ada beberapa macam golongan penduduk menurut suku bangsa? (Jawa, luar Jawa, Cina, Belanda, dan sebagainya).

9. Kelompok-kelompok masyarakat:

- 9.1. Ada beberapa macam golongan penduduk menurut "pekerjaannya" (golongan pegawai dan priyayi (White Collors) golongan agama (kyai dan murid-murid/pengikutnya). golongan pedagang/pengusaha/pengrajin golongan petani/nelayan golongan buruh (b. tani, b. perkebunan, b. industri, b.jasa dan lain-lain).

II Asal mula berdirinya lembaga.

1. Nama lembaga pendidikan:
2. Tahun berdirinya: (kira-kira)
3. Tokoh pendiri pertama (1): (uraikan riwayat hidupnya)
- 4.. Apakah idee/motivasi didirikannya lembaga tersebut
5. Apakah asas dan tujuan lembaga pendidikan' tersebut'
6. Di mana lokasi lembaga pendidikan tersebut,(mengapa di sana?)
7. Kelompok masyarakat manakah yang mendukung pendidikan? (pegawai, golongan agama, pengusaha, priyayi, terpelajar, petani, pedagang, Mengapa mereka?)
8. Bagaimana keadaan sarana pendidikan lembaga yang bersangkutan? (gedung, peralatan, kurikulum, sistem, jenis dan sebagainya)
9. Keadaan murid-murid: dari mana asal mereka? Dari golongan mana? jenis kelamin? Apa persyaratan masuk sekolah tersebut?
10. Keadaan guru: dari mana asal guru? dari golongan/kelompok mana? Apa pendidikan guru? Apa syarat-syarat menjadi guru di sekolah tersebut?
11. Sifat Pendidikarn: formal atau non normal? (uraikan cara).

III Perkembangan Lembaga Pendidikan:

- 1.1 Apakah pimpinan lembaga pendidikan keturunan pendiri pertama 1)? Dari golongan manakah para pimpinan?

- 1.2 Apakah idee/motivasi lembaga tersebut mengalami perubahan?
 - 1.3 Apakah lokasi pendidikan berpindah/bertambah?
 - 1.4 Apakah asas tujuannya berubah?
 - 1.5 Kelompok masyarakat manakah yang mendukung lembaga pendidikan tersebut?
 - 1.6 Bagaimanakah perkembangan prasarananya? Jenis-jenis sekolah?
 - 1.7 Bagaimana perkembangan murid? (asal murid, jumlah murid, jenis kelamin, dari golongan tertentu, persyaratan masuk?)
 - 1.8 Bagaimana perkembangan/kedudukan guru? (asal guru, dari kelompok mana pendidikan guru, persyaratan, dan lain-lain).
 - 1.9 Bagaimana sifat pendidikan? (formal, non formal, dan lain-lain).
 - 1.10 Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi sampai tahun 1900?
 - 1.11 Apakah hasil yang pernah dipakai?
 - 1.12 Apakah ada peristiwa/perubahan penting yang mempengaruhi lembaga?
2. **Masa th. 1900--1942:**
Pertanyaan sama seperti no. III. 1
 3. **Masa th. 1942--1945:**
Pertanyaan idem no. III. 1
 4. **Masa th. 1945--1950:**
Pertanyaan idem no. III. 1
 5. **Masa th. 1950--1979:**
Pertanyaan idem no, III. 1

Lampiran-lampiran :
Statistik sekolah kalau ada.

Lampiran: V

DAFTAR ISIAN

Daftar isian tentang sejarah pendidikan di daerah propinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta, dari tingkat Pendidikan Dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi, sejak jaman pengaruh Hindu sampai dengan jaman Republik Indonesia.

Petunjuk cara mengisi

- a. Berilah tanda silang (x) pada nomor jawaban yang dibenarkan.
- b. Isilah masing-masing jumlah satuan/kriteria.
- c. Coret yang tidak diperlukan.

Contoh:

1. Kecamatan :.....
2. Terletak di : daerah pantai()
daerah pedalaman ()
daerah pegunungan ()
daerah perkotaan (x)
3. Jenis sekolah yang ada
SD :buah
SLTP :buah
SLTA :buah
4. Keadaan : sekolah masih baik/agak rusak/rusak sekali.

Kecamatan :

Kabupaten/Kotamadya :

1. Keadaan demografi tahun 1980.

1. Jumlah penduduk : orang
Laki-laki : orang
Wanita : orang

2. Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia.
- 0--10 tahun : orang
 11--20 tahun : orang
 21--30 tahun : orang
 31--ke atas : orang
3. Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian:
- a. Petani : orang
 b. Pedagang : orang
 c. Buruh : orang
 d. Nelayan : orang
 e. Pegawai Negeri : orang
4. Klasifikasi penduduk menurut agama yang dianutnya:
- a. Islam : orang
 b. Kristen : orang
 c. Katholik : orang
 d. Hindu Dharma : orang
 e. Budha : orang
 f. Lain-lain : orang
5. Prasarana Keagamaan:
- a. Mesjid/Langgar/Mushola : buah
 b. Gereja Kristen : buah
 c. Gereja Katholik : buah
 d. Pura/Kuil : buah
 e. Biara Budha : buah
 f. Klenteng : buah
 g. Pondok Pesantren : buah
 h. Seminarium : buah

II. Pendidikan tradisional yang ada/ pernah ada:

A. Pengaruh Hindu dan Budha:

Kelembag		tidak ada	pernah ada th	masih ada	keadaannya sekarang
1.	Padepokan	rusak/baik berkembang
2.	Peguron	rusak/baik berkembang
3.	Pertapaan	rusak/baik berkembang
4.	Asrama	rusak/baik berkembang
5.	Biara	rusak/baik berkembang

B. Pengaruh Agama Islam

Kelembagaan	namanya	Jumlah murid	Jumlah guru	mendapat bantuan dari	
1.	Pondok	a
		b
		c
2.	Madrasah	
3.	Pesantren	
4.	Lain-lain	

C. Tokoh-tokoh guru ulama, Pujangga Ajar/Pertama yang pernah hidup di daerah ini sebelum abad XIX (sebelum tahun 1800)

Nama Tokoh		masa hidupnya/jaman dari tahun-tahun	ajaran/pemikiran dalam bidang pendidikan	hasil karya berupa bangunan perkumpulan/buku karangan
1.	a..... b..... c.....
3.	a..... b..... c.....
4.	a..... b..... c.....
5.	a..... b..... c.....

III. Pendidikan Masa Penjajahan

A. Jaman Kompeni (VOC) sebelum tahun 1800

Jenis Sekolah		didirikan sejak tahun	Jumlah murid di kota	Jumlah
1.	Pendidikan
2.	Sekolah latin
3.	Seminarium Theologium
4.	Sekolah Cina
5.	Akademi Pe- Layaran

B. Jaman Hindia Belanda

Jenis Sekolah Dasar Pemerintah

Jenis Sekolah		didirikan sejak tahun	di kota	jumlah
1.	Sekolah Dasar (HIS)
2.	Sekolah Rendah
3.	Sekolah Kelas Satu
4.	Sekolah Kelas Dua
5.	Volkschool
6.	Vervolghschool
7.	Sekolah Dasar Cina
8.	Schakelschool
9.	H.I.S.
10.	Sekolah Raja (Hoofdemschool)

Pendidikan Menengah Umum

1.	M U L O
2.	A M S
3.	H B S
4.

Pendidikan Kejuruan

1.	Sekolah Pertukangan (Ambachtschool)
2.	Sekolah Kerajinan (Handwerkschool- Nijverheidschool)
3.	Sekolah Dagang (Handelschool)
4.	Sekolah Pertanian (Landbowschool cultuurschooi)
5.	Sekolah Kejuruan Wanita (Meijesvakschow)
6.	Sekolah Guru (Kweekschool)
7.	Sekolah Tehnik
8.	MOSVIA
9.	Normaalschool

Jaman Hindia Belanda: Masa tahun 1900--1942
Sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

- a. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Zending (Lembaga Penginjilan Kristen):

	Jenis Sekolah	Terdapat di kota	Jumlah
1.	HIS (SD Bumiputra 7 tahun)		
2.	ELS (SD Eropa 7 tahun)		
3.	Lagere Nijverheidschool (Sekolah Kepandaian Putri)		
4.	HCS (Sekolah SD Cina 7 tahun)		
5.	Volkschool (SD 3 tahun)		
6.	Schakelschool (Sekolah Peralihan)		

Sekolah Lanjutan

1.	Lyceum (SLTP)		
2.	M U L 0 (SMP)		
3.	A M S (SMA)		
4.	H B S (SLTA)		
5.	Kweekschool (Sekolah Guru 4 tahun)		

- b. Yang diselenggarakan oleh Katholik (Missie)

- 1.
- 2.
- 3.

- c. Yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah

- 1.
- 2.
- 3.

- d. Yang diselenggarakan oleh Taman Siswa
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- e. Yang diselenggarakan oleh Al Irsyad
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- f. Yang diselenggarakan oleh Nahdatul Ulama
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- g. Yang diselenggarakan oleh Yayasan lain-lain
 - 1.
 - 2.
 - 3.

IV. Jaman Pendudukan Jepang

Jenis Sekolah	Nama kota	Jumlah	Ket
1. Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko) SMP (Shoto Chu Gakko)			
3. SMT (Koto Chu Gakko)			
4. Sekolah Guru 2 tahun (Syotosikan Gakko)			
5. Sekolah Guru 4 tahun (Gutosikan Gakko)			
6. Sekolah Guru 6 tahun (Kotasikan Gakko)			
7. Sekolah Pertukangan (Kyoyo Gakko)			
8. Sekolah Tehnik Menengah (Kogyo Semnon Gakko)			
9. Sekolah Pertanian (Nogyo Gakko)			
10. Sekolah Pelaran			

